

# **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**SYARIFAH NUR NAYLA**

**Nim. 1742110571**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1441 H / 2020**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH  
DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : SYARIFAH NUR NAYLA

NIM : 1742110571

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

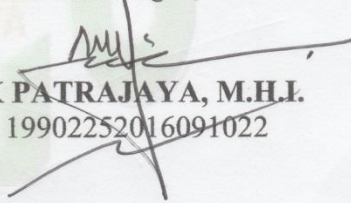
Palangka Raya, 03 Juni 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

  
**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,

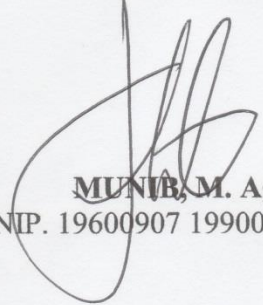
  
**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I.**  
NIP. 19902252016091022

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syariah,

  
**MUNIR, M. Ag**  
NIP. 19600907 199003 1 002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **Syarifah Nur Nayla, NIM 1742115071** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 Juni 2020 M  
4 Syawal 1441 H

Palangka Raya, 18 Juni 2020

### Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I**  
(Ketua Sidang/Penguji)
2. **Munib, M.Ag**  
(Penguji Utama)
3. **Drs. Surya Sukti, MA**  
(Penguji)
4. **Rafik Patrajaya, M.HI**  
(Sekretaris/ Penguji)

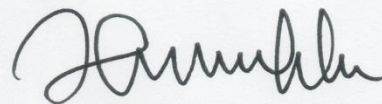
(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**  
NIP. 197704132003121003

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 03 Juni 2020

**Saudari Syarifah Nur Nayla**

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**

di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **SYARIFAH NUR NAYLA**

NIM : **1742110571**

Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI**

**BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

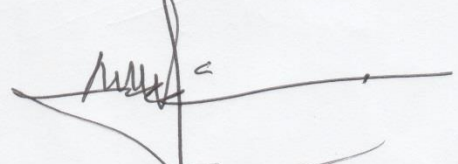
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I.**  
NIP. 19902252016091022



# **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat terhadap faktor dan dampak perkawinan di bawah tangan di Kota Palangka Raya. Tujuan pada penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat terhadap faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di Kota Palangka Raya, (2) mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat mengenai dampak terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini berbentuk deskriptif dan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris Jenis penelitian ini menggunakan sosiologi hukum yang mengkaji "*law as it is in society*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi nikah di bawah tangan menurut pandangan masyarakat yaitu adanya masyarakat yang tidak memiliki akta cerai namun ingin menikah lagi, hamil di luar nikah, masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA, adanya calo, suami ingin poligami diam-diam, persyaratan administrasi tidak lengkap, calon pengantin belum cukup usia menikah, kurangnya pengetahuan, jauhnya akses menuju KUA, tingkat pendidikan yang rendah, kurang informasi, pergaulan bebas. Adapun dampak dari nikah di bawah tangan diantaranya tidak bisa mendapat buku nikah, tidak bisa membuat kartu keluarga, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, tidak mendapat perlindungan negara, tidak mendapat hak waris baik ibu maupun anak, sulit berurusan di masyarakat seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam bahkan untuk melakukan ibadah haji/umroh juga tidak bisa, tidak bisa menuntut harta gono-gini, tidak bisa membuat kartu BPJS. Adapun solusi untuk mengatasi nikah di bawah tangan tersebut dengan mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** Nikah, Nikah Dibawah Tangan, dan Kantor Urusan Agama.

# **SOCIETY'S VIEW ON SIRI'S MARRIAGE IN PALANGKA RAYA TOWN**

## **ABSTRACT**

The study observed society's view to the factor and impact of the occurrence of siri's marriage in Palangkaraya Raya town. The purpose of this study was to: (1) know and describe society's view on the factor of the occurrence of siri's marriage in Palangkaraya Raya town and (2) know and describe society's view on the impact of the occurrence of siri's marriage in Palangka Raya town. This study applied descriptive with field research by using juridical empirical approach. The type of this study applied law sociology that examined the "*law as it is in society*". The results of the study showed that the factors of the occurrence of siri's marriage, according to society's view, were: not having divorce certificate but wishing to get married again, pregnant before marriage, wishing to quickly get married and not wishing to deal with KUA, the existence of brokers, the husband wishing to quietly polygamy, uncomplete administrative requirements, the bride and groom are not yet married enough, lacking of knowledge, away access to KUA, lacking of education, lacking of information, promiscuity. Meanwhile, the impact of the occurrence of siri's marriage were: not having marriage book, unable to make family card and child's birth certificate, not obtaining state protection and inheritance rights (mother and children), having difficulties of dealing with societies (such as, renting, borrowing and even performing hajj/umroh), unable to claim property and make BPJS cards. The solution to overcome siri's marriage is by filing an isbath marriage request to the Religious Court.

**Key words:** Marriage, Unregistered Marriage, and Office of Religious Affairs

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. *Āmīn*.

Skripsi ini berjudul: “PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sayyid Hamid dan Ibunda Syarifah Munawarah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi serta mendidik dari kecil hingga besar sampai bisa mencapai gelar sarjana, serta adik-adik tersayang Sayyid Noval Amin, Syarifah Madina Zakia dan Sayyid Haddad Mubarak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *Āmīn*.
2. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala

sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

3. Yth. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pegiat ilmu kesyariahan.
4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A. dan Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I. selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
5. Para Kepala/pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Para Penghulu Kampung Palangka Raya dan Beberapa masyarakat di Kota Palangka Raya yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Yth. Bapak Ali Murtadho, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak atas semua bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan.



7. Seluruh Staf dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *Āmīn.*
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2015 dan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 03 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**SYARIFAH NUR NAYLA**

NIM. 1742110571

## MOTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. (Q.S. al- Ankabut [24]: 6)





## **PERSEMBAHAN**

**Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :**

Kedua orang tuaku yang tercinta...

**Ayahanda Sayyid Hamid dan Ibunda Syarifah Munawarah**

Terimakasih telah memberikan pengorbanan, doa , semangat, yang tiada henti

Adik-adikku yang tersayang...

**Sayyid Noval Amin, Syarifah Madina Zakia dan Sayyid Haddad Mubarak**

Yang selalu menghibur, terus memberikan semangat, dan semoga selalu diberi kelancaran

dalam menuntut ilmu

**Untuk keluarga besarku**

**Untuk orang yang ku sayang serta yang menyayangiku**

**Kepada Dosen-Dosenku...**

Yang telah memberikan waktu dan ilmunya dalam perjalananku mencari ilmu

Terkhusus pada kepada Bapak Drs. Surya Sukti, MA. dan Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I.

yang senantiasa memberi bimbingan dan motivasi

**Kepada Sahabat-sahabatku HKI angkatan tahun 2015 dan 2016**

Yang telah hadir mewarnai kehidupanku, juga selalu memotivasi , semoga kita selalu

diberikan kemudahan dalam mengapai kesuksesan.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	x
MOTO .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEP PENELITIAN</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Landasan Teori .....	22
1. Teori Keberlakuan Hukum .....	22
2. Teori ‘ <i>Urf</i> ’ .....	24
3. Teori <i>Maqasid Syari’ah</i> .....	28
C. Konsep Penelitian .....	34
1. Pengertian Pandangan (Persepsi) .....	34
2. Pengertian Masyarakat .....	35
3. Pengertian Nikah di Bawah Tangan .....	37
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	47
1. Kerangka Pikir .....	47
2. Pertanyaan Penelitian .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	52

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	53
1. Waktu Penelitian .....	53
2. Tempat Penelitian.....	54
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian .....	54
2. Pendekatan Penelitian.....	56
3. Objek, Subjek dan Informan Penelitian.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
2. Wawancara .....	59
3. Dokumentasi.....	61
D. Pengabsahan Data .....	62
E. Teknik Analisis Data.....	63
F. Sistematika Penelitian.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
1. Sejarah Palangka Raya .....	66
2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya.....	71
3. Letak Geografis .....	71
4. Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya .....	74
B. Hasil Analisis .....	148
1. Pandangan Masyarakat mengenai Faktor Penyebab Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya .....	149
2. Pandangan Masyarakat tentang Dampak dari Nikah di Bawah Tangan ....	173
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>180</b>
A. Kesimpulan .....	180
B. Saran.....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>183</b>
A. Buku .....	183
B. Skripsi dan Jurnal.....	188
C. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.....	190
D. Internet .....	190
E. Wawancara.....	190



LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).



Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

**G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Kata Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 2 Alokasi Waktu Penelitian.....	75
Tabel 3 Jumlah Penduduk .....	95



## DAFTAR SINGKATAN



Bimas	: Bimbingan Masyarakat
BP4	: Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Catin	: Calon Pengantin
Cet.	: Cetakan
dkk	: dan kawan-kawan
DUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
h.	: Halaman
HKI	: Hukum Keluarga Islam
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KCS	: Kantor Catatan Sipil
Kec.	: Kecamatan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
KMA	: Keputusan Menteri Agama
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No.	: Nomor
NTCR	: Nikah Talak Cerai Rujuk



P3N	: Petugas Pembantu Pencatat Nikah
PA	: Pengadilan Agama
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
QS.	: Quran Surat
RT	: Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
UU	: Undang-Undang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam ikatan yang sah menurut hukum.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif.<sup>3</sup> tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>4</sup> Masalah pencatatan dalam masyarakat maju pada suatu negara hukum yang bersumberkan tertib

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm..

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>3</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986, hlm. 20.

<sup>4</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 2.

hukum negara adalah merupakan suatu hal yang *condition sine qua non*,<sup>5</sup> demikian juga melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1-2) menggariskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1-2) menggariskan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>8</sup> Sebelum berlakunya UUP, Pencatatan Perkawinan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak.<sup>9</sup> PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ialah Pegaawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>Setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat.

<sup>6</sup>Asro Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 3 Jakarta: Bulan Bintang, 1981, hlm. 25.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>9</sup>Asro Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 55.

<sup>10</sup>Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003, lihat, DEPAG RI, *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)* Jakarta: DEPAGRI, 2003, hlm. 1.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.

Pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atau sering disebut dengan *no legal force*.<sup>11</sup>

Nikah di bawah tangan atau nikah sirri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah liar. Dalam fikih Imam Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Dikutip dari tulisan Prof. DR. H. Muchsin, Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Peradilan Seluruh Indonesia pada 4 s.d. 7 Agustus Agustus 2008 di Jakarta.

<sup>12</sup>M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 25.



Didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

1. Setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut.

1. Agar terjamin, ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana yang diatur dalam undang- undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>13</sup>

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam klausul<sup>14</sup> yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut *ghayat al- tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Sejalan dengan ketentuan fikih islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakomodir ketentuan dalam perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” (ayat 1). Kemudian pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Terlepas dari perbedaan dalam memahami keterkaitan antara dua ayat diatas, pencatatan perkawinan dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Rofiq dan dikutip oleh Imam Syaukani bahwa boleh jadi luputnya pencatatan perkawinan dari perhatian kitab-kitab itu ditulis tingkat amanah kaum

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dbatasi.

<sup>15</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 122-124.

<sup>16</sup>Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press Anggota IKAPI, 2013, hlm. 58.

muslimin relatif terjamin sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lembaga perkawinan menjadi kebutuhan sesaat dan merugikan pihak yang lain relatif kecil.<sup>17</sup> Pendekatan kedua adalah pendekatan *legal maxim* yaitu kaidah yang berbunyi:

مَا لَا يَنْتَهِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkawinan tidaklah sempurna tanpa pencatatan perkawinan maka dengan demikian pencatat perkawinan menjadi wajib hukumnya”.<sup>18</sup>

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan *maṣlaḥah*. Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum bukan *maṣlaḥah* yang bersifat individu dan kasuistik. Jika tindakan manusia diarahkan untuk mencapai *kemaṣlaḥatan*, maka sebaliknya dilarang untuk mendatangkan *kemafṣadatan*. Disinilah pencatatan perkawinan difungsikan untuk menolak *kemafṣadatan* yang timbul dalam perkawinan yang tidak dicatatkan/ nikah di bawah tangan.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Manan, terdapat beberapa *mafsadat* dalam perkawinan yang tidak dicatat, antara lain, suami isteri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Ketiadaan akta nikah ini berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya, ia tidak bisa memiliki akta kelahiran serta tidak dapat mewarisi harta kedua orang tuanya disebabkan

---

<sup>17</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 254-255.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

tidak adanya bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari kedua orang tuanya.<sup>20</sup>

Nikah di bawah tangan dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.<sup>21</sup>

Adapun yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan menurut hemat peneliti terdapat 2 faktor, yakni :

- 1) Sengaja, yang kemudian sebab ini pun terbagi 2, yaitu: tahu, seperti yang biasa dilakukan oleh pasangan yang berpoligami secara diam-diam dan tidak ingin mengurus administrasi. Sedangkan pasangan yang sengaja menikah di bawah tangan, namun tidak mengetahui konsekuensi dari pernikahan tersebut seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang dengan keterbatasan wawasan terkait nikah di bawah tangan tersebut.
- 2) Terpaksa (terdorong keadaan), sebagaimana kasus yang sering ditemukan pada pasangan yang menikah karna kecelakaan, jarak tempuh menuju KUA yang terlalu jauh.

---

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 51.

<sup>21</sup>Widiastuti, *Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan*, Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1), 2008.



Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur dengan lahirnya Undang- Undang tentang Perkawinan, namun secara *defacto* pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, baik dikalangan masyarakat biasa maupun para pejabat ataupun artis. Tidak terkecuali pada masyarakat di Kota Palangka Raya, keadaan masyarakatnya masih banyak yang melangsungkan perkawinan bawah tangan Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan dengan wawancara kepada salah satu dari Pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya bahwa terdapat beberapa kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Kota Palangka Raya.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat berdampak negatif bagi diri mereka sendiri dan juga bagi anak yang dilahirkan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam yang dituangkan pada penelitian skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA”**.

---

<sup>22</sup>Hasil Observasi awal di KUA Jekan Raya pada hari Jum'at, 17 Januari 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat mengenai Dampak Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya?

## **C. Batasan Masalah**

Adapun dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan mengenai Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya hanya di kota Palangka Raya saja dan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini untuk bisa menjadi subjek dan informan pada penelitian. Sedangkan diluar dari pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkan dalam penulisan skripsi ini.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan Menjelaskan Pandangan Masyarakat terhadap Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya.

2. Mengetahui dan Menjelaskan Pandangan Masyarakat mengenai Dampak terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menambah wawasan, khususnya dalam berkeluarga, bagaimana pandangan masyarakat mengenai nikah dibawah tangan
  - b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah)
  - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
  - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan masalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah dibawah tangan.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap ilmu akan hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
- d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang berkaitan dengan aturan dalam berkeluarga.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEP PENELITIAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait masalah pandangan masyarakat mengenai nikah di bawah tangan di Kota Palangka Raya ini, terdapat dalam beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi dan jurnal yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Achmad Nurseha tahun 2015, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)**. Penelitian ini terfokus pada Bagaimana hukum nikah di bawah tangan menurut tinjauan hukum Islam, praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dan yang menyebabkan terjadinya nikah di

bawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Mengenai metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 29 pasangan nikah bawah tangan terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah, memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa, memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, tercermin dari keinginan mereka untuk merahasiakan pernikahannya. Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Kecamatan Ngawen yang melakukan praktik nikah dibawah tangan, konsep nikah bawah tangan umumnya dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Menurut persepsi mereka, nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dan terpenuhi.<sup>23</sup>

2. Nurhidayah tahun 2016, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dengan judul **Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)**. Fokus penelitian ini mengkaji apa yang akan menjadi sebab akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah

---

<sup>23</sup> Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

tangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Adapun metode yang digunakan peneliti yakni metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan dasar yang melatar belakangi masyarakat melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka masyarakat seenaknya saja melakukan perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra terhadap istri dan anak yaitu :a. Tidak diakui sebagai istri yang sah; b. Tidak berhak atas nafkah; c. Terabaikan hak dan kewajibannya; d. Rentan terjadi KDRT; e. Istri sulit bersosialisasi; f. Sulit mendapatkan akte kelahiran anak; Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah : a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan sambutan di acara keagamaan; b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; c. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.<sup>24</sup>

3. Muh Heri 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)**. Penelitian ini terfokus akan hal yang sebab terjadinya nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa

---

<sup>24</sup>Nurhidayah, *Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974(Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*, Makassar: Universitas Negeri, 2016.

Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Megelang, dan tinjauan hukum Islam terhadap prktik nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Megelang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut, seperti hamil di luar nikah, sehingga untuk menikah di bawah tangan atau nikah *sirri* sangat berkemungkinan besar. Hal itu dikarenakan posisi yang sudah mendesak terlebih tidak ingin aib itu tersebar luaskan sehingga menikah dengan cara di bawah tangan/nikah *sirri* sebagai jalan alternatif. Pernikahan di bawah tangan tentunya akan menjadikan suatu problem tersendiri di antara keduanya, yang mengakibatkan bagaimana status pernikahannya dan bagaimana nantinya status anak tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 fenomena tersebut masih juga kerap terjadi dan berlangsung hingga saat ini.<sup>25</sup>

4. Ansar tahun 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)**. Penelitian ini terfokus pada Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan hukum Nasional, pertanggung jawaban ketika anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional, serta persamaan dan perbedaan perkawinan di

---

<sup>25</sup>Muh Heri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2016).

bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Sedangkan penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, literatur-literatur yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Menurut Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, anak yang lahir dari hubungan *syibhah* saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>26</sup>

5. Munawir tahun 2017, Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Sanksi Nikah Sirri**. Penelitian ini terfokus pada yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri menurut praktisi dan akademisi hukum

---

<sup>26</sup>Ansar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.



Islam, dan sanksi nikah sirri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Latar belakang terjadinya nikah sirri yaitu adanya masyarakat yang tidak memiliki akta cerai/talak bawah tangan dan ingin menikah lagi, pasangan tidak direstui orang tua/wali, hamil di luar nikah, masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA, adanya calo nikah sirri, suami tidak diizinkan istri berpoligami, persyaratan administrasi tidak lengkap dan calon pengantin belum cukup usia menikah, kurangnya pengetahuan tentang fungsi administrasi pernikahan, suami/istri takut hartanya terbagi jika menikah secara resmi dan karena perselingkuhan. Pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah sirri yaitu para praktisi hukum Islam sepakat pelaku nikah sirri diberikan sanksi karena mengacaukan administrasi negara dan berdampak negatif bagi istri dan anak. Sedangkan para akademisi hukum Islam ada yang setuju dan ada yang tidak setuju jika nikah sirri diberikan sanksi, mereka yang setuju berlandaskan karena nikah sirri menimbulkan akibat hukum yang tidak baik, terjadinya kriminalitas, hilangnya tanggung jawab, bahkan lari dari tanggung jawab sehingga merugikan istri dan anaknya di kemudian hari. Pihak yang tidak setuju nikah sirri diberikan sanksi berlandaskan bahwa nikah sirri itu tidak termasuk dalam tindak pidana.<sup>27</sup>

6. Ayu Maulina Rizqi tahun 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul **Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)**. Penelitian ini terfokus pada dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan serta tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak

---

<sup>27</sup>Munawir, *Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Sanksi Nikah Sirri*, Palangka Raya: Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017.

akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Perceraian dari nikah di bawah tangan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negative terhadap kewajiban pengasuhan anak. Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. kewajiban pengasuhan anak tidak dilaksanakan oleh orang tua dengan baik, khususnya dari pihak suami. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum. Baik pendidikan, nafkah, kesehatan dan hak anak lainnya harus dipenuhi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat secara *syar'i*, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hadis riwayat Walid bin Numair dan Hadis riwayat dari Ibnu Umar yang menyerukan agar orang tua yang sah melindungi anak, memberi pendidikan, dan memenuhi hak anak lainnya.<sup>28</sup>

7. Annisa Hoerunnisa tahun 2018, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **Tinjauan Konsep Masalah Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974**. Penelitian ini terfokus pada latar belakang dan pelaksanaan perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka, hukum menikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974 serta tinjauan

---

<sup>28</sup>Ayu Maulina Rizqi, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)*, Banda Aceh-Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

konsep *maslahah* terhadap nikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian komparatif secara kualitatif yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi/penelitian lalu dibandingkan tinjauan konsep *mashlahah* serta hukumnya dari pendapat fiqh Madzhab Syafi'i dengan UU No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Menurut Imam Syafi'i bahwasannya perkawinan dinyatakan telah sah dengan adanya kedua mempelai, ijab qabul, wali dan dua orang saksi laki-laki serta mahar. Di satu sisi nikah di bawah tangan memang dibolehkan dalam Islam, yaitu nikah sirri yang mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara Islam meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka segala sesuatunya diatur dengan hukum sebagaimana sistem hukum di negara ini yaitu Eropa Continental yang mana menggunakan hukum tertulis, urusan kekeluargaan seperti ini pun ada aturannya yang apabila peraturan itu tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Annisa Hoerunnisa, *Tinjauan Konsep Mashlahah Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeng Kab. Majalengka Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Nurseha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora), 2015, kajian lapangan.	Nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Achmad Nurseha adalah pada tinjauan hukum islam, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan.
2.	Nurhidayah, Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974(Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone), 2016, kajian lapangan.	Nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Nurhidayah adalah pada Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan.
3.	Muh Heri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, 2016, kajian lapangan.	Nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Muh Heri adalah pada tinjauan hukum islam dari akibat hamil diluar nikah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan.
4.	Ansar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif	Nikah di bawah tangan	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, Ansar adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di

	Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional), 2017, kajian pustaka.		Bawah Tangan, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan..
5.	Munawir, Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Sanksi Nikah Sirri. 2017, kajian lapangan.	Nikah sirri/ Nikah di bawah tangan	bedaannya fokus penelitian Miftahul Rahmah adalah pada pandangan studi praktisi dan akademisi hukum islam terhadap sanksi nya. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan.
6.	Ayu Maulina Rizqi, Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun), 2018, kajian lapangan.	Nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Ayu Maulina Rizqi adalah pengaruh pengasuhan anak dari nikah di bawah tangan, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan.
7.	Annisa Hoerunnisa, Tinjauan Konsep <i>Mashlahah</i> Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974, 2018, kajian pustaka.	Nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Annisa Hoerunnisa adalah pada tinjauan <i>maslahahnya</i> , , sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan.



## B. Landasan Teori

### 1. Teori Keberlakuan Hukum

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga dimuka bumi ini. Bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (ekstensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik.<sup>30</sup> Dimana ada masyarakat disana ada hukum "*ubi societas ibi ius*".<sup>31</sup> Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, perahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.<sup>32</sup>

Aristoteles mengemukakan bahwa ada dua macam hukum, yakni:

- a. Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa, negara; dan
- b. Hukum yang tidak terikat pada pandangan manusia tentang baik dan buruk. Ini disebut hukum asli.

Menurut Aristoteles, hukum alam itu adalah hukum yang oleh orang-orang yang berfikiran sehat dirasakan selaras dengan kodrat

---

<sup>30</sup>Zaenal Asyhadie dan Arieef Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 21.

<sup>31</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 27.

<sup>32</sup>Zaenal Asyhadie dan Arieef Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 22.

alam. Manusia dikaruniakan Tuhan dengan kemampuan berfikir dan kecakapan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, serta mengenal bermacam-macam peraturan perundangan yang berasal dari undang-undang abadi yang dinamakannya juga dengan hukum alam atau *lex naturalis*.

Hukum alam tersebut hanyalah memuat asas-asas umum seperti:

- a. Berbuat baik dan jauhilah kejahatan.
- b. Bertindaklah menurut pikiran yang sehat.
- c. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri.<sup>33</sup>

Arti hukum yang sebenarnya dan fungsi hukum dalam masyarakat, dapat dikembalikan pada dasar tujuan hukum. Tujuan pokok dasar dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal adalah ketertiban. Ketertiban adalah tujuan pokok dari segala hukum kebutuhan terhadap ketertiban syarat yang fundamental bagi adanya satu masyarakat manusia yang teratur. Terlepas dari segala hal lain yang menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau diluar masyarakat, sehingga manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 22-23.

<sup>34</sup>Utang Rasyidin dan Deddy Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014, hlm. 122.

Agar dapat memahami arti hukum, setiap perkara yang berkaitan dengan hukum harus diteliti, seperti unsur, ciri-ciri, sifat, fungsi, dan yang paling penting adalah tujuan dari wujudnya hukum tersebut. Dengan mengetahui perkara-perkara ini, hukum dapat diartikan dengan makna yang sebenarnya sehingga tidak akan menyisakan keraguan akan keberadaannya.<sup>35</sup>

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakkan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.<sup>36</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>37</sup>

## 2. Teori '*Urf*

### a. Definisi '*Urf*

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi

---

<sup>35</sup>Ibid., hlm. 125.

<sup>36</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006, hlm. 228.

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 231.

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>38</sup>

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi bagi masyarakat, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>39</sup>

*'Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sementara itu menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. *'Urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia. *'Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elit mereka. Ini berbeda dengan *ijma'* karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.<sup>40</sup>

## **b. Pembagian *'Urf***

- 1) *'Urf* yang *ṣaḥih*, dan

<sup>38</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung; CV Pustaka Setia, 1998, hlm. 128.

<sup>39</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm153.

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 123.

## 2) '*Urf* yang *fasid*'<sup>41</sup>

'*Urf* yang *ṣaḥih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya.

Adapun '*urf* yang *fasid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>42</sup>

### c. Hukum '*Urf*

#### 1) '*Urf Ṣaḥih*

Adapun '*urf ṣaḥih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah bisa mereka jalani, telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai

<sup>41</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paaragonatama Jaya, 2011, hlm. 210.

<sup>42</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 123



pula dengan *kemaşlahatan* mereka. Oleh karena itulah, Ulama berkata:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat merupakan syariat yang dilakukan sebagai hukum”.<sup>43</sup>

## 2) ‘Urf Fasid

Adapun ‘*urf fasid*’ (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar’i*, atau membatalkan hukum *syar’i*. Jika dalam suatu keadaan termasuk kondisi darurat atau kebutuhan, maka ‘*urf*’ ini bisa diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.<sup>44</sup>

Para ulama sepakat menolak ‘*urf fasid*’ (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya “*al-Ijtihâd fî mâ lâ Nashsha fih*”, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘*urf*’ sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum,

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*urf*' dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.<sup>45</sup>

#### d. Syarat-syarat '*urf* untuk dapat dijadikan landasan hukum

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) '*Urf*' harus termasuk '*urf*' yang *ṣaḥīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- 2) '*Urf*' harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut.<sup>46</sup>

### 3. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Ditinjau dari segi bahasa kata *maqāṣid* merupakan *jama'* dari *maqāṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan dan dimaksud.<sup>47</sup> Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata "*qashada-yaqshidu-qashdan-qashidun*" yang berarti keinginan kuat, berpegang teguh, dan

<sup>45</sup>Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul fiqh...*, hlm. 155.

<sup>46</sup>Ibid., hlm. 156-157.

<sup>47</sup>Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, hlm. 11.

sengaja.<sup>48</sup> Dalam kamus Arab-Indonesia kata *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣada ilaihi*). Sedangkan kata syari'ah adalah *maṣdar* dari syar'i yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya.<sup>49</sup>

Disamping itu kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuṭ al-ifrāt wa al-tafrīt* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata“, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasaṭ*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas.<sup>50</sup> sesuai dengan QS. Luqman [31]:19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan-jalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. QS. Luqman [31]:19.<sup>51</sup>

Kedudukan *maqāṣid Syari'ah* sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena ilmu *maqāṣid syari'ah* sangat bermanfaat untuk menjadi alat analisis

<sup>48</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuruyah, 1990, hlm. 243.

<sup>49</sup>Busyro, *Maqashid al- Syariah*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2019, hlm. 5.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir...*, hlm. 412.

mengistimbatkan hukum dengan melihat fenomena sosial yang terus dinamis. Dengan ini menunjukkan tiga prinsip sebagai komponen-komponen konsep *maṣlaḥah*, yaitu kebebasan, keamanan dan persamaan.<sup>52</sup>

*Maqaṣid* juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Namun kadang-kadang hikmah atau maksud-maksud syariat tersembunyi kecuali bagi orang yang mau menelitinya.<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyur pun mengkritik *kejumudan* (stagnasi) pengembangan konsep *maqaṣid* syariah seputar *al-uṣul al-khamsah*. Lalu mereka menawarkan nilai-nilai universal yang menjadi fokus (tujuan) penegakan ajaran Islam, antara lain; kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya.<sup>54</sup>

Secara substansial *maqashid syariah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah *maqashid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi

---

<sup>52</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014, hlm. 4.

<sup>53</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 19-20.

<sup>54</sup> Abdul Majid Najjar, *Maqashid syariah bi ab'adin jadidah*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami : 2008, hlm. 17.

hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *maqāṣid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.<sup>55</sup>

***Maqāṣid Syariah* ditinjau dari Cakupannya:**

1) *Maqāṣid ‘Ammah*

Yaitu, tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh *syari’at* di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), Penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan ( QS. Al-Baqarah: 185)

2) *Maqāṣid Khāṣah*

Yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis.

3) *Maqāṣid Jauziyah*

Yaitu tujuan *syariat* di masing-masing hukum *syar’i*.<sup>56</sup>

**a. *Maqāṣid Syariah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya:**

*Maqāṣid syari’ah* pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqāṣid Daruriyah* (Primer), *Maqāṣid ḥajiyah* (Sekunder) dan *Maqāṣid Taḥsiniyâh* (Tersier).<sup>57</sup>

1) *Maqāṣid Daruriyah* (Primer)

*Maqāṣid daruriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Uṣuliyyin* mengistilahkan *maqāṣid daruriyah* dengan sebutan “*Kulliyatu alkhamas*” atau lima asas, yaitu :

- a) *Hifẓ ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian.

---

<sup>55</sup>Muhammad Roy Purwanto, *Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence*, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*



- b) *Hifẓ an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan ketenangan jiwa, akal dan ruhani.
- c) *Hifẓ al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.
- d) *Hifẓ an Nasl, an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya.
- e) *Hifẓ al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai dan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain.<sup>58</sup>

## 2) *Maqāṣid Ḥajiyah* (sekunder)

ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya..<sup>59</sup>

## 3) *Maqāṣid Taḥsiniyâh* (tersier)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. *Maqāṣid taḥsiniyâh*, sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi dalam Ali Shodiqin “termasuk dalam katagori *Makârim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti)”.<sup>60</sup>

## b. *Maqāṣid syari'ah* ditinjau dari aspek sandaran dalil Syar'i

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012, hlm. 170.

*Maqaşid syari'ah* ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi: *maqaşid Mulghah* (tidak dianggap), *maqaşid Mu'tabarah* (dianggap) dan *maqaşid Mursalah* (nisbi).<sup>61</sup>

- 1) *Maqaşid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at) , *kemaşlahatan* ini lahir dari kacamata individual manusia bukan menurut pandangan Syari'at. Jika dilihat sekilas dan secara lahiriyah maka akan tampak sebagai sebuah, namun pada hakikatnya tidak demikian bahkan ia dapat dikategorikan , *kemaşlahatan* sebagai *kemaşadatan*.
- 2) *Maqaşid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at) Adalah *kemaşlahatan* yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam *nash* (teks) syar'i atau *ijma'* *Maşlahah mu'tabarah* merupakan *kemaşlahatan* yang sah dan *qat'i* serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya.
- 3) *Maqaşid Mursalah* (eksistensinya nisbi) Yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan pada *kemaşlahatan*, yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidaknya dalam *naş* (teks) syar'i maupun *ijma'* (konsesus) para ulama.<sup>62</sup>

**d. *Maqaşid Syari'ah* ditinjau dari level keaslian**

*Maqaşid syari'ah* pada bagian ini terbagi menjadi : *Maqaşid Asliah* (asal) dan *Maqaşid* (pelengkap).<sup>63</sup>

- 1) *Maqaşid* (asal) Imam Abu Ishak as Syatibi dalam "*al Muwâfaqat*" memperkenalkan bahwa *maqaşid asliah* ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi *mukallaf*. Sebagian Ulama menyebut *maqaşid asliah* dengan sebutan *maqaşid asasih* (pokok). Contoh dari *maqaşid* ini adalah; pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan *istimta'* (melampiaskan hasrat biologis),

<sup>61</sup>Nuruddin Al-Khadimi, *al Ijtihad al Maqâsidi*, Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II, 1998, hlm. 53.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Nuruddin Al-Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy...*, hlm. 56.

membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (bahagia dan sejahtera) merupakan beberapa tujuan yang mengikuti tujuan utama di atas (mendapatkan keturunan).

- 2) *Maqasid Tabi'ah* (pengikut) adalah tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas atau utama. *Maqasid tabi'ah* bisa juga masuk dalam kategori *maqasid hajiyah* dan *kamaliyah*.<sup>64</sup>

## C. Konsep Penelitian

### 1. Pengertian Pandangan (Persepsi)

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.<sup>65</sup> persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi terintegrasi di dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami.<sup>66</sup> Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.<sup>67</sup> Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, Jakarta: Interaksara, 2004, hlm. 251.

<sup>66</sup>Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 591.

<sup>67</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 39.

alat reseptornya. Secara keseluruhan, kemampuan persepsi kita ditanamkan dan tergantung pada pengalaman.

a. Faktor yang mempengaruhi persepsi

- 1) Sasaran persepsi yang mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sasaran ini berpengaruh antara persepsi.
- 2) Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang artinya bahwa dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu mendapatkan perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam menumbuhkan persepsi.<sup>68</sup>

Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing-masing individu. Dengan demikian persepsi/tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak selalu sama, walaupun dilakukan pada saat yang bersamaan. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.<sup>69</sup>

Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran seseorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman.

## 2. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab “*syaraka*” yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam

<sup>68</sup>Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995. Hlm. 101-105.

<sup>69</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta. Andi, 2002, edisi ke 2, hlm. 45.

bahasa inggris dipakai istilah “*society*” yang berasal dari kata “*socius*” yang artinya kawan.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Hasan Sadhily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya.

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:<sup>72</sup>

- a. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- b. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
- c. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Hassan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 47.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1, Alih Bahasa oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan, Penyunting Tanty Tarigan, Edisi Kedelapan Jakarta :PT. Prehallindo, 2001, hlm. 89.



### 3. Pengertian Nikah di Bawah Tangan

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat. Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad*).<sup>74</sup>

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka “*nakaha al-mar'ah*”, Dia menjawab : “orang-orang Arab menggunakan kata “*nakaha*” dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpang-siuran. Kalau mereka mengatakan “*nakaha*” fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan “*nakaha imrâta*”, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.”<sup>75</sup>

Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Al-Asfihani, *Asas Perkawinan*, Jakarta: Gunung Mulia, 1999, hlm. 220.

<sup>75</sup> Al-Sabuni, *Pandangan Al-qur'an terhadap pernikahan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hlm. 29.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misâqan ghalîzan*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalîzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>77</sup> Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah dan rahmah*”.<sup>78</sup> Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

79

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>80</sup>

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia (*sirri*). Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*alaniyyah*”, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata “*nikah*” sehingga menjadi “*nikah sirri*” untuk menyebutkan bahwa *nikah* yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga

---

<sup>77</sup>Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2. 73.

<sup>78</sup>*Ibid.*, Pasal 3.

<sup>79</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 10.

<sup>80</sup>*Ibid.*

negara. <sup>81</sup>Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid syari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya : <sup>82</sup>

- 1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- 2) Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
- 3) Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- 4) Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu

---

<sup>81</sup>Tim Penyusun, *Asas Pernikahan Vol.3, No.1*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011, hlm. 100.

<sup>82</sup>Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermedia, 1991, hlm. 187.

berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.<sup>83</sup>

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin sirri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-'ursy*/ perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>84</sup>

#### **b. Tujuan Pernikahan**

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>83</sup> *Ibid.*  
<sup>84</sup> *Ibid.*

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum:21).<sup>85</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakînah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).<sup>86</sup>

### c. Hikmah Pernikahan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya dalam surah ar-Rum. Berkaitan dengan hal itu, diriwayatkan dari hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ

<sup>85</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009, hlm. 406.

<sup>86</sup>Abu abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-jami'ul li ahkam al-Qur'an Juz XIV*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1997, hlm. 171-172.

<sup>87</sup>M. Atho. Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Toeri dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 12.



مَنْبِئُهُ لَهَا فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ ثُمَّ  
 خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ ثَقِيلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا  
 أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ  
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَىٰ امْرَأَتَهُ  
 زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنْبِئُهُ وَمَا يَذْكُرُ تُدِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali<sup>88</sup> telah menceritakan kepada kami Abdul A'la<sup>89</sup> telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu Abdullah<sup>90</sup> dari Abu Zubair<sup>91</sup> dari Jabir<sup>92</sup> bahwasanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi isterinya, yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit, guna melepaskan rasa rindunya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan syetan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah isterimu, karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatimu". Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Abdush Shamad bin Abdul Warits] telah menceritakan kepada kami [Harb bin Abu 'Aliyah] telah menceritakan kepada kami [Abu Zubair] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita. Maka ia pun menyebutkan hadits yang semisalnya. Hanya saja ia menyebutkan; “Lalu beliau segera mendatangi isterinya, yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit.” Dan ia tidak menyebutkan; “Pergi seperti syetan.”<sup>93</sup>

- 2) Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Abu Dawud meriwayatkan, bahwasanya Ma'qil bin Yasar berkata, Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur, sebab aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada seluruh umat.”

<sup>88</sup>Amru bin 'Ali bin bahar bin Kunaiz, Al Falas Ash Shairifiy, Abu Hafsh, Tabi'ul Atba' kalangan tua, wafat tahun 249 H, hidup di Bashrah, wafat di Askar.

<sup>89</sup>Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa, As Saamiy Al Qurasyiy, Abu Muhammad, Abu Hammam, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 189 H, hidup di Bashrah

<sup>90</sup>Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar, Ad Dastuwa'i Ar Rib'i, Abu Bakar, Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 154 H, hidup di Bashrah.

<sup>91</sup>Muhammad bin Muslim bin Tadrus, Al Asadiy, Abu Az Zubair, Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 126 H, hidup di Marur Rawdz.

<sup>92</sup>Jabir bin Abdullah bin Hamran al-Anshari, berasal dari suku khazraj, wafat tahun 78 H (697/698 M), hidup di Madinah daerah Hijaz dan Wafat di Iraq.

<sup>93</sup>Imam Al- Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Semarang: Ummul Qura, 2016, hlm. 456.

- 1) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- 2) Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- 3) Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.<sup>94</sup>
- 4) Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.<sup>95</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Adapun Rukun Nikah menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Ada mempelai laki-laki
- 2) Ada mempelai perempuan
- 3) Ada saksi nikah 2 orang laki-laki
- 4) Ada Wali
- 5) Ijab dan qabul.

Syarat Nikah menurut syariat Islam untuk calon pengantin adalah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin beragama Islam
- 2) Mengetahui wali akad nikah
- 3) Tidak sedang melaksanakan haji/ umroh
- 4) Tidak karena paksaan.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*

- 5) Jelas orangnya
- 6) Bukan laki-laki/ perempuan yang haram dinikahi
- 7) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>97</sup>

Syarat wali nikah dalam Islam yakni sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak di paksa
- 5) Laki-Laki
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang ihram haji/ umroh
- 8) Tidak rusak pikirannya<sup>98</sup>

Adapun syarat saksi nikah dalam Islam yakni sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Mendengar
- 7) Tidak tuli
- 8) Tidak bisu
- 9) Tidak pelupa
- 10) Menjaga Harga diri

---

<sup>96</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Fikih Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 59.

<sup>97</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71-72.

<sup>98</sup>*Ibid.*

11) Mengerti Ijab qabul

12) Tidak merangkap menjadi wali nikah.<sup>99</sup>

#### e. Sahnya Perkawinan

Terkait sah tidaknya suatu pernikahan, pernikahan tersebut bisa tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dijelaskan oleh al-Zuhaili yang dimaksud pernikahan batal ialah pernikahan yang tidak memenuhi rukun, sedangkan pernikahan rusak ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Namun, baik yang batal maupun yang rusak, oleh para ulama syafi'iyah hukumnya tidak dibedakan. Apabila tidak terpenuhi dari rukun dan syaratnya maka status pernikahannya tidak sah. Contohnya: kesalahan wali atau bukan yang berwewenang dalam meikahkan, kesalahan saksi (saksinya perempuan), maharnya uang palsu. Kemudian dalam hal lain pula yang bisa menjadikan pernikahan itu tidak sah secara agama contohnya seperti: menikah ketika sedang melakukan ihram, ketika masih dalam masa iddah, menikah dengan beda agama.<sup>100</sup>

Adapun sah tidaknya suatu perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif), bahwa hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi Negara,<sup>101</sup> seperti dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup> Wahbah Zuhayli, *Al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fiqr, 1997, hlm 6516.

<sup>101</sup> Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm .121.

dan pembangunan sektor lain<sup>102</sup>. Maka syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :<sup>103</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>104</sup>

Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor urusan agama, ataupun ditempat yang telah disepakati, dengan ucapan *ijab* dan *qabûl* dalam bentuk akad nikah. *Ijab* adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan *Qabul* adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali

---

<sup>102</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

<sup>103</sup>Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri*.

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm. 122.



si wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ahmad menyatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا  
بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

*Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."<sup>105</sup>*

#### **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

##### **1. Kerangka Pikir**

Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara agama, namun proses berlangsungnya tanpa dicatat oleh badan pencatatan yang berwenang yang ditugaskan oleh negara, Jika dalam pernikahan tidak dilakukan di hadapan pejabat berwenang, maka status pernikahannya tidaklah sah dengan artian tidak diakui negara bahwa pasangan tersebut telah menikah, bahkan anak dari pasangan tersebut ikut mendapat akibat hukum dari pernikahan kedua orang tuanya. Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975.

---

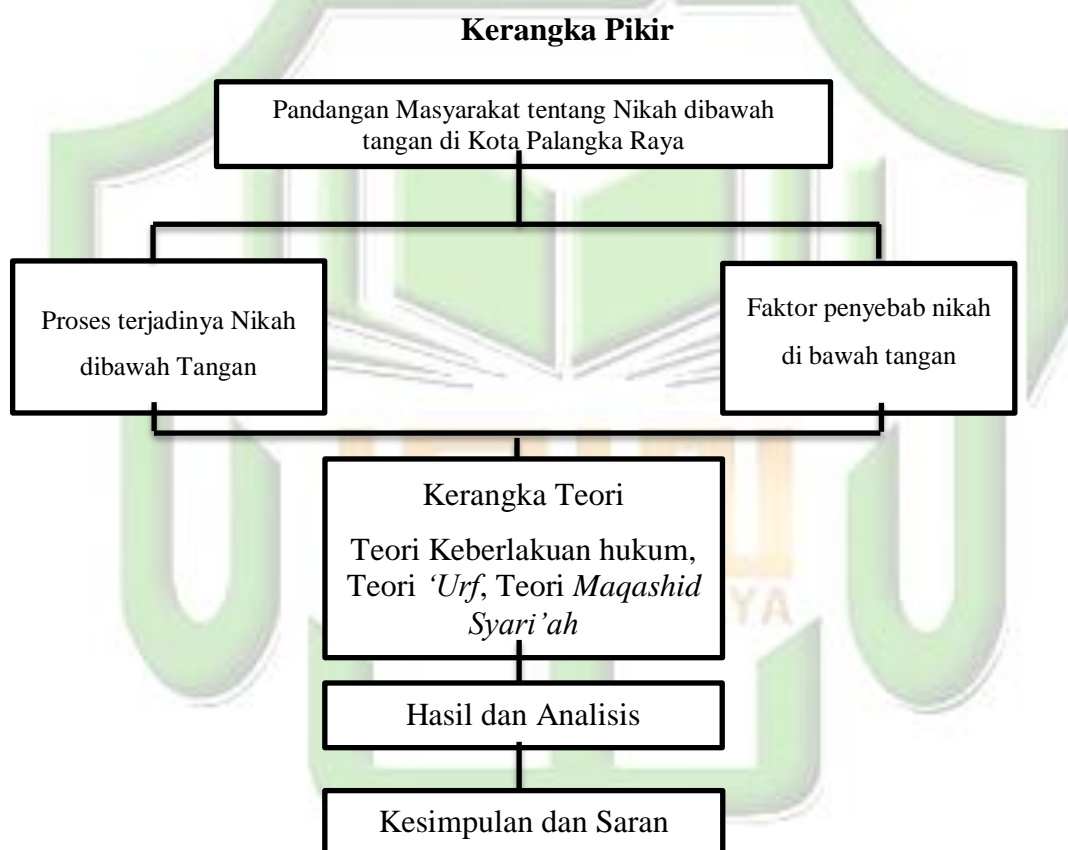
<sup>105</sup> Ibid.

Adapun Nikah di bawah tangan/ nikah sirri bisa diartikan sebagai nikah yang hanya dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada PP Nomor 10/1983 jo PP 45/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sebagaimana calon suami mengawini calon isteri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami isteri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Motif nikahnya itu terutama untuk pemenuhan kebutuhan biologis yang halal (terhindar dari perbuatan zina menurut hukum Islam). Walaupun tidak semua pasangan yang melakukan pernikahnya secara diam-diam adalah berasal keinginannya, namun banyak dari yang terjadi adalah karena keadaan yang seakan menjadikannya mengambil langkah tersebut.

Sedangkan Nikah Sah adalah Nikah yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing seperti yang telah di jelas dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 2 ayat (1). Namun sah dan tidaknya suatu perkawinan menurut hukum positif Indonesia juga disyaratkan dengan diselenggarakan atau tidaknya pencatatan Pada KUA (untuk Muslim) atau Kantor Catatan Sipil (untuk Non Muslim).

Saat ini banyak orang yang memutuskan menikah di bawah tangan tanpa adanya ikatan hukum. Walaupun sama-sama secara agama islam, namun nikah di bawah tangan hanya akan mempersulit seseorang ketika mengurus dokumen-dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga, KTP, hingga Akta Kelahiran anak. Apabila seseorang telah terlanjut menikah di bawah tangan, maka sebaiknya pernikahan tersebut segera di isbatkan ke pengadilan untuk mendapatkan status perkawinannya oleh negara dan di anggap sah, sehingga ia akan mudah dalam memperoleh dokumen-dokumen resmi.

Sedangkan bagi masyarakat yang terlanjur menikah di bawah tangan, namun tidak memiliki uang dan tidak mengerti bagaimana caranya mengurus persyaratan permohonan isbath nikah, sebaiknya tetaplah datang ke Pengadilan Agama, karena nanti pihak pengadilan akan mengarahkan tata cara serta apa saja yang perlu dilengkapi dalam memohonkan isbath nikah tersebut. Bagi yang tidak mengerti maka akan di arahkan ke posbakum, dan bagi yang tidak mampu maka bisa berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan ketentuan syarat yang telah dipenuhi.



## **2. Pertanyaan Penelitian**

a. Pertanyaan Penelitian kepada Subjek (Penghulu KUA dan Penghulu luar KUA):

1) Proses Pernikahan dibawah tangan di Kota Palangka Raya

- a) Bagaimana peristiwa pernikahan di bawah tangan di kota Palangka Raya ?
- b) Apakah pelaksanaan pernikahan di bawah tangan tersebut sudah menjadi kebiasaan?
- c) Dimana biasanya Nikah di bawah tangan ini dilangsungkan ?
- d) Apakah ada dampak yang akan di dapatkan oleh yang menikahkan pasangan yang melakukan nikah di bawah tangan ?
- e) Apakah ada ketentuan khusus yang perlu dilengkapi dalam pernikahan di bawah tangan ?

2) Faktor adanya Nikah dibawah tangan di Kota Palangka Raya:

- a) Apa yang melatar belakangi adanya Pernikahan di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya ?
- b) Apa yang menjadi alasan bapak bersedia menikahkan di bawah tangan ?  
(khusus untuk penghulu luar KUA)
- c) Apakah bapak pernah memberikan arahan untuk menikah resmi kepada pasangan yang ingin menikah di bawah tangan ?
- d) Apakah ada dasar hukum terkait pernikahan di bawah tangan ?

b. Pertanyaan Penelitian kepada Subjek (Pasangan yang menikah di bawah tangan):

1) Proses Pernikahan dibawah tangan di Kota Palangka Raya

- a) Apakah ada rasa penyesalan setelah melakukan pernikahan di bawah tangan ?

- b) Apakah pernah mengajukan permohonan isbath nikah setelah menikah di bawah tangan ?
  - c) Dimana tempat berlangsungnya pernikahan tersebut ?
  - d) Siapa saja pihak yang mengetahui pernikahan saudara ?
- 2) Faktor Menikah dibawah tangan di Kota Palangka Raya:
- a) Apa yang menjadi sebab dalam melakukan pilihan dengan menikah di bawah tangan ?
  - b) Apakah dampak yang didapat selama ini oleh ibu/ bapak beserta anaknya dalam pernikahan di bawah tangan ?
  - c) Bagaimana perasaan bapak/ ibu setelah menikah di bawah tangan ?
- c. Pertanyaan Penelitian kepada Hakim dan pasangan yang menikah resmi:**
- 1) Proses Pernikahan dibawah tangan di Kota Palangka Raya:
- a) Apakah Ibu/ Bapak mengetahui pernikahan di bawah tangan ? (khusus untuk pasangan yang menikah resmi)
  - b) Mengapa Ibu/ Bapak tidak menikah di bawah tangan ? (khusus untuk pasangan yang menikah resmi)
  - c) Apakah Ibu/ Bapak pernah melihat proses nikah di bawah tangan ?
- 2) Faktor Menikah dibawah tangan di Kota Palangka Raya:
- a) Apa Ibu/ Bapak mengetahui apa yang menjadi alasan pasangan yang menikah di bawah tangan ?
  - b) Apa yang alasan Ibu/ Bapak menikah secara resmi ? (Pasangan yang menikah resmi)
  - c) Apa saja syarat-syarat dalam permohonan isbath nikah? (pertanyaan ini hanya untuk Hakim Pengadilan Agama)



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.<sup>106</sup> Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, yang hal ini berarti harus memiliki metode. Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu,<sup>107</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrument penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Selain itu, peranan metode juga untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian.<sup>108</sup> Disamping juga dapat mempermudah penelitian. Oleh karena itu agar data yang didapat peneliti akurat dan tepat sasaran, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>106</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13, hlm. 5.

<sup>107</sup>*Ibid.*

<sup>108</sup>Abu Ahmad Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. VIII, hlm. 2.





adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>110</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>111</sup> Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul kadir Muhammad yaitu:

- a. Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
- b. Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- c. Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini dianalisis secara kualitatif.<sup>112</sup> Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk

---

<sup>110</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 170.

<sup>111</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 106.

<sup>112</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 382.

dan Miller yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahwasanya dan dalam peristilahannya.<sup>113</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum karena penelitian ini mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perilaku sosial, yakni pernikahan yang tidak dicatat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>114</sup>

Penelitian ini berbentuk deskriptif, yakni memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

---

<sup>113</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

<sup>114</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 105.



lainnya.<sup>115</sup> Adapun tujuan pokok penelitian hukum adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>116</sup> Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya pengertian pokok/dasar "peristiwa hukum" yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (omstandigheden), kejadian (gebeurtenissen), dan perilaku atau sikap tindak (gedragingen).<sup>117</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mengkaji suatu masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya masyarakat mencatatkan pernikahannya kepada badan yang berwenang namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya.

### 3. Objek, Subjek dan Informan Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah

---

<sup>115</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 10.

<sup>116</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 93.

<sup>117</sup>*Ibid.*

Nikah di Bawah Tangan (ialah pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi menurut negara, karena tidak dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang).

Subjek dalam penelitian adalah yang menjadi sumber dalam menggali data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kategori dari masyarakat (ialah sekelompok orang-orang yang mengetahui atau terlibat dalam pernikahan tersebut) yang peneliti jadikan sebagai subjek dan informan penelitian, yaitu 3 (tiga) kategori untuk Subjek, diantaranya: 5 dari penghulu yang bekerja KUA (ialah pegawai yang bekerja dan terdaftar secara resmi sebagai penghulu di KUA dari 5 kecamatan yaitu Jekan Raya, Pahandut, Sebangau, Bukit Batu, dan Rakumpit), 2 dari penghulu liar (ialah orang yang menikahkan pasangan dengan menikah secara tidak resmi/ tidak terdaftar di KUA), dan 2 (dua) dari pasangan yang menikah di bawah tangan (ialah pasangan yang memilih pernikahannya tidak secara resmi/ tidak di hadapan pejabat yang berwenang). Sedangkan yang menjadi informan terdapat 2 (dua) kategori, yakni: 2 (dua) Pasangan yang menikah resmi (pasangan yang pernikahannya diakui hukum Negara), dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama (ialah yang berperan mengetahui melalui adanya permohonan isbath nikah dari nikah di bawah tangan). Adapun dari semua subjek dan informan yang telah disebutkan, tentunya berada di kota Palangka Raya. Peneliti dapat langsung turun kelapangan dan mengumpulkan

informasi yang terkait tentang pembahasan dalam penelitian yaitu dengan menggali informasi kepada orang ditempat penelitian.<sup>118</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indera untuk memperoleh data yang terpercaya.<sup>119</sup> Informasi yang ingin diketahui dengan menggunakan teknik ini adalah :

- a. Gambaran umum dari lokasi penelitian
- b. Gambaran umum dari proses dilaksanakannya Nikah di Bawah Tangan.
- c. Gambaran umum dari masyarakat yang terkait Nikah di Bawah Tangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>120</sup> Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan

---

<sup>118</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 51.

<sup>119</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 125-126.

<sup>120</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 30.

dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, penulis menggunakan wawancara mendalam.

Menurut Burhan Bungin wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapat gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.<sup>121</sup> Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang di kombinasi dengan observasi non partisipan.

Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai Pandangan Masyarakat terhadap Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung, namun masih terkait dengan konteks penelitian. Patton menggolongkan enam jenis pertanyaan penelitian yang saling berkaitan yaitu:<sup>122</sup>

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan atau subjek yang diteliti.

---

<sup>121</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 108.

<sup>122</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2010, hlm. 76.

- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, peneliti meminta pendapat kepada informan atau subjek terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu.
- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, mendapatkan tentang perasaan dari informan atau subjek yang sifatnya efektif.
- d. Pertanyaan tentang pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan informan terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui.
- e. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera, untuk mengungkapkan data atau informasi karena informan atau subjek melihat, mendengarkan meraba, dan mencium suatu peristiwa.
- f. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi, untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, pendidikan asal-usul dan lainnya.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan atau sering disebut dengan *life histories*, cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.



Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>123</sup>

#### D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi<sup>124</sup> yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>125</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>126</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>127</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm. 82.

<sup>124</sup>Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, hlm. 110.

<sup>125</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 83.

<sup>126</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, hlm. 387.

<sup>127</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 177.

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>128</sup>

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek atau responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Penghulu Kantor Urusan Agama kota Palangka Raya, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Penghulu yang tidak bekerja di KUA, dan pasangan yang menikah di bawah tangan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini, yaitu:

*Data Collection* (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber mengenai pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan di kota palangka raya.

- a. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang mengenai pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan di kota palangka raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
- b. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang dihasilkan dari penelitian tentang mengenai pandangan masyarakat tentang nikah di

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

bawah tangan di kota palangka raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.

- c. *Data Conclusion Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari mengenai pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan di kota palangka raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>129</sup>

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
- BAB II : Kajian Teori dan Konsep Penelitian, meliputi penelitian terdahulu, kajian teori: teori keberlakuan hukum, teori '*urf*' dan teori maqashid syariah; konsep penelitian: pengertian persepsi (pandangan), pengertian masyarakat, pengertian nikah di bawah tangan dan ruang lingkupnya; kerangka pikir dan pertanyaan penelitian: kerangka pikir, denah penelitian dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan

---

<sup>129</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, hlm. 23.

objek penelitian dilengkapi dengan informan. Teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB IV :** Hasil Penelitian dan Analisis, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya, hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Penghulu yang tidak bekerja di KUA dan Tokoh Agama yang ada di Kota Palangka Raya dan Pasangan pernikahan dibawah tangan di Kota Palangka Raya, tentang pelaksanaan nikah di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan faktor penyebab nikah di bawah tangan di Kota Palangka Raya. Hasil Analisis tentang pelaksanaan nikah di bawah tangan di kota palangka raya dalam pandangan masyarakat, faktor yang menyebabkan adanya Nikah di bawah di Kota Palangka Raya dalam pandangan masyarakat.

**BAB V:** Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Palangka Raya**

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang.



- e. Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.<sup>130</sup>
- f. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.<sup>132</sup>

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.<sup>133</sup>

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

---

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>*Ibid.*

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.<sup>134</sup>

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.<sup>135</sup>

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup>*Ibid.*

<sup>136</sup>*Ibid.*

## 2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km<sup>2</sup>.<sup>137</sup>

## 3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan

---

<sup>137</sup>Tanpa Nama, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 21 Maret 2020).



Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.<sup>138</sup> Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang,

---

<sup>138</sup>Tanpa Nama, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 21 Marert 2020).

Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>139</sup>

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Palangka Raya Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Pahandut	119,37	93 894	786
2.	Sabangau	641,51	67 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	33 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	5404	3
	<b>Palangka Raya</b>	<b>2 853,52</b>	<b>343400</b>	<b>61</b>

da setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya terdapat Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut beralamat di Jalan Wahidin Sudiro Husudo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya di Jalan Rinjani Bukit Hindu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau di Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kalampangan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu di Jalan Tjilik Riwut Km. 33 Tangkiling,

<sup>139</sup>Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) (diakses 21 Maret 2020).

dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit di Jalan Tumbang Talaken Km. 52,5 Petuk Bukit.

Kemudian di Kota Palangka Raya terdapat satu Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2, dan di Kota Palangka Raya terdapat dua Perguruan Tinggi Islam, yakni Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang beralamat di Jalan RTA Milono Km. 1,5 dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang beralamat di Jalan G. Obos Komplek Islamic Center.

Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama, Hakim  
Pengadilan Agama dan Akademisi Hukum Islam

#### **4. Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya**

Hasil wawancara mengenai pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan di kota palangka raya dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir), sebagai berikut:

### a. Responden Pertama

Nama : LH

Tempat, Tanggal Lahir : Handil Baru, 12 Maret 1966

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Jekan Raya pada pukul 14.40 WIB sampai dengan 15.21 WIB kemudian dilanjutkan kembali wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 10.00 sampai dengan 10.48. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

LH menjelaskan:

Kalau menurut saya ini adalah pernikahan yang sah secara agama, namun belum sah secara negara. Yaitu nikah yang pasangan tersebut tidak melakukan di KUA, maka apabila mereka menikah ingin menikah ulang, seperti misal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi di pernikahannya itu, kami harus menerima legalitas dari pengadilan agama bahwa pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan, kami harus menunggu dari pengadilan karena kecuali apabila pengadilan telah menolak permohonan isbath nikah tersebut maka kami pihak KUA akan menikahkan ulang. Apabila pengadilan telah menolak artinya syarat pernikahannya secara agama tidak terpenuhi, dipanggil walinya saksinya lalu dimintai keterangan kapan pasangan tersebut menikah di bawah tangan, tanggal berapa bulan berapa, sehingga apabila anak dari pasangan tersebut sudah lahir sedangkan pasangan tersebut menikah di bawah

tangan, maka di halaman belakang dari buku nikahnya ada catatan khusus.<sup>140</sup>

2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

LH menjelaskan:

Yang pertama dari yang paling banyak terjadi diantaranya adalah faktor usia, ketika pasangan yang ingin menikah namun usia mereka belum tercukupi hal ini terkait dengan revisi UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah di sahkan oleh DPR mengenai usia Minimal Nikah jadi 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan. DPR dan Pemerintah elah menyepakati revisi UU Perkawinan terkait usia minimum nikah, lewat rapat kerja pada Kamis 12 September 2019 lalu dan RUU ini juga mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan pendidikan sosialisasi dan pendidikan sosial bahaya pernikahan dini. Kemudian UU ini di sahkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada 16 September 2019 yang selanjutnya Jokowi menandatangani UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan pada 14 Oktober 2019. Maka jika pasangan yang ingin menikah usianya belum mencukupi kami pihak KUA tidak bisa menikahkan, lalu memilih lah mereka dengan jalan nikah di bawah tangan tersebut. Yang kedua adalah faktor tidak mau berurusan, karena merasa kesulitan dalam administrasi dan hal ini berkaitan dengan ada beberapa syarat yang harus dikumpulkan, biasanya nikah di bawah tangan ini banyak juga terjadi karena pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua maka tanpa adanya persetujuan isteri pertama (apabila dia mempelai laki-laki) syaratnya dalam administrasi belum lengkap terpenuhi, akhirnya karena beberapa alasan entah itu terlanjur cinta atau sudah ada kecelakaan, pasangan ini memilih untuk menikah di bawah tangan yang dengan begitu mereka merasa lebih aman akan pernikahannya padahal ini adalah jalan yang merugikan bagi mereka sendiri, terkhusus lagi pihak perempuannya. Yang ketiga adalah faktor lemahnya pengetahuan, kurangnya pemahaman terkait pernikahan dan pentingnya pernikahan yang dilaksanakan di KUA maka hal ini

<sup>140</sup>Wawancara dengan LH (Kepala KUA) di KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 05 Maret 2020.

menyebabkan ketidaktahuan mereka terhadap akibat dari pernikahan di bawah tangan, yang tentunya akan menyulitkan mereka bahkan anak mereka seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, akhirnya hal ini juga merugikan sang anak bahkan sangat merugikan, kecuali pasangan tersebut mengajukan permohonan isbath nikah dan diterima oleh Pengadilan, apabila permohonannya ditolak maka pernikahannya harus diulang yang tentu saja sesuai keentuan dan syarat baik secara hukum Islam maupun hukum Negara. Mungkin ini saja yang saya ketahui yang paling banyak terjadi di Palangka Raya.<sup>141</sup>

### 3) Apa saja dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

LH menjelaskan:

Diantara dampaknya adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah bagi anak yang terlahir dari pernikahan tersebut tidak bisa mendapat akta, kemudian dampak lainnya adalah mendapatkan kesulitan saat berurusan contohnya seperti apabila pasangan tersebut ingin meminjam uang di bank, mengkredit rumah, bahkan kadang ada sekolah yang tidak bisa menerima apabila anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran, sehingga juga menyulitkan anak untuk mendapatkan pendidikan, tidak bisa melakukan ibadah umroh bersama, karena tidak memiliki buku nikah itu tadi, perubahan status kawin dalam Kartu Keluarga juga memerlukan buku nikah, mengurus BPJS anak yang mana sebagai persyaratannya adalah melampirkan buku nikah, bahkan ada kasus yang pasangan tersebut menikah di bawah tangan kemudian kesulitan membuatkan BPJS untuk anaknya tadi sedangkan biayanya 15 Juta rupiah, dan apabila tidak mampu membayar maka anaknya disita, lalu mereka meminta tolong di KUA minta nikahkan baru kemudian mereka bisa mengurus BPJS tersebut lalu selanjutnya adalah harta gono gini akan bermasalah di kemudian hari apabila tidak ada buku nikah, pembagian hak waris pun bermasalah, walau seperti apapun ia menjelaskan hubungan darah yang di miliknya tanpa adanya bukti dari buku nikah tersebut sehingga tiada pula akta kelahiran dari dirinya maka ia tetap tidak bisa membuktikan karena tiada bukti autentik maka tiada pula perlindungan negara bagi dirinya.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup>*Ibid.*

<sup>142</sup>*Ibid.*



- 4) Apakah bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

LH menjelaskan:

Saya tidak pernah jika itu menghadiri namun apabila Rt setempat dari pasangan tersebut melangsungkan pernikahannya mungkin ia ada ditempat. Adapun yang saya tau itu apabila telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pernikahan maka dilangsungkanlah pernikahan tersebut.<sup>143</sup>

- 5) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

LH menjelaskan:

Kalau prosesnya itu sendiri yang saya tau, jika ditempat tersebut sudah ada wali, 2 saksi, maka menikahlah mereka selagi telah memenuhi rukun dan syaratnya tadi. Biasanya hal ini juga diketahui oleh RT setempat.<sup>144</sup>

- 6) Adakah pencatatan secara tidak resmi dari pernikahan di bawah tangan ?

LH menjelaskan:

Untuk pencatatan secara tidak resminya saya tidak tau, karena ini bukan dalam ranah KUA, untuk lebih jelasnya mungkin anda bisa tanyakan kepada penghulu yang bersangkutan.<sup>145</sup>

- 7) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan untuk melegalkan pernikahannya di KUA ?

LH menjelaskan:

Biasanya apabila ada pasangan yang ingin melegalkan status pernikahannya, atau karena mereka ingin mendapatkan buku nikah maka kami pihak KUA meminta

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Wawancara dengan LH (Kepala KUA) di KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 10 Maret 2020.

untuk mereka mengajukan permohonan isbath nikah dahulu ke Pengadilan baru nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya yang harus di penuhi. Lewat adanya isbath nikah maka kami akan mengetahui kapan dilangsungkan pernikahan di bawah tangan nya. Apabila sudah ada keluar surat dari pengadilan dan di terima maka akan kami keluarkan buku nikah di bagian halaman belakangnya ada catatan khusus “yang bersangkutan telah melaksanakan pernikahan di bawah tangan pada tanggal sekian”.<sup>146</sup>

- 8) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar KUA

yang menikahkan secara tidak resmi (nikah di bawah tangan) ?

LH menjelaskan:

Yang jelas hal itu merupakan tanggung jawab dunia akhirat bagi ia yang menikahkan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui akan hukum tersebut, ketentuan sebagai wali dan ketentuan sebagai saksi. Apabila wali dan saksinya tidak sesuai ketentuan syariat seperti menikah di wali kan oleh bukan hubungan nasab nya atau tidak ada hubungan apapun maka tidak sah pernikahannya, begitu pula maharnya jadi meskipun pada saat ijab qabul tersebut sudah pas pernikahan tersebut belum tentu sah apabila maharnya ternyata uang palsu, pernah saya temukan maka kami penghulu perlu juga memeriksa dan kalau ternyata uang tersebut palsu ya secepatnya harus di ganti agar sah pernikahan tersebut, sering ditemui biasanya dalam bingkai dengan uang mahar yang dibentuk menjadi burung dan berbagai macam bentuk lainnya ternyata uangnya palsu, maka pernikahannya menjadi tidak sah kerena ada kesalahan dalam penyerahan maharnya, lebih baik sedikit tapi asli daripada banyak dan bentuk yang indah tapi mengakibatkan pernikahannya tidak sah karena maharnya tidak sesuai dengan hukum islam.<sup>147</sup>

- 9) Apakah ada dasar hukum tentang kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

LH menjelaskan:

---

<sup>146</sup>*Ibid.*

<sup>147</sup>*Ibid.*

Kalau menurut saya landasan nya adalah seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

Didalam ayat ini memang tidak ada keterangan apabila menikah harus di catatkan. Namun mengenai peraturan tersebut bisa dikaitkan pula pada surah an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Mentaati *Ulil amri* adalah apa yang dimaksudkan dalam mentaati perintah dari pemerintah, selagi peraturan tersebut baik dan tidak melanggar hukum dalam agamanya, peraturan ini pun tentu saja tercantum di dalam UU. Perkawinan Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah menurut negara apabila di lakukan di hadapan pejabat yang berwenang, apalagi melanggar aturan maka bisa diartikan melanggar aturan pemerintah.<sup>148</sup>

- 10) Apakah selama ini pernah diberikah penyuluhan tentang nikah di bawah tangan oleh pihak KUA ?

LH menjelaskan:

Kalau nasehat/ penyuluhan itu pihak kami selalu berikan, biasanya tiap senin kalau disini, jadi ketika pasangan calon pengantin telah berkumpul disitu kami akan memberi tahu bahwa apa saja bahaya apabila tidak mendapat buku nikah, tidak mendapat perlindungan negara hal ini bisa menjadi wawasan pula terhadap keluarga calon mempelai terkhusus yang belum mennikah atau dari keluarganya yang sebagai orang dan memiliki anak yang belum menikah. Dalam kegiatan lain kami juga memberikan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pegawai penyuluh yang di jadwalkan perminggu bahkan sampai kepada Lembaga

<sup>148</sup> *Ibid.*

Permasyarakatan. Maka sebenarnya kita masih punya banyak cara untuk menginformasi kepada masyarakat terkait akibat yang begitu fatal apabila melakukan pernikahan di bawah tangan.<sup>149</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek LH bahwa Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang sah secara agama dan belum sah secara hukum negara, dan ada beberapa faktor yang menjadikan terjadinya nikah di bawah tangan ini di kota palangka raya yang diantaranya adalah karena faktor usia yang belum mencukupi, karena tidak mau berurusan dengan merasa administrasi merepotkan baginya sehingga ia tidak mampu melengkapi persyaratan dengan sempurna dan karena kurangnya pengetahuan akan betapa merugikannya apabila menikah di bawah tangan. Adapun diantara kerugiannya seperti tidak bisa mendapat buku nikah, akta kelahiran anak, sulit berurusan di masyarakat, harta gono-gini akan di sulitkan, begitu pul dalam hak waris tidak ada karena begitu banyak dan meluasnya kerugian dari menikah di bawah tangan tersebut. Adapun prosesnya adalah sebagaimana halnya pernikahan yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam agama, sedangkan mengenai dasar hukum terkait kebolehan dan larangan nya terdapat dalam surah an-Nisa ayt 3 dan ayat 59.

---

<sup>149</sup>*Ibid.*

## b. Responden Kedua

Nama : MNST  
 Tempat, Tanggal Lahir : Menteng Julu, 12 Desember 1971  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Sebangau

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Sebangau pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.40 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

### 1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

MNST menjelaskan:

Kalau di pandang dari segi negara ya jelas tidak boleh, kalau secara agama boleh-boleh saja selagi memenuhi ketentuan dan syarat dan tujuan menikahnya. Mengingat ada 5 hukum nikah dalam agama, ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jika dia tidak mampu namun memakasakan diri untuk menikah lalu kemudian akan menyengsarakan anak orang maka haram.<sup>150</sup>

### 2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

MNST menjelaskan:

Kurang mau berurusan, sedikitnya keinginan masyarakat untuk menikah di KUA dengan beberapa alasan entah itu mereka merasa disulitkan karena ada beberapa persyaratan yang sulit untuk mereka penuhi, biasanya hal ini berkaitan dengan faktor yang kedua karena masalah waktu, mereka yang terbatas, kadang-kadang mereka datang dan pihak

<sup>150</sup>Wawancara dengan MNST (Kepala KUA) di KUA Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, pada tanggal 11 Maret 2020.



kami menerima namun ada persyaratan yang tidak terpenuhi sementara misalnya dia sudah membagi undangan dan sebagainya namun persyaratannya tidak terpenuhi maka kami tidak bisa menikahkan sedangkan persyaratan tersebut sangat fatal apabila tidak terpenuhi contohnya ketika seorang umurnya telah 35 Tahun alamatnya pun di luar Palangka Raya dan dia menggunakan surat domisili saja, dan dia hanya numpang nikah saja di Palangka Raya, namun ia mengatakan masih remaja (belum menikah), sehingga ternyata ada pemanipulasian umur maka apabila ia belum memperbaiki hal itu kami pihak KUA tidak berani menikahkan. Sedangkan pengakuannya tersebut bisa kami cek lewat Kartu Keluarga dengan NIK nya maka otomatis akan terlihat datanya. Yang ketiga adalah faktor Hamil sebelum Nikah, masih sering terjadi pernikahan akibat telah terjadi kecelakaan karena mereka mungkin pacaran sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan itu, dan karena merasa malu maka mereka terpaksa menikah di bawah tangan sehingga orang mengira mereka telah menikah sebelum mengandung anak tersebut, dalam hal lain pula apabila menikah di KUA dari pernikahannya apabila memiliki anak, dan lahirnya misalnya 5 bulan setelah pernikahan tentu saja ini hal yang mustahil dan akan diketahui pada saat pembuatan akta kelahiran anaknya. Selanjutnya karena umurnya belum mencukupi, karena jauhnya jarak KUA dengan rumah mereka, begitu banyak jarak tempuh yang harus mereka lewati, dan di daerahnya ada penghulu kampung maka menikahlah mereka dengan penghulu tersebut walaupun status mereka masih belum resmi menurut negara, kurangnya informasi mengetahui dampak nikah di bawah tangan ini pun sering tidak di dapatkan sehingga mereka tidak tau betapa merugikannya pilihan tersebut untuk mereka bahkan juga anaknya.<sup>151</sup>

- 3) Apa saja dampak dari pernikahan di bawah tangan yang bapak ketahui?

MNST menjelaskan:

Dampaknya yang jelas dia tidak mendapat perlindungan dari Negara terhadap pernikahannya tersebut, baik itu ditinggalkan suaminya atau apapun itu kesulitan dalam pernikahannya ia tidak bisa mengadukan ke pengadilan

---

<sup>151</sup> *Ibid.*



karena tidak memiliki bukti autentik dari pernikahannya kecuali terlebih dahulu mengajukan isbath nikah, yang kedua jelasnya tidak mendapat buku nikah maka untuk berurusan apapun seperti yang memerlukan buku nikah entah itu permohonan peminjaman uang di bank juga akan kesulitan dan ada begitu banyak sebenarnya kesulitan yang akan di dapatkannya dari menikah di bawah tangan tersebut.<sup>152</sup>

- 4) Apakah bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

MNST menjelaskan:

Kalau menghadiri langsung saya tidak pernah, meskipun 1 komplek, mengingat bahwa kami pihak KUA memang dilarang untuk menghadirinya, karena apabila kami menghadiri pernikahan tersebut berarti ikut menganggap sah pernikahan tersebut. Adapun pihak KUA adalah Mencatat, Mengawasi, Mengevaluasi jika kami menghadiri berarti tidak menjalankan yang tiga ini.<sup>153</sup>

- 5) Apakah bapak mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

MNST menjelaskan:

Jadi yang saya ketahui mereka itu ada mengisi formulir, dan menandatangani surat pernyataan yang diserahkan untuk mereka. Saya rasa jika keterangan hitam di atas putih itu ada dan dibuat oleh penghulu kampung itu sendiri. namun jika melihatnya secara langsung tidak pernah berhubungan ketentuan yang saya sebutkan sebelumnya tadi terhadap ketentuan kepada kami pihak KUA.<sup>154</sup>

- 6) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar KUA yang menikahkan secara tidak resmi ?

MNST menjelaskan :

Menurut saya kalau mengenai dampak, itu hanya akan menjadi keuntungan bagi penghulu tersebut akan lebih menguntungkan, karena dia yang menikahkan sedikit banyaknya akan di bayar, tidak ada yang gratis, bahkan

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup>*Ibid.*

<sup>154</sup>*Ibid.*

mereka yang di nikahkan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan keluarga.<sup>155</sup>

- 7) Apa yang bapak ketahui dari dasar orang yang melakukan di bawah tangan ?

MNST menjelaskan:

Yang pertama karena mereka suka sama suka, yang kedua karena ingin membahagiakan orang tua, dan sudah ada kesepakatan. contohnya seperti laki-laki dan perempuan yang kemana-mana selalu berdua agar tidak mengkhawatirkan maka mereka nikah di bawah tangan meskipun misalnya menikah resminya setelah lulus kuliah, dan kebetulan pada saat itu mereka masih berstatus anak sekolah yang tentu saja umur mereka pun belum sampai belum memenuhi ketentuan dari undang-undang. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari kedekatan mereka tersebut misal hamil sebelum nikah kan tentu saja mereka akan di ejek teman-teman sekolahnya sehingga menikahlah mereka di bawah tangan itu tadi.<sup>156</sup>

- 8) Bagaimana caranya pihak KUA mengetahui pasangan yang ingin menikah di KUA, ternyata sebelumnya telah menikah di bawah tangan ?

MNST menjelaskan:

Pertama kami akan mengetahui lewat Kartu Keluarga, mengingat sekarang sudah bisa membuat karu keluarga meskipun tanpa buku nikah, jadi jika dulu itu ketengannya kawin/ belum kawin, sekarang sudah ada keterangan kawin tercatat/ kawin tidak tercatat, kedua melalui apa tujuan mereka ingin menikah dan kami bertanya dengan cara kekeluargaan, dengan pelan-pelan sampai ia terbuka mengutarakan niatnya tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan sebelumnya menikah dimana, apa alasan mereka menikah seperti sebelumnya.<sup>157</sup>

- 9) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan untuk mendapatkan buku nikah di KUA?

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid*

MNST menjelaskan:

Sekarang ini serba memerlukan bukti, maka mereka harus membuktikan pula mereka telah menikah dibawah tangan. Kadang-kadang ada yang yang menikah di bawah tangan kemudian mereka cerai di bawah tangan, lalu kami meminta mereka membuat surat bahwa dia menikah di bawah tangan dan membuat surat bahwa dia cerai di bawah tangan dengan tanda tangan Ketua RT. Adapun jika mereka ingin memiliki buku nikah, bisa kami brikan asalkan ia sudah mengurus permohonan isbathnikah di pengadilan, dan kemudian di terima, jika di tolak maka mereka bisa juga mendapatkan buku nikah, tapi dengan menikah ulang<sup>158</sup>

10) Apakah ada dasar hukum terkait kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

MNST menjelaskan:

Dasar hukumnya adalah seperti yang sudah ada dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan usia menikah laki-laki dan perempuan minimal di usia 19 Tahun. Disini disebutkan bahwa nikah itu sah apabila di catat di hadapan pejabat yang berwenang, artinya apabila ia menikah di bawah tangan berarti melanggar aturan negara, dan jelas perbuatannya tersebut dilarang oleh negara.<sup>159</sup>

11) Apakah selama ini pernah diberikahan penyuluhan terkait nikah di bawah tangan oleh pihak KUA ?

MNST menjelaskan:

Kami hanya menghimbau saja kepada para calon pengantin dan keluarga untuk tidak menikah di bawah tangan, kalau beritndak dengan hukum itu buka ranah kami maka kami hanya menjalankan saja melalui penyuluhan nasihat pernikahan pada calon mempelai di hari yang telah di tentukan. Kemudian selain dari itu di setiap momen pernikahan disitulah kami akan memberikan himbauan bahwa jika ingin menikah silahkan ke KUA dan nikah di

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

Kantor 0,00 dan nikah di rumah 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).<sup>160</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

MNST bahwa Pernikahan di bawah tangan ini tergantung tujuan pernikahannya apabila niatnya baik untuk menyempurnakan agama dan tidak ada keinginan untuk menyengsarakan yang dinikahinya maka boleh saja menurut agama, namun secara negara tidak boleh. Adapun dasar hukumnya yang disebutkan oleh subyek MNST seperti yang ada pada UU. No. 19 Tahun 2019 tentang perkawinan terkait batasan usia menikah, yang mana peraturan ini berkaitan dengan apa yang menjadi faktor menikah di bawah tangan di kota palangka raya. Beberapa faktor lainnya yang menjadikan terjadinya nikah di bawah tangan di kota palangka raya yaitu diantaranya adalah kurang mau berurusan, kekurangan waktu, tidak bisa memnuhi perlengkapan administrasi, dan karena terlanjur kecelakaan sehingga untuk menyelamatkan nama baik keluarga akhirnya kedua keluarga dari mermpelai sepakat untuk menikah di bawah tangan, padahal akan ada begitu merugikannya dampak yang akan di dapatkan oleh yang menikah di bawah tangan tersebut seperti tidak ada buku nikah, tidak ada perlindungan negara dan akan sulit dalam berbagai urusan. Mengenai proses nikah di bawah tangan ini untuk hal bukti mereka telah menikah biasanya mereka ada mengisi formulir dengan tanda keterangan hitam di atas putih,

---

<sup>160</sup>*Ibid.*

namun walaupun begitu bukti tersebut tetaplah bukan bukti autentik bagi Negra.

**c. Responden Ketiga**

Nama : WN

Tempat, Tanggal Lahir : Kota Baru, 15 Oktober 1972

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Kec.Pahandut

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Sebangau pada pukul 14.20 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

1) Bagaimana pandangan bapak mengenai nikah di bawah tangan ?

WN menjelaskan:

Menurut saya nikah di bawah tangan itu sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan karena dalam pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Biasanya nikah yang di bawah tangan ini beberapanya banyak dilakukan orang yang sudah menikah, ketika ia mampu menikah lagi dan terganjal tidak bisa nikah di KUA, karena KUA tidak bisa menikahkan jika dia (laki-laki) yang ingin menikah lagi namun tidak menyerahkan bukti telah mendapat izin poligami dari isterinya yang pertama.<sup>161</sup>

2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

WN menjelaskan:

---

<sup>161</sup>Wawancara dengan WN (Kepala KUA) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 11 Maret 2020.



Yang pertama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena ia sudah memiliki isteri dan ia ingin menikah lagi namun tidak mendapat izin poligami akhirnya mengambil jalan pintas yaitu minta nikahkan kepada penghulu kampung atau nikah di bawah tangan. Yang kedua tidak mau berurusan mengurus surat-menyurat yang menjadi persyaratan pelengkap administrasi apabilamenikah di KUA, karena kami pihak KUA tentu saja tidak berani menikahkan apabila ada syarat yang belum terlengkapi, sehingga hal ini menjadikan mereka ingin mengambil jalan pintas tadi karena tidak mau repot dan merasa nikah di bawah tangan lebih mudah walaupun sebenarnya akan menyulitkan di kemudian hari. Faktor ketiga adalah ketika mereka yang ingin menikah namun sebelumnya telah menikah dan bercerai tapi tidak ada akta cerainya kami pun juga tidak bisa menikahkan karena statusnya masiih menjadi suami/isteri orang lain. Yang keempat adalah faktor belum cukup umur, berhubungan sekarang sudah berubah peraturannya dari undang-undang mengenai batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan minimal 19 Tahun, maka apabila belum cukup kami pun juga tidak bisa menikahkan karena tidak memenuhi ketentuan dari Hukum Negara.<sup>162</sup>

- 3) Apakah ada dasar hukum terkait kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

WN menjelaskan:

Memang sebenarnya boleh saja selagi terpenuhinya rukun dan syarat jika dilihat dalam aturan yang ada pada agama, namun berbeda dengan aturan negara yang memiliki ketentuan berbeda bahwa meskipun pernikahan itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, selagi pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan dari negara dan tidak dilakukan di KUA atau pejabat yang berwenang maka tetap dianggap tidak sah.

- 4) Apa dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

WN menjelaskan:

Dampaknya itu nanti apabila ia hamil kemudian punya anak, anaknya tidak bisa membuat akta kelahiran walaupun

---

<sup>162</sup>*Ibid.*



bisa juga keterangannya di nisbatkan kepada ibunya saja tidak kepada ayahnya. Kemudian jika dikemudian hari ada pembagian harta waris juga tidak bisa mendapat haknya meskipun secara agama dia adalah anak yang sah dari orang tuanya, namun karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum maka tetap saja tidak bisa kecuali ada keridhoan hati dari pihak keluarga yang sah sebagai hak warisnya mau membagikan secara kekeluargaan, namun jika tidak ada maka tetap tidak ada seperti yang saya jelaskan sebelumnya mungkin seperti yang saya ketahui.<sup>163</sup>

- 5) Apakah bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

WN menjelaskan:

Saya pernah mendengar saja mengenai gambaran nikahnya, kalau melihatnya saya tidak pernah. Saya mengetahuinya adalah lewat penghulu kampung yang menikahkan tersebut yang kebetulan saya juga kenal orangnya. Jadi ketika ia datang ke KUA sedikit sedikit perah perbincangan mengenai yang nikah di bawah tangan tersebut. Namun hal ini bukan berarti saya setuju karena KUA tentu saja tidak menyarankan hal itu, mungkin mereka yang menikahkan karena ada beberapa alasan memilih di bawah tangan namun itu bukan tanggung jawab kami, kami hanya menikahkan apabila mereka datang ke KUA dan sudah memenuhi syarat baik itu secara Agama maupun secara Hukum Negara.<sup>164</sup>

- 6) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

WN menjelaskan:

Jadi proses yang saya ketahui itu adalah ketika mereka yang ingin minta nikahkan ke penghulu kampung, dengan membawa wali, bawa saksi, bawa selamatan berupa makanannya. Adapun penghulu itu ia sekedar memandu jalannya pernikahan. Tidak mengurus dokumen-dokumen seperti yang di KUA, harus mengurus KTP dan untuk mendapat buku Nikah di KUA pun sekarang KTP nya harus Online yaitu KTP dari calon mempelai, Orang Tua, Wali dan Saksinya. Jadi kami pihak KUA akan mengetahuinya lewat NIK. Mungkin hal ini membuat

---

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>*Ibid.*

mereka merasa lebih mudah menikah di bawah tangan, padahal meskipun itu terlihat mudah namun akan menrugikannya di kemudian hari.<sup>165</sup>

- 7) Apakah ada pencatatan secara tidak resmi dari nikah di bawah tangan ?

WN menjelaskan:

Ya biasanya kadang-kadang ada, dan surat itu dibuat dari penghulu kampung tersebut jadi mreka mungkin sudah memilik format tersendiri yang mana surat tersebut tinggal diisi dan ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan seperti mempelai, wali saksi, penghulunya dan ketua Rt.<sup>166</sup>

- 8) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar KUA yang menikahkan secara tidak resmi ?

WN menjelaskan:

Tidak ada dampak bagi yang menikahkan ini setahu saya, makanya mereka tidak mendapat efek jera, namun kami pihak KUA tidak mengurus hal itu mau menikah di penghulu kampung atau di KUA, sah tidaknya bukan tanggung jawab kami yang jelas kami pihak KUA tidak diperkenankan untuk menghadiri pernikahan tersebut.<sup>167</sup>

- 9) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan untuk melegalkan pernikahannya di KUA ?

WN menjelaskan:

Kadang ketika mereka datang kesini ingin mendapatkan buku nikah, maka akan kami arahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan isbath nikah, maka apabila setelah selesai isbath nikahnya di pengadilan “bahwa mereka adalah suami isteri dengan menikah di bawah tangan akan kami keluarkan buku nikahnya.”<sup>168</sup>

- 10) Apakah selama ini pernah diberikahan penyuluhan terkait nikah di bawah tangan oleh pihak KUA ?

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

WN menjelaskan:

Biasanya dilakukan pada saat nasihat pernikahan terhadap mereka yang mendaftarkan pernikahannya di KUA, kemudian nanti mereka akan kami kumpulkan dan diberikan nasihat nasihat terkait pernikahan, pentingnya nikah di kua, alangkah merugikannya apabila menikah di bawah tangan, maka dari dikumpulkan ini akan diketahui pula nanti oleh keluarganya dan dari situ harapan kami wawasan masyarakat semakin meluas dari pentingnya nikah di resmi atau nikah di KUA dan disamping itu pun menikah di KUA tidak di pungut biaya.<sup>169</sup>

11) Apakah bapak merekomendasikan nikah sdi bawah tanngan ?

WN menjelaskan:

Kalau itu tentu saja saya tidak merekomendasikan karna kasian dia juga, memang kadang-kadang kalau saya di kampung ada saja yang meminta saya untuk menikahkan mereka, berhubung mereka tahu saya penghulu KUA, namun saya tidak berhak tidak ada kewenangan selagi permohonan tersebut tidak disampaikan melalui KUA. Sebenarnya tidak sulit menikah di KUA, tapi tetap saja dia tidak mau namun saya juga tetap tidak mau untuk menikahkan, rata-rata dari alasan mereka adalah karena belum masuk batas umur, maka saya meminta mereka untuk mengurus dispensasi nikah dulu ke Pengadilan, namun justru dia merasa semakin di sulitkan, padahal jika dijalani tanpa difikirkan sulitnya, sebenarnya mudah saja.<sup>170</sup> Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

WN bahwa Pernikahan di bawah tangan sangatlah merugikan terutama bagi pihak perempuan. Biasanya faktor nikah di bawah tangan ini yaitu karena ingin poligami/ menikah secara tanpa sepengetahuan isteri pertama, karena tidak mau sulit/repot dalam mengurus administrasi juga karena umur yang belum cukup dalam batas usia boleh menikah mengingat bahwa peraturan dari UU.

---

<sup>169</sup>*Ibid.*

<sup>170</sup>*Ibid.*

Perkawinan saat ini telah membatasi usia nikah yakni 19 Tahun. Maka, dari beberapa faktor tersebut menjadikan masyarakat ingin memilih nikah di bawah tangan karena mereka merasa pernikahan ini lebih memudahkan mereka, padahal dampaknya akan merugikan mereka sendiri juga anak mereka yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan jika seandainya bisa pun akan di nisbatkan ke ibunya saja sehingga hal ini berkaitan pula dengan hak waris, tidak ada hal diantara keduanya baik ibu maupun anak dalam hak waris karena mereka tidak memiliki bukti dengan berkekuatan hukum untuk membuktikan bahwa mereka adalah isteri dan anak yang sah.

#### **d. Responden Keempat**

Nama : AB

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 05 Juli 1971

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Penghulu Fungsional KUA Kec.Pahandut

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut pada pukul 14.20 WIB sampai dengan 15.00 WIB kemudian wawancara di lanjutkan pada tanggal 17 Maret 2020. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

AB menjelaskan:

Nikah di bawah tangan ialah nikah yang dilakukan secara tersembunyi makanya juga disebut dengan nikah sirri “terdinding” dibawah meja dan tidak terlihat kan tentu saja, makanya tidak di akui negara. Kemudian nikah di bawah tangan itu yang pertama adalah melanggar undang-undang, yang kedua mereka tidak ada tanggung jawab karena akan menelantarkan daripada anak dan isteri, yang ketiga biasa dilakukan tergesa-gesa tanpa adanya perencanaan, persetujuan dari kedua belah pihak, bahkan kadang sampai mengingkari persetujuan orang tua maka disitu tidak terlaksana hadits Nabi “tidak sah nikah itu apabila tidak ada wali dan dua saksi yang adil” dan saksi itu yang adil. Saksi yang adil ialah mereka yang benar-benar tahu syarat dan rukun nikah harus diuji dulu, begitupun dengan wali ia bisa dicabut kewaliannya jika ia menelantarkan tidak melaksanakan kewajiban kepada anaknya. Ada kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiaban orang tua terhadap anaknya, diantara kewajiban orang tua adalah menikahkan. Kemudian mengenai Nikah dibawah tangan hukumnya sah menurut agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan mendapat restu dari kedua oranag tuanya. Namun menurut undang-undang tetap tidak sah karena tidak ada bukti.<sup>171</sup>

- 2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

AB menjelaskan:

Beberapa diantaranya ialah karena pergaulan bebas dan belum saatnya mereka merencanakan pernikahan, namun karena pergaulan bebas itu mereka pacaran akhirnya hamil diluar nikah maka terpaksa pada usia belum sampai mereka tidak di nikahkan. Dan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 7 bahwa nikah sekarang ini di regulasikan yaitu usia mereka adalah 19 tahun. Kemudian juga yang menjadi penyebabnya adalah karena zaman ini suda zaman milenial, akhirnya terlalu mudah untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan lewat handphone akhirnya ketemuan dan terjadilah hal yang tidak diinginkan.<sup>172</sup>

- 3) Apa dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

<sup>171</sup>Wawancara dengan AB (Penghulu Fungsional) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 11 Maret 2020.

<sup>172</sup>*Ibid.*



AB menjelaskan:

Dampaknya terutama terhadap anak, mau memiliki akta kelahiran bisa, pendidikannya pun akan kesulitan karna ada sekolah yang membutuhkan akta, apabila anaknya dikemudian hari mau menikah resmi tidak bisa juga jika orang tuanya belum mengisbatkan pernikahan di bawah tangannya tersebut, kemudian apabila nanti anak mau membuat KTP online pasti dicari buku nikahnya orang tua, belum lagi seperti mau bekerja TNI, maka hal ini termasuk penelantaran ahli waris.<sup>173</sup>

- 4) Apakah bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

AB menjelaskan:

Saya mengetahuinya berdasarkan laporan-laporan saja, biasanya dari isbath-isbath yang mereka bawa ke kua yang mana mereka ingin mendapat buku nikah setelah menikah di bawah tangan sebelumnya. Kadang ada juga yang mengadu langsung kesini maka kami arahkan terlebih dahulu harus isbath nikah ke pengadilan.<sup>174</sup>

- 5) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

AB menjelaskan:

Proses nikah di bawah tangan ini biasanya bisa juga dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena sifatnya sirri artinya tersembunyi. Maka yang saya ketahui nikah di bawah tangan yang bisa di anggap sah itu harus melengkapi rukun syaratnya secara agama selain itu juga biasanya di hadiri oleh Rt dari mempelai, kemudian mereka mengisi surat selebaran dengan tanda tangan termasuk rt nya tadi juga tanda tangan sebagai tanda telah mengetahui bahwa ia benar telah melakukan pernikahan.<sup>175</sup>

- 6) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar KUA yang menikahkan secara tidak resmi ?

AB menjelaskan:

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Wawancara dengan AB (Penghulu Fungsional) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 17 Maret 2020.



Dampaknya bagi penghulu yang menikahkan adalah tanggung jawab dengan Allah, nanti pasti akan dipertanyakan atas apa saja yang telah diperbuat dipersasikan termasuk menikahkan di bawah tangan. Mengapa melanggar aturan pemerintah, belum lagi yang berani menikahkan dari wali yang tidak ada namun berani menikahkan atas nama dirinya.<sup>176</sup>

- 7) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan untuk melegalkan pernikahannya di KUA ?

AB menjelaskan:

Kadang-kadang yang datang mengadu ke KUA, mengadukan bahwa anaknya sudah dua namun ia tidak punya buku nikah, kemaren nikahnya waktu ia umur 14 tahun, jadi suami saya takut makanya nikah di bawah tangan, maka kami pihak KUA menyarankan agar segera dulu menyelesaikan permohonan isbath nikah nya ke pengadilan dan jika di terima setelah itu kami pihak KUA baru akan memproses buku nikah nya.<sup>177</sup>

- 8) Apakah ada dasar hukum terkait kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

AB menjelaskan:

Apabila nikah di bawah tangan itu menjadikannya menelantarkan anak dan isterinya, maka sebenarnya nikah di bawah tangan itu didalam undang-undang kena pelanggaran, baik yang dinikahkan maupun yang menikahkan. Padahal dalam al-Qur'an diterangkan "taati lah Allah dan taati rasul dan pemimpin dari kalian" . Adapun jika pernikahan di bawah tangan tersebut dilakukan kepada anak SMP, pertama ia melanggar UU. Perlindungan Anak, yang kedua melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ketiga adalah melanggar UU. No 7 Tahun 1989 dan Melanggar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Sebenarnya nikah di bawah tangan memang sudah tidak dibolehkan sejak tahun 1946 oleh pemerintah. Didalam agama memang tidak ada larangan selagi memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari pernikannya namun hal ini kembali lagi pada tujuan

---

<sup>176</sup>*Ibid.*

<sup>177</sup>*Ibid.*

pernikahannya yang mana hukumnya ada 5, wajib sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Mengapa bisa menjadi haram, contohnya seperti menikah yang bertujuan menelantarkan anak orang dan anak yang akan dilahirkan isterinya.<sup>178</sup>

- 9) Apakah selama ini pernah diberikah penyuluhan terkait nikah di bawah tangan oleh pihak KUA ?

AB menjelaskan:

Jadi tugas penghulu itu juga memberikan konseling khusus catin, maslaah reproduksi, tentang kelahiran, masalah kesehatan bagaimana menyusui yang baik dan sebagaimana. Selanjutnya ada gladi ijab qabul yang baik itu seperti apa, siapa saja yang berhak menikahkan dan bukan penghulu, karena penghulu itu tugasnya mengawasi, mencatat, menyusun, melegalitasi, dan juga menguji syarat rukun daripada pelaksanaan akad nikah.<sup>179</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

AB bahwa Pernikahan di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka dari itu istilahnya sering pula disebut dengan nikah sirri, disebut dengan istilah nikah di bawah tangan karena mereka menikahnya tidak diketahui oleh negara, maka dari itu pernikahannya pun tidak sah menurut negara. Adapun faktor yang menjadikan terjadinya nikah di bawah tangan masa kini ialah karena sudah banyak terjadi pergaulan bebas di zaman milenial, akhirnya antara laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batasan yang kuat diantara keduanya baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dari faktor-faktor tersebut maka setelah itu memunculkan pula dampak lainnya, seperti

---

<sup>178</sup>*Ibid.*

<sup>179</sup>*Ibid.*

kenalan, dekat, kemudian mesra akhirnya kecelakaan maka memilih nikah di bawah tangan agar tidak ketahuan, belum lagi jika seorang laki-laki telah memiliki isteri lalu kemudian ketika ia main *handphone* melihat ada perempuan cantik dan menarik dan mau menjadi isteri keduanya, akhirnya hal ini pun berakhir dengan nikah di bawah tangan. Padahal, hukum pernikahan ini menurut negara tidaklah sah apabila tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

**e. Responden Kelima**

Nama : AN  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumatera Utara, 15 September 1964  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Pekerjaan : Penghulu Fungsional KUA Kec. Jekan Raya.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Jekan Raya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.10 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

AN menjelaskan:

Nikah di bawah tangan itu maksudnya dilakukan secara diam-diam karena ada yang disembunyikan makanya disebut sirri, kalau diatas tangan ada hitam diatas putihnya. Adapun nikah dibawah tangan ini hukumnya memang

boleh saja, karena memang didalam agama tidak melarang selagi memenuhi ketentuan dan syarat, tapi dampak yang diakibatkan dari nikah di bawah tangan itu yang hukumnya bisa menjadi haram, karena kadang dari nikah di bawah tangan ini suami menjadi beretindak seenaknya karena mereka merasa mereka tidak akan dituntut dan tidak ada perlindungan hukum.<sup>180</sup>

2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota

Palangka Raya ?

AN menjelaskan:

Jadi yang pertama adalah karena adanya di iming-imingi oleh penghulu kampung bahwa nikah di KUA itu repot, padahal tidak demikian karena apabila ada yang tidak mengerti akan kami ajari, apabila tidak bisa menulis bahkan kami tuliskan dibantu semuanya dan gratis.yang kedua karena banyaknya sudah yang hamil di luar nikah, dan sebenarnya untuk Indonesia ini rata-rata yaang sudah melakukan hubungan sebelum menikah 85% karena bisa dilihat dari raut wajah orang. Pernah dalam satu bulan itu menikahkan pasangan yang sudah hamil duluan umumnya anak pertamaitu adalah anak hamil diluar nikah. Yang ketiga adalah karna faktor bertambahnya usia nikah, sekarang sudah perubahannya bahwa batas minimal usia nikah itu adalah 19 tahun. Keempat biasanya ada saja yang perempuannya masih dalam masa iddah namun sudah ingin menikah.<sup>181</sup>

3) Apakah ada dasar hukum terkait kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

AN menjelaskan:

Sebenarnya ulama sepakat mengenai nikah di bawah tangan ini hukumnya sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tapi dengan akibat yang di timbulkan dari pernikahan di bawah tangan ini akhirnya bisa menjadi haram. Contohnya seperti suami bisa menelantarkan dan menyengsarakan anak dan isteri .<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup>Wawancara dengan AN (Penghulu Fungsional) di KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 12 Maret 2020.

<sup>181</sup>*Ibid.*

<sup>182</sup>*Ibid.*

4) Apa dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

AN menjelaskan:

Dampaknya tentu bagi anak yang kelak dilahirkan tidak bisa mendapat akta kelahiran maupun pendidikan dalam hal lainnya bisa banyak pula didapatkan dampaknya kepada anak. kemudian tidak bisa mengurus BPJS, tidak bisa menunaikan ibadah Haji/ Umroh dan banyak urusan yang akan disulitkan apabila ia menikah di bawah tangan seperti mau meminjam uang di Bank menginap di Hotel syariah juga tidak bisa dan keperluan buku nikah itu lebih berbagai macam akibat buruk yang akan didupatkannya.<sup>183</sup>

5) Apakah bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

AN menjelaskan:

Kalau kenyataannya di masyarakat memang banyak, namun saya sekedar tahu saja dan saya tidak ingin ikut campur dengan urusan mereka selain dari itu apabila saya ikut campur dan tiba-tiba melarang maka bisa jadi perkelahian, dimusuhi masyarakat maka saya memilih untuk menahan diri tidak ingin ikut campur selagi itu tidak merugikan saya.<sup>184</sup>

6) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan?

AN menjelaskan:

Kebiasaan dari nikah di bawah tangan ini memang lengkap seperti biasanya juga, maksudnya rukun dan syaratnya lengkap terepenuhi secara agama, namun kadang ada saja yang tidak berhak menjadi wali bisa menjadi, dan apabila yang seperti ini maka menjadi tidak sah pernikahannya karena yang mewalikannya tidak berhak, contohnya seperti diwalikan oleh wali hakim padahal wali nasab nya ada saja, kemudian lagi adapun yang berhak menjadi wali hakim adalah mereka yang diberikan hak oleh kementrian agama, selain dari itu tidak ada hak, apalagi yang bapaknya jelas ada, maka disini proses pernikahannya menjadi tidak sah.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*



- 7) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan untuk mendapatkan buku Nikah dari KUA?

AN menjelaskan:

Jadi apabila mereka yang sebelumnya menikah dibawah tangan ini ingin mendapatkan buku nikah, maka kami akan mengarahkan untuk ke pengadilan terlebih dahulu, dan apabila isbath nya telah selesai maka sebenarnya kami bertugas untuk mengeluarkan buku nikah, namun kami tidak melakukan itu walaupun sudah diakui negara akan tetap kami nikahkan ulang, agar lebih terjamin dan dengan kehati-hatian, karna kami tidak berani ikut menanggung resiko apabila ternyata ada kesalahan dalam rukun ataupun syarat dalam pernikahannya sebelumnya tadi.<sup>186</sup>

- 8) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar KUA yang menikahkan secara tidak resmi ?

AN menjelaskan:

Dulu waktu saya menjadi Kepala KUA tahun 1999, ada penghulu kampung yang di tangkap, dan yang dia nikahkan adalah polisi militer, kenapa dia di tangkap karena membuatkan data yang tidak legal terhadap mempelai sehingga pada waktu itu dia di tangkap. Bahkan kadang-kadang ada saja penghulu yang menikahkan namun kurang memperhatikan dari rukun syaratnya, karena ada saja orang yang minta nikahkan itu membawa wali palsu, dan jelas apabila ini tidak diperhatikan akan menjadi hubungan yang haram magi mereka yang menikah, karena tidak sah menurut agama apalagi menurut undang-undang.<sup>187</sup>

- 9) Apakah selama ini pernah diberikahan penyuluhan terkait nikah di bawah tangan oleh pihak KUA ?

AN menjelaskan:

Iya setiap kali ada pernikahan selalu di sampaikan. namanya bimbingan pra nikah, maka kami pihak KUA terus menyampaikan pentingnya buku nikah, ruginya menikah di bawah tangan, dampaknya terhadap anak dan

---

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*



banyak sekali dampaknya dari yang saya sebutkan ini, jadi kami jelaskan kepada mereka dan disamping itu setiap kali saya mengisi acara isra' miraj saya selalu sampaikan bahwa pentingnya buku menikah ini.<sup>188</sup>

10) Apakah bapak merekomendasikan nikah di bawah tangan ?

AN menjelaskan:

Tentu saja tidak, apabila kami berani menikahkan orang yang tidak berbuku nikah maka kami bisa dikenakan sanksi negara. Pernah ada sepupu isteri saya minta nikahkan, dan banyak juga masyarakat yang lain tapi saya tidak berani, selain dari menentang hukum negara maka juga akan diberhentikan.<sup>189</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

AN bahwa Pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam maka dari itu disebut dengan sirri. Penyebab faktor nikah di bawah tangan ini ada beberapa, yang diantaranya adalah karena adanya oknum calo yang tidak bertanggung jawab dengan isu tidak benar terkait menikah di KUA yang di sampaikan, hamil diluar nikah dan hal ini sudah banyak sekali terjadi, dan karena usia yang belum cukup untuk menikah namun tidak mau mengurus dispensasi perkawinan ke pengadilan sehingga dari semua faktor yang ada ini masyarakat justru merasa nikah di bawah tangan itu lebih mudah padahal dampaknya yang akan didapatkan sangat merugikan seperti akan disulitkan dalam berurusan dan anak pun tidak bisa mendapat akta kelahirannya. Walaupun ulama telah sepakat nikah di bawah tangan ini hukumnya sah selagi terpenuhi rukun dan syaratnya namun jika

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*

dikaitkan kepada dampak yang akan ditimbulkan dari nikah di bawah tangan ini maka hukum nya juga bisa menjadi haram.

**f. Responden Keenam**

Nama : N

Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 28 September 1975

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : PNS Jabatan Hakim

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 14.20 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

N menjelaskan:

Nikah di bawah tangan ini kalau secara agama memang tidak ada larangan, namun secara hukum negara tidak membenarkan yang memang sudah tercantum dalam hukum positif, namun ada saja masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan hal itu, sehingga dia berfikir apabila sudah menikah walau dengan penghulu kampung sudah menjadi pasangan yang sah padahal apabila ia perempuan itu akan lebih banyak merugikan dia, memang keduanya akan di sulitkan daam berurusan namun yang lebih dirugikan adalah perempuan.<sup>190</sup>

2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

---

<sup>190</sup>Wawancara dengan N (Hakim) di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 Maret 2020.

N menjelaskan:

Yang pertama saat mereka ingin menikah usia mereka masih belum mencukupi batas minimal usia menikah dalam undang-undang, misalnya usia mereka masih 16 Tahun sedangkan sekarang di dalam undang-undang baik laki-laki maupun perempuan batas usianya adalah 19 tahun. Ada yang karna akses menuju KUA nya sulit, pengaruh jarak tersebut yang menyulitkan mereka menikah di KUA, sehingga mereka terpaksa menikah di bawah tangan. Yang ketiga karna malas mengurus administrasi meskipun dari segi usia sebenarnya sudah mencukupi tapi karena rasa malas tersebut menjadikan mereka nikah di bawah tangan.<sup>191</sup>

3) Apa dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

N menjelaskan:

Dampaknya pernikahan mereka tidak diakui oleh Negara, karena dari diberlangsungkannya pernikahan tersebut sudah jelas menyalahi undang-undang mengenai aturan yang menerangkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga apabila ada kesulitan-kesulitan dalam pernikahannya seperti misalnya suami berbuat sewenang-wenang kepada isteri, meninggalkan isteri, atau apapun itu dari pernikahannya ia tidak mendapat perlindungan dari negara maka disini sebenarnya yang paling dirugikan adalah pihak isteri. Selanjutnya adalah dari segi kewarisan jika terjadi sengketa dan ada gugatan oleh pengadilan tidak dianggap sebagai ahli waris, karena tidak ada bukti autentik yang dimilikinya sehingga ia dalam hukum positif tetap bukan ahli waris.<sup>192</sup>

4) Apa dasar hukum hukum terkait dari nikah di bawah tangan ?

N menjelaskan :

Mengenai dasar hukum nya ini jelas undang-undang tidak membolehkan nikah di bawah tangan ini, dari sebutannya saja sudah tidak pas, tidak sesuai dengan ketentuan negara sebutan “di bawah tangan” artinya ada sesuatu yang di rahasiakan dari negara, maka walaupun ketentuan dan syaratnya dipenuhi namun tidak sesuai dengan aturan

---

<sup>191</sup>*Ibid.*

<sup>192</sup>*Ibid.*

negara dalam pelaksanaannya atau tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang maka tetap tidak sah hal ini terkait dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Mengenai aturan dalam agamanya hakim tidak berwenang menjawabnya.<sup>193</sup>

- 5) Apakah bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

N menjelaskan:

Tidak pernah menghadiri, dan saya juga memang tidak berkenan untuk menghadirinya, karena apabila menghadirinya pun kami memang dilarang jadi Sampai sekarang saya tidak pernah karna sebenarnya perbuatan mereka itu kan tidak di benarkan oleh Negara, menyalahi aturan Negara, tidak mentaati aturan artinya apabila saya menghadirinya kesannya seperti mendukung dan membenarkan perbuatan tersebut walaupun memang secara agama tidak ada aturan yang melarang selagi terpenuhi rukun dan syarat namun karena negara tidak membenarkan maka saya ingin ikut menghadiri karna belum dibenarkan oleh negara.<sup>194</sup>

- 6) Apakah bapak mengetahui bagaimana kebiasaan pernikahan di bawah tangan ?

N menjelaskan:

Mengenai prosesnya dari kebiasaan ini pun saya tidak mengetahuinya, namun jika benar itu dilakukan secara agama dan dinyatakan sah menurut syariat islam, mungkin tidak ada beda dari pernikahan pada umumnya, yang membedakan itu dari penghulu yang sebenarnya tidak ada wewenang untuk menikahkan, artinya meskipun ia sesuai secara agama, tapi menyalahi aturan hukum positif.<sup>195</sup>

- 7) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar kampung yang menikahkan secara tidak resmi ?

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

N menjelaskan:

Jika dilihat dari hukum positif, sebenarnya ada sanksi bagi mereka yang menikahkan namun ini dulu ditetapkan yang seperti ini, sekarang sepertinya tidak begitu berjalan efektif keberlakuan aturan tersebut.

- 8) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan dalam mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama ?

N menjelaskan:

Di dalam pasal 7 KHI bahwasanya bisa menerima yang apabila ia nikah di bawah tangan dan tidak terikat dengan pernikahan lain dengan alasan malas mengurus administrasi sedangkan rukun syarat dan umurnya sudah sesuai maka kami kabulkan saja yang seperti itu. Sebab sebenarnya didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang bisa dinisbatkan hanya sebelum UU. Perkawinan ini berlaku. Namun selagi rukun dan persyaratan nya sudah bisa terpenuhi oleh mereka artinya tidak ada halangan bagi mereka maka akan kami terima, selagi pernikahan nya tidak menyalahi syariat seperti misal pernikahan yang dilakukan memang sudah habis masa iddah, wali dan saksinya pun sudah sesuai dengan syariat maka ajukkan saja ke pengadilan nanti akan di arahkan persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi, yang jelas ia diminta untuk membawa wali dan saksi dari pernikahannya, kemudian pada saat persidangan saksi tersebut di sumpah baru dimintai keterangan.<sup>196</sup>

- 9) Apakah semua permohonan isbath nikah bisa diterima oleh pihak pengadilan Agama ?

N menjelaskan:

Permohonan isbath nikah akan diterima apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, maka tidak ada halangan untuk mereka. Namun kadang-kadang mereka yang mengajukan isbath nikah tersebut dalam proses pernikahannya ternyata masih dalam masa iddah, masih terikat dengan pernikahan sebelumnya baik suami maupun isteri, wali nya yang menikahkan bukan wali yang berhak misalnya wali hakim

---

<sup>196</sup>*Ibid.*



dan wali hakimnya ini tidak diberikan wewenang oleh negara, maka yang seperti ini kami tolak.

10) Apakah pencatatan secara tidak resmi dari pernikahan di bawah tangan bisa menjadi alat bukti di Pengadilan Agama ?

N menjelaskan:

Kadang ketika mereka mengajukan permohonan isbath di pengadilan mereka membawa buku surat keterangan suami isteri yang mereka lampirkan, namun karena yang membuat surat tersebut bukan pejabat yang berwenang bukan pihak KUA maka kami kesampingkan, dan kami pertimbangkan lagi bukti tersebut. Adapun yang paling diutamakan adalah saksinya yang memang sudah di sumpah dan memberi keterangan mengenai pernikahan tersebut.<sup>197</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

N bahwa Pernikahan di bawah tangan ini tidak ada larangan secara agama yang artinya memang di bolehkan, namun negara tidak membenarkan karena negara memiliki aturan lain yakni didalam UU. Perkawinan 1974 bahwa selain dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah, pernikahan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (KUA) selain dari itu maka tetap tidak sah oleh negara dan pernikahannya tidak terdaftar. Beberapa dari penyebabnya adalah karena adanya pasangan yang ingin menikah namun usianya belum mencukupi, akses menuju KUA juga cukup jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menujunya, dan karena malas berurusan tidak ingin repot akhirnya mengambil jalan pintas dengan menikah di bawah tangan. Dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan ini pun ada beberapa yang

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

diantaranya adalah pernikahannya tidak dianggap sah maka tidak bisa mengadukan apapun kepada pengadilan apabila terjadi hal-hal yang merugikannya dari perkawinan tersebut.

**g. Responden Ketujuh**

Nama : BHR

Tempat, Tanggal Lahir : Alabio, 05 Oktober 1982

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Wiraswasta

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 Maret 2020 di rumah penghulu kampung pada pukul 18.10 WIB sampai dengan 18.45 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

BHR menjelaskan:

Mengenai nikah di bawah tangan ini, saya tidak bertentangan karena didalam Islam memang tidak ada aturan yang mengharuskan nikah itu di catat, selagi mereka meminta untuk di nikahkan dan memiliki rukun dan syarat yang lengkap, saya bersedia saja membantu namun sudah saya jelaskan jika minta nikahkan melalui saya maka tidak akan bisa mendapat buku nikah, dan mereka setuju saja akan hal itu. Disamping itu juga saya jelaskan bahwa apabila memang dikemudian hari ingin mendapatkan buku nikah maka harus isbath ke pengadilan.<sup>198</sup>

2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

BHR menjelaskan:

---

<sup>198</sup>Wawancara dengan BHR (Penghulu Kampung) di Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 Maret 2020.

Biasanya dari mereka yang ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya di dalam agama, semuanya sudah lengkap namun dalam hukum negara belum mencukupi seperti halnya usia, kemudian yang kedua adalah dalam peristiwa yang sudah dinyatakan bercerainya suami isteri secara agama seperti adanya surat cerai di bawah tangan namun di pengadilan prosesnya belum selesai, sedangkan ia sudah ingin menikah maka mereka mau tidak mau menikah di bawah tangan. Kemudian yang ketiga adalah faktor karna kecelakaan dan ini adalah rata-rata dari penyebab mereka yang minta nikahkan pada saya, ketika keluarga telah sepakat namun ia telah hamil maka saran dari keluarganya untuk menikah di bawah tangan, kemudian ada pula yang menjadi penyebabnya adalah ketika mereka yang KTP masih diluar palangka raya sedangkan menikahnya ingin di palangka raya, sementara antara masing-masing keluarga sudah sepakat menentukan tanggal dan persiapan sebagainya maka mereka menikah di bawah tangan karena apabila di KUA mereka harus mengurus KTP nya terlebih dahulu.<sup>199</sup>

3) Bagaimana dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

BHR menjelaskan:

Dampaknya yang jelas ia tidak bisa mendapat buku nikah, namun yang jelas sudah saya beritahu kalau memang dihari kemudian mau memiliki buku nikah maka harus isbath dahulu ke pengadilan, kalau dulu memang ada nikah massal untuk mereka yang ingin nikahnya menjadi legal bahkan mereka pun akan mendapat uang sebanyak 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) karna sekarang sudah ditiadakan maka harus isbath ke pengadilan saja. Kemudian selain itu apabila dikemudian hari ada perbuatan tidak menyenangkan dari suaminya, sang isteri tidak bisa menuntut apapun untuk mendapat keadilan bagi dirinya karena status pernikahannya pun tidak terdaftar dalam Negara, cuman kadang apabila masalah dalam rumah tangga mereka mereka adukan kerumah saya dengan artinya keduanya yang datang dan tidak hanya salah satu pihak saja maka biasanya bisa saja saya coba damaikan, kecuali seperti ditinggal prgi oleh suaminya maka yang seperti itu saya juga tidak bisa bantu.<sup>200</sup>

4) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

---

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> *Ibid.*

BHR menjelaskan:

Kalau Untuk tempat menikahnya bisa di rumah saya bisa dirumahnya atau tempat yang mereka tentukan, kemudian mengenai persyaratan administrasi nya kalau nikah di bawah tangan ini tidak ada, apabila sudah lengkap rukun dan syaratnya terpenuhi orangnya sudah lengkap bisa di nikahkan, kemudian akan dibuatkan surat pernyataan di bawah materai, dan apabila kemudian hari ingin memiliki buku nikah maka ia harus ke pengadilan dengan buku nikah.<sup>201</sup>

- 5) Apakah bapak pernah menolak dari mereka yang meminta untuk menikah di bawah tangan ?

BHR menjelaskan:

Kalau yang saya tolak itu itu juga banyak, mengapa demikian karena kadang-kadang ketika mereka meminta nikahkan lalu saya tanyakan alasan mengapa ia ingin menikah, jawabnya karena ia ditinggalkan begitu saja namun tidak ada ucapan kata cerai, karna yang demikian itu statusnya masih gantung walaupun ditinggalkannya sepuluh tahun sekalipun saya tidak berani menikahkan jika alasannya seperti ini.<sup>202</sup>

- 6) Apakah ada dasar hukum terkait kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

BHR menjelaskan:

Memang nikah ini ada perbedaan hukumnya antara islam dengan negara mengenai status keabsahannya, kalau menurut negara apabila nikahnya tidak tercatat di KUA tidak dianggap sah, sedangkan menurut agama selagi rukun syaratnya lengkap terpenuhi maka dikatakan sah sesuai hadits Nabi “tidaklah sah nikah itu kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil”, yang mana hadits ini terdapat dalam rukun nikahnya, apabila mereka yang ingin minta nikahkan ini tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut maka saya tidak berani juga menikahkan.

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> *Ibid.*

- 7) Apa yang menjadi alasan bapak menikahkan secara bawah tangan ?

BHR menjelaskan:

Memang saya pernah menikahkan di bawah tangan, dan itupun kadang-kadang dari pihak KUA yang merekomendasikan, kadang-kadang saya juga kesana, namun yang jelas rukun dan syaratnya harus terpenuhi, lengkap orangnya secara Agama baru saya mau menikahkan.<sup>203</sup>

- 8) Adakah pencatatan dari pernikahan di bawah tangan ?

BHR menjelaskan:

Memang ada surat pertanyaan untuk mereka saya berikan, dan itu mereka yang isi jadi saya disitu sifatnya hanya mengetahui, karna yang menikahkan adalah walinya, saya hanya menuntunnya saja, kecuali walinya mneyerahkan kewaliannya kepada saya, lalu kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh wali nya dan saksi yang kemudian juga di tanda tangani oleh RT. Adapun surat nya ini sudah ada format nya di buatakan, dalam bentuk ketikan jadi mereka tinggal langsung mengisi nya saja.

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

BHR bahwa Pernikahan di bawah tangan ini tidak bertentangan dengan agama selagi memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya namun memang benar ini tidak cukup berlaku bagi negara karena kedua aturannya memang ada memiliki perbedaan dalam hal ini. Adapun yang menjadi faktor nikah di bawah tangan yaitu diantaranya karena tidak bisa melengkapi administrasi, masih terikat perikat dan aktaa cerainya belum keluar, serta karena terlanjur hamil sebelum menikah lalu dari adanya faktor-faktor tersebut mereka merasa tidak mampu menikah di KUA dengan

---

<sup>203</sup> *Ibid.*



alasan karena sulit, karena malu karena tidak ingin repot dan ingin cepat. Padahal, jika mereka mengetahui dan mengingat dengan benar serta memikirkan dampak yang akan di dapatkan yang lebih mengarah kepada merugikan seperti tidak bisa mendapatkan buku nikah, tidak bisa mendapatkan perlindungan negara harusnya mereka tidak menikah di bawah tangan karena kerugiannya mereka juga yang akan menanggungnya.

#### **h. Responden Kedelapan**

Nama : SA  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 02 Desember 1982  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 Maret 2020 di rumah salah satu masyarakat yang status pernikahannya tercatat di KUA (Nikah Resmi) pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 15.50 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Bagaimana pendapat saudara tentang nikah di bawah tangan ?**

SA menjelaskan:

Nikah di bawah tangan yang saya ketahui adalah nikah yang sah secara agama, namun tidak terdaftar dalam dokumen negara. Sebenarnya tidak ada perbedaannya dengan menikah pada umumnya, hanya saja karena pernikahannya tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang bukan pihak KUA maka pernikahannya tidak dianggap sah karena tidak terdaftar dalam dokumen negara. Disamping itu akan ada begitu banyak dampak yang akan

menyulitkan pasangan yang menikah di bawah tangan tersebut.<sup>204</sup>

2) Apa alasan saudara ingin menikah resmi ?

SA menjelaskan:

Karena ingin memperoleh buku nikah, kemudian agar mendapat perlindungan negara apabila dikemudian hari ingin menuntut hal yang merugikan saya dari pernikahan, jadi dari dialksanakannya pernikahan resmi ini bisa menjadikan suami agar tidak mudah berbuat sewenang-wenang, kemudian lagi alasan mengapa saya ingin menikah resmi adalah jika suatu hari ingin merantau ke kota lain bersama suami lalu disana ingin menyewa sebuah rumah atau menginap di penginapa dan ditanyakan tentang buku nikahnya maka bisa membuktikan karena nikahnya memang resmi dilakukan di KUA.<sup>205</sup>

3) Apakah saudara mengetahui faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

SA menjelaskan:

Yang saya tahu karena faktor perselingkuhan, karena ingin memiliki isteri simpanan dan tanpa sepengetahuan isterinya maka ia memilih untuk menikah di bawah tangan dan menurut saya ini adalah alasan yang termasuk sangat banyak jika dilihat dari faktor penyebab nikah di bawah tangan pada umumnya.<sup>206</sup>

4) Apakah saudara mengetahui dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

SA menjelaskan:

Dampaknya yang pertama tidak bisa membuat Kartu Keluarga, karena yang saya tahu sekarang apabila ingin membuat kartu keluarga harus melampirkan buku nikah, begitu pula halnya dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan tersebut, pembuatan akta sebenarnya memang dari dulu tidak bisa apabila

---

<sup>204</sup> Wawancara dengan SA (masyarakat yang menikah resmi) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

pernikahannya dibawah tangan yang saya ketahui, namun kemarin tahun 2019 sewaktu saya ingin mengubah nama anak saya di akta kelahiran karena pada namanya ada penulisan yang keliru maka yang menjadi lampirannya adalah karu keluarga dan buku nikah, jika membuat kartu keluarganya saja tidak bisa maka bagaimana bisa membuat akta kelahiran. Lalu kemudian yang kedua tidak bisa mendapat perlindungan negara dalam pernikahannya, maka apabila dalam hubungan suami isteri tersebut dan sang suami berbuat seenaknya terhadap sang isteri, isterinya tidak ada kekuatan untuk mengadukan ke pengadilan untuk menuntut hak bagi dirinya dalam pernikahannya.<sup>207</sup>

- 5) Apakah saudara pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

SA menjelaskan:

Saya tidak pernah mengetahui secara langsung, karena biasanya pernikahan di bawah tangan ini memang pernikahan yang tertutup, kecuali apabila akad nikah mereka yang dilakukan di KUA, selain dari itu di keluarga saya juga tidak ada yang menikah di bawah tangan, sedangkan biasanya nikah di bawah tangan ini hanya dihadiri oleh pihak yang berkaitan yang menjadi persyaratan pernikahannya.<sup>208</sup>

- 6) Apakah saudara mengetahui bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan?

SA menjelaskan:

Kalau prosesnya itu yang saya tahu memang lebih cepat, karena mereka tidak perlu mengurus administrasi. Apabila sudah terlengkapi rukun dan syaratnya maka mereka sudah bisa langsung menikah, meskipun misalnya umur mereka belum masuk batas minimum boleh menikah, namun karena meeka menikah di bawah tangan mmenuhi atau tidak memenuhi syarat boleh menikah atau harus dispensasi dulu untuk pernikahannya itu tidak ada pengaruhnya, karena ia tidak menikah di KUA melainkan kepada penghulu kampung/ penghulu yang tidak bekerja di KUA.<sup>209</sup>

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*

- 7) Apakah saudara merekomendasikan keluarga kerabat saudara untuk menikah di bawah tangan?

SA menjelaskan:

Yang jelas pastinya tentu tidak, karena dari yang saya telah ketahui nikah di bawah tangan ini banyak sekali kerugiannya, memang benar prosesnya cepat, tapi jika dalam waktu yang telah ditetapkan kesepakatan selagi belum tersebar undangan bisa lebih baik di musyawarahkan kembali daripada dikemudian hari nantinya menyesal karena akan memperoleh banyak kesulitan. Harapan saya semoga aja keluarga atau kerabat tidak sampai mengalami yang seperti hal kecelakaan dalam hubungan artinya tidak sampai hamil diluar nikah dan uat malu keluarga lalu mau tidak mau nikah di bawah tangan. Semoga jangan sampai ada yang seperti itu.<sup>210</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

SA bahwa Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang sah secara agama namun pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam dokumen negara. Pada umumnya yang diketahui oleh subyek faktor terjadinya nikah di bawah tangan adalah karena perselingkuhan atau telah memiliki isteri simpanan dan ingin menikah secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan isterinya yang ada sehingga memilih menikah di bawah tangan. Padahal pernikahan di bawah tangan ini menjadikan pasangan tersebut tidak bisa memiliki Kartu Keluarga yang tentu saja ini akan sangat penting, maka dari itu subyek SA sangat tmenyarankan agar masyarakat menikah resmi karenamenikah di bawah tangan tidak bisa mendapat perlindungan negara.

---

<sup>210</sup>*Ibid.*

### i. Responden Kesembilan

Nama : SR

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 21 Pebruari 1982

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 Maret 2020 di rumah salah satu masyarakat yang status pernikahannya tidak tercatat di KUA (Nikah dibawah Tangan) pada pukul 15.53 WIB sampai dengan 16.18 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Bagaimana pendapat saudara tentang nikah di bawah tangan ?

SR menjelaskan:

Sebernarnya saya tidak tahu banyak mengenai nikah di bawah tangan ini, karena latar belakang pendidikan saya juga hanya sampai SD, saya tidak mengetahui dampaknya akan menyulitkan saya dan anak sesudahnya, waktu itu saya berfikir jika keluarga menyarankan sesuatu maka itu saya anggap baik dan saya iya kan, sekilias yang saya tahu hanya tidak bisa membuat akta kelahiran anak karena hanya ini pengalaman saya, jadi kalau sekolah anak itu lampirannya diganti dengan lampiran dari bidan.<sup>211</sup>

#### 2) Apa yang menjadi alasan saudara memilih tidak menikah di KUA?

SR menjelaskan:

Waktu itu karena disarankan oleh keluarga, kebetulan saya tinggalnya dulu waktu muda ikut bibi saya, dan beliau yang menyarankan untuk menikah di penghulu kampung saja, namun kebetulan disisi lain memang KTP nya suami saya itu hilang dan tidak ada biaya untuk mengurus dan jika menikah di penghulu kampung tempat bibi saya waktu itu

---

<sup>211</sup>Wawancara dengan SR (masyarakat yang menikah di bawah tangan) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.



tidak beliau tidak mempermasalahkan walau tidak ada melampirkan KTP, jika di KUA kan harus lengkap, jadi meskipun di KUA pun saya tidak bisa.<sup>212</sup>

- 3) Apa saja dampak yang saudara dapatkan dalam pernikahan di bawah tangan?

SR menjelaskan:

Dampaknya tidak bisa memiliki buku nikah, tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak, dan kebetulan anak saya sudah dua dan keduanya menjadi tidak bisa memiliki akta, saya ini orangnya memang banyak kurang tahu jadi segalanya dulu saya serahkan ke keluarga termasuk urusan pernikahan saya dengan suami saya ini, dan pada akhirnya saya menyadari bahawa nikah di bawah tangan ini menyulitkan saya dikemudian hari setelahnya.<sup>213</sup>

- 4) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

SR menjelaskan:

Prosesnya sederhana saja hanya dihadiri keluarga, seperti walinya itu bapak kandung saya sendiri, kemudian kedua saksi nya pun adalah paman saya, jadi tidak ada acara perayaan yang mewah itu tidak ada, karena uang nya pun kami tidak ada, kemudian di beri surat pernyataan dan di tanda tangani oleh wali saksi saya dan penghulu yang menikahkan juga diketahui oleh RT.<sup>214</sup>

- 5) Apakah selama ini pernah mengajukan permohonan isbath nikah di pengadilan?

SR menjelaskan:

Belum pernah, karena saya merasa tidak ada biaya jadi saya pasrah saja dengan status saya sekarang. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya berurusan diuntuk isbath nikah ini walaupun pastinya saya ingin melegalkan pernikahan saya, jika saja sekarang masih ada nikah massal saya ingin sekali mendaftar namun sayangnya sudah tidak ada lagi.<sup>215</sup>

---

<sup>212</sup>*Ibid.*

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>*Ibid.*

<sup>215</sup>*Ibid.*

- 6) Apakah saudara merekomendasikan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan ?

SR menjelaskan:

Tidak, saya ingin anak saya menikah di KUA saja biar tidak seperti saya, tentunya saya sebagai ibu dari anak menginginkan yang terbaik bagi anak saya, dan adaapun menikah di KUA menjadikan dia tidak memiliki pengalaman seperti saya, tidak menyulitkan anaknya di kemudian hari, juga termasuk dia dan pasangannya kelak, karena khawatirnya ketika dia ingin bekerja nanti dan memerlukan akta kemudian ia tertolak karna tidak mampu memberikan lampiran tersebut.<sup>216</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

SR bahwa Pernikahan di bawah tangan tidak begitu dimengerti olehnya sehingga hal ini berpengaruh pula mengapa subyek SR menikah di bawah tangan, selain itu menikah di bawah tangan ini adalah saran dari keluarganya, maka subyek SR berfikir bahwa saran dari keluarga nya adalah yang terbaik jikapun itu menikah dengan penghulu kampung, asalkan mampu menjadi pasangan yang sah sudah cukup baginya. Seiring berjalannya waktu subyek SR akhirnya merasakan dampak dari pernikahan di bawah tangannya itu menyulitkannya untuk membuatka anak bagi anaknya. Proses pernikahan di bawah tangan dengan pernikahan di KUA memang tidak ada bedanya seperti adanya wali dan kedua saksi yang membedakan adalah nikahnya yang tidak tercatat di KUA.

---

<sup>216</sup>*Ibid.*

#### j. Responden Kesepuluh

Nama : FA

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkoh, 19 April 1984

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 Maret 2020 di rumah salah satu masyarakat yang status pernikahannya tercatat di KUA (Nikah Resmi) pada pukul 16.20 WIB sampai dengan 16.40 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Bagaimana pendapat saudara tentang nikah di bawah tangan ?

FA menjelaskan:

Menurut saya tidak ada bedanya nikah di bawah tangan dengan nikah di KUA, yang membedakan hanya pencatatannya yaitu yang satu terdaftar di dalam dokumen negara (nikah resmi) yang satunya dianggap tidak sah karena tidak di daftarkan di KUA (nikah di bawah tangan), mengenai prosesnya memang lebih mudah karena tidak banyak yang diurus, makanya orang yang menikah dari pernikahannya yang kedua banyak menikah di bawah tangan, karena ia tidak perlu meminta persetujuan isteri atau mengurus perceraian dengan isterinya terlebih dahulu jika memang sudah pisah.<sup>217</sup>

##### 2) Apa alasan saudara ingin menikah resmi ?

FA menjelaskan:

Karena saran dari pihak keluarga biar kedepannya jika mau berurusan akan mudah, mau mengurus akta mudah, mau mengurus berbagai hal yang sebagaimana terjadi biasanya

---

<sup>217</sup>Wawancara dengan FA (masyarakat yang menikah resmi) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

dalam berurusan harus melampirkan kartu keluarga, bahkan juga buku nikah. Apabila misalkan terjadi hal yang sewenang-wenang dari suami bisa minta keadilan dengan memohon ke pengadilan, pengadilan bisa menerima karena pernikahan yang memang terdaftar di negara, berbeda jika nikah di bawah tangan walau bagaimanapun walau misal seorang isteri di sia-siakan seperti apapun baik itu ditinggalkan suami tanpa kabar atau suaminya menikah lagi ia tidak bisa mendapat perlindungan negara.<sup>218</sup>

- 3) Apakah saudara mengetahui faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

FA menjelaskan:

Diantara banyaknya karena selingkuh, maka karena ia tidak ingin diketahui punya isteri simpanan maka nikahnya dilakukan secara tertutup, kemudian faktor kurangnya mengetahui akan pengaruh buruk yang bisa didapatkan seseorang apabila ia menikah di bawah tangan dikemudian harinya, yang ketiga juga faktor usia, jika dulu tidak ada masalah menikah muda karena tidak ada batasan usia dalam peraturan perundang-undangan, makanya orang dulu banyak yang menikah muda, namun sekarang sudah di batasi, sedangkan ada yang orang tuanya sudah ingin mengawinkan anaknya karena alasan-alasan tertentu baik itu karena kecelakaan, tanggal yang sudah ditetapkan, uang yang pas-pasan, yang mana ia merasa apabila mengawinkan anaknya maka anaknya tidak lagi menjadi tanggungan dirinya.<sup>219</sup>

- 4) Apakah saudara mengetahui dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

FA menjelaskan:

Yang jelas ia tidak bisa mendapat buku nikah, karena menikahnya bukan di KUA artinya dengan penghulu kampung maka mungkin yang didapatkan oleh pasangan nikah di bawah tangan dari bukti pernikahannya hanya selebaran surat pernyataan dan ituupun tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara, lalu ia tidak bisa buat akta untuk anak, yang mana setahu sepengalaman saya

---

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

membuat akta kelahiran anak harus melampirkan akta pernikahan, selanjutnya ia juga tidak mendapat perlindungan negara apabila sewaktu waktu di hari kedepannya setelah pernikahannya terjadi hal sewenang-wenang dari suaminya.<sup>220</sup>

- 5) Apakah saudara mengetahui praktik nikah di bawah tangan di kota

Palangka Raya ?

FA menjelaskan:

Kalau mengetahuinya saya tahu, mengingat karena memang masih banyaknya laki-laki yang menikah diam-diam di palangka raya ini dari mereka yang sebenarnya sudah beristri, maka tentunya karena pernikahan itu diam-diam sering disebut dengan pernikahan sirri/ pernikahan di bawah tangan, kemudian mereka yang umurnya belum sampai sedangkan misalnya mereka sudah terlanjur hamil duluan maka kebanyakan dari mereka biasanya banyak memilih untuk menikah di bawah tangan yang di samping itu juga kesepakatan dari masing-masing keluarga. Mungkin itu saja yang saya tahu, selebihnya mungkin masih banyak namun karena saya tidak tahu banyak mengetahui dari praktik yang terjadi maka hanya itu saja yang bisa saya sebutkan.<sup>221</sup>

- 6) Apakah saudara mengetahui bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan?

FA menjelaskan:

Untuk prosesnya saya hanya mengetahui sekedarnya saja, karena setahu saya pernikahannya juga tidak ada perayaan, tertutup dan di sembunyikan maka untuk diketahui banyak orang rasanya tidak mungkin, kecuali orang-orang dekat mereka dan yang menghadiri sebagai wali dan saksinya. Selebihnya saya kurang tahu karena saya tidak melihat secara langsung.<sup>222</sup>

- 7) Apakah saudara merekomendasikan keluarga serta kerabat saudara untuk menikah di bawah tangan ?

---

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*



FA menjelaskan:

Saya tidak akan menyarankan keluarga kerabat saya untuk menikah di bawah tangan ataupun menyepakatinya juga tidak, mengingat betapa menyulitkannya apabila seseorang telah terlanjur menikah di bawah tangan yang bahkan apabila ia ingin melegalkan pernikahannya dikemudian hari pun harus mengurus permohonan isbath di pengadilan, bahkan yang saya dengar tidak semua permohonannya diterima, menurut saya ini benar-benaar pilihan yang merugikan.<sup>223</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

FA bahwa Pernikahan di bawah tangan dengan pernikahan di KUA tidak ada bedanya, yang membedakan adalah statusnya di negara yang tidak dianggap sah jika tidak dilakukan di KUA. Walaupun begitu subyek FA tetap menikah resmi karena ingin mendapatkan buku nikah, mudah dalam berurusan serta mendapat perlindungan dari negara, karena apabila menikah di bawah tangan beberapa hal yang telah disebutkan tersebut tidak di dapatkan apabila pernikahannya di bawah tangan. Adapun faktor yang bisa menjadikan terjadinya pernikahan di bawah tangan ini di antaranya karena faktor kurangnya wawasan, umur yang belum cukup, perselingkuhan serta keinginan pihak keluarga/ orang tua yang sudah ingin lepas tanggungan terhadap anaknya.

#### **k. Responden Kesebelas**

Nama : M

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 Maret 1969

Pendidikan Terakhir : SD

---

<sup>223</sup>*Ibid.*

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

pada tanggal 12 Maret 2020 di rumah salah satu masyarakat yang status pernikahannya tidak tercatat di KUA (Nikah dibawah Tangan) pada pukul 16.43 WIB sampai dengan 17.12 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut

1) Apa yang menjadi alasan saudara memilih tidak menikah di KUA?

M menjelaskan:

Karena jarak rumah saya menuju KUA sangat jauh, bahkan karena sangat jauhnya memerlukan waktu seharian penuh untuk menuju kesana, maka saya dan suami saya waktu itu memutuskan untuk nikah di penghulu kampung saja yang jaraknya lebih dekat. Selain itu tidak ada alasan lain hanya karena jarak itu saja, namun saya waktu itu masih tidak mengetahui dampak yang akan merugikan diri saya dikemudian hari.<sup>224</sup>

2) Apakah saudara memiliki anak dari pernikahan ini ?

M menjelaskan:

Saya tidak memiliki anak dari pernikahan ini, karena pernikahan saya hanya berlangsung 2 bulan, jadi tidak ada anak dan saya bersyukur tidak memiliki anak dari dia, karena setelah 2 bulan berlangsungnya pernikahan, saya ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan apapun.<sup>225</sup>

3) Apa Dampak yang saudara alami setelah menikah di bawah tangan ?

M menjelaskan:

Dampaknya saya ditinggalkan suami saya dan saya tidak bisa menuntut karena pernikahan saya tidak di lakukan di KUA, akhirnya perlindungan hukum dari negara pun tidak

<sup>224</sup>Wawancara dengan M (masyarakat yang menikah di bawah tangan) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

<sup>225</sup>*Ibid.*

bisa saya dapatkan, padahal ia sudah meninggalkan saya selama 7 tahun lamanya, namun karena saya tidak memiliki buat yang sah menurut negara maka alasan saya tidak ada kekuatan hukumnya. Itu saja dampak yang saya rasakan, syukurnya saya tidak memiliki anak dari dia, jika tidak saya juga akan mendapat kesulitan dalam pembuatan akta bagi anak yang setahu saya sekarang.<sup>226</sup>

4) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

M menjelaskan:

Proses pelaksanaan pernikahannya sebenarnya sama aja dengan pernikahan yang di kua kalau setahu saya, yang membedakan hanya yang menuntun acara pernikahannya bahwa jika di KUA adalah Penghulu yang memang resmi diberikan wewenang oleh Kementrian Agama, jika penghulu kampung tidak memiliki hak itu dalam negara. Adapun yang menjadi wali saya pun adalah penghulunya atau yang biasa disebut dengan walii hakim, kebetulan pada waktu itu seluruh keluarga jauh-jauh semuanya tiada keluarga satupun yang dekat waktu itu, maka segalanya kami serahkan kepada penghulu dan kedua saksinya pun adalah tetangga penghulu tersebut.<sup>227</sup>

5) Apakah saudara memiliki bukti pencatatan dalam pernikahan tersebut ?

M menjelaskan:

Iya waktu itu setelah selesai ijab qabulnya, kami diberi surat pernyataan dalam selebaran yang menyatakan tentang adanya pernikahan yang diketahui dan di tanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti kami yang menikah, penghulu yang menikahkan dan kedua orang saksi serta dikeetahui dan di tanda tangani pula oleh RT.<sup>228</sup>

6) Apakah selama ini pernah dilakukan permohonan isbath nikah di pengadilan?

M menjelaskan:

Tidak ada, karena saya merasa pihak pengadilan tidak bisa menerima permohonan saya dalam menuntut meminta

---

<sup>226</sup>*Ibid.*

<sup>227</sup>*Ibid.*

<sup>228</sup>*Ibid.*

perlindungan atas perlakuan suami saya yang seenaknya meninggalkan saya begitu saja setelah 2 bulan pernikahan, karena pernikahannya tidak dilakukan di KUA, jadi saya sudah tidak percaya diri, dalam pemikiran saya jika waktu itu nikahnya di bawah tangan maka cerai di bawah tangan pun sudah cukup, tanpa harus ke pengadilan.<sup>229</sup>

7) Bagaimana pendapat saudara tentang nikah di bawah tangan ?

M menjelaskan:

Menurut saya nikah di bawah tangan ini awalnya nikah yang memudahkan di awal, namun dikemudian hari akan menyusahkan bagi yang menikah juga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, bahkan lagi saya fikir tidak hanya menyusahkan malah sangat menyusahkan. Jika orang yang tidak ingin repot mungkin nikah di bawah tangan ini adalah solusi bagi dia tapi jika dikemudian hari dia yang menjadi isteri di kemudian hari juga ditinggalkan begitu saja oleh suaminya seperti saya, maka saya yakin tiada lain selain penyesalan di hatinya.<sup>230</sup>

8) Apakah saudara merekomendasikan pernikahan di bawah tangan ?

M menjelaskan:

Tidak akan saya biarkan keluarga, kerabat atau siapapun mereka yang saya kenal selagi dalam sepengetahuan saya sampai menikah di bawah tangan sama seperti saya, jika pun suami yang akan menikahinya ini terlihat begitu baik bahkan saya pun jika tidak melihat suami saya terlihat baik sewaktu dulu, tidak akan mau juga saya menikah dengannya apalagi menikah di bawah tangan yang tidak bisa mendapat perlindungan dari negara, karna tidak mungkin seseorang melihatkan sisi buruknya untuk menikahi seseorang, saya tidak bermaksud mengajarkan untuk berprasangka buruk, tapi hanya berjaga-jaga agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali terkhusus kepada orang-orang terdekat saya, disamping itu juga apalagi tidak menikah di bawah tangan/ menikah resmi maka tentu saja hal ini seseuai dengan aturan negara yang akan lebih menyamankan.

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

M bahwa Pernikahan di bawah tangan ini adalah pernikahan yang

---

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Ibid.*

prosesnya memudahkan di awal, namun setelah itu akan sangat menyulitkan bahkan sangat menyusahkan di kemudian harinya seperti dampak yang langsung di dapatkan oleh subyek M setelah 2 bulan berjalanny pernikahan, suaminya meninggalkan begitu saja tanpa adanya ikrar talak, hilang begitu saja selama 7 tahun lamanya, akhirnya subyek M merasa sangat dirugikan karena ia tidak bisa mengadukannya ke pengadilan mengingat bahwa pernikahannya dilakukan secara sirri/ di bawah tangan. Adapun yang menjadikannya menikah di bawah tangan adalah karena jarak yang begitu jauh dari rumahnya menuju KUA, sehingga membutuhkan waktu seharian hanya untuk menuju tempat KUA tersebut. Namun, jika saja ia mengetahui dampak yang akan di dapatkannya setelah pernikahan tiada lain hanyalah merugikan dirinya, ia tentu memilih menuju jarak yang jauh daripada di gantung dari status pernikahannya.

#### **1. Responden Kedua belas**

Nama : MH

Tempat, Tanggal Lahir : Barito, 20 Januari 1963

Pendidikan Terakhir : MAN

Pekerjaan : Guru

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 Maret 2020 di rumah penghulu kampung pada pukul 13.00 WIB



sampai dengan 14.00 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

MH menjelaskan:

Jika berbicara soal hukum, maka saya akan mengatakan bahwa nikah di bawah tangan ini sah saja selagi terpenuhi rukun syaratnya dan hal ini seperti apa yang telah ditentukan dalam syariat islam, kecuali didalam rukun dan syaratnya ternyata ada kesalahan yang menjadikan pernikahannya menjadi tidak sah, misalnya yang membawa wali palsu, artinya disini tidak ada hubungan nasab bukan ayah bukan kakek dan juga pamannya, untuk wali yang di bayar tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam syariat. Selain itu jika tidak terpenuhi perlengkapan administrasi seperti yang harus dipenuhi di KUA menikah di bawah tangan memang tidak perlu sesulit itu, namun ia juga mau tidak mau harus menanggung resiko bahwa menikah di bawah tangan tidak bisa mendapat buku nikah dan tidak perlindungan negara.<sup>231</sup>

- 2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

MH menjelaskan:

Faktor pertama ketika orang yng menikah di KUA namun umurnya belum sampai, sedangkan sudah harus dinikahkan atau sudah kesepakatan masing-masing keluarga dalam hitungan tanggal yang juga sudah di pilih, maka yang seperti akhirnya mereka mau tidak mau menikah di bawah tangan karena hanya ini solusi dari kesulitannya tadi. Kemudian yang kedua sudah terlanjur kecelakaan (hamil diluar nikah), untuk faktor yang kedua ini sangat banyak terjadi bahkan saya rasa ini sudah bisa dikatakan menjadi faktor utamanya, melihat keadaan sekarang terlalu mudah laki-laki dan perempuan yang belum menikah kemana-mana selalu berdua, sedangkan misalnya laki-lakinya masih

---

<sup>231</sup>Wawancara dengan MH (Penghulu kampung) di Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 18 Maret 2020.

harus menyelesaikan pendidikan dan pernikahannya boleh kecuali sesudah pendidikannya selesai, namun ternyata sudah tidak bisa karena mereka sudah melakukan hubungan yang tidak seharusnya, maka untuk mengatasi hal itu juga mereka mau tidak mau menikah di bawah tangan dahulu agar mengamankan nama baik keluarganya baru kemudian setelah selesai pendidikan baru diresmikan di KUA begitu katanya. Adapun faktor ketiganya beberapa dari mereka juga banyak karena tidak mau berurusan administrasi, biasanya hal ini dialami oleh mereka yang misalnya suami/isterinya meninggal namun belum mengurus statusnya telah cerai mati, artinya disini administrasinya takkan lengkap dan tidak bisa diterima di KUA sebelum ia melengkapi, sedangkan ia misalnya ingin cepat karena beberapa alasan entah itu masalah sibuk atau apa maka mereka mau tidak mau terpaksa menikah di bawah tangan, yang terakhir faktor ingin memiliki isteri lebih dari 1, namun untuk alasan yang 1 ini, saya tidak mau menikahkan.<sup>232</sup>

- 3) Apakah ada dasar hukum terkait kebolehan dan larangan terkait nikah di bawah tangan ?

MH menjelaskan:

Kalau dasar hukum ini hanya undang-undang negara saja yang mengaturnya, karena didalam agama apabila sesuai rukun dan syaratnya semuanya sudah tercukupi maka tidak ada halangan untuknya menikah, walaupun misalnya umurnya belum sampai batas minimal menikah, namu jika dalam sudut pandang agama melihat apa yang dilakukan Nabi dahulu bahwasanya beliau menikahi siti Aisyah pada umur 6 tahun danmengumpulinya 9 tahun, artinya disini tidak ada batasan untuk menikah apabila terpenuhinya sudah rukun dan syaarat menikahnya.<sup>233</sup>

- 4) Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

MH menjelaskan:

Prosesnya seperti apa yang ada dalam aturan islam, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sesuai rukun dan syaratnya, namun kadang-kadang ada juga mereka yang membawa wali palsu (wali yang di bayar), yang seperti

<sup>232</sup> *Ibid.*

<sup>233</sup> *Ibid.*

tentu saja mengakibatkan pernikahannya tidak sah dan tanggung jawab yang menikahkan pun menjadi mendapat dosa, maka yang seeperti ini juga biasa saya tanyakan dulu dengan memastikan misalnya dengan menanyakan orang-orang dekatnya atau bisa juga menyumpahnya, karena saya tidak berani langsung percaya dan tentunya ini menjadi tanggung jawab dunia akhirat bagi saya. Ada juga yang orang tuanya dan dirinyayang ingin menikah beda agama, maka yang seeperti in biasanya dicarikan tokoh masyarakat ditempatnya dan biasanya mereka sendiri yang mencarinya namun tidak menutup kemungkinan untuk saya ikut membantu dalam mencari tokoh masyarakat tersebut atau bahasa daerahnya biasa disebut (tetuha masyarakat), kemudian lagi yang terakhir bisa menghambat berlangsungnya pernikahan megaku masih belum menikah tapi meragukan, maka yang seperti juga biasa ditanyakan kepada orang dekatnya dan disumpah agar lebih meyakinkan.<sup>234</sup>

5) Adakah pencatatan dari pernikahan di bawah tangan ?

MH menjelaskan:

Iya pencatatan itu ada memang saya berikan sebagai surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia telah menikah yang diketahui dan di tanda tangani oleh Rt, dan surat ini bisa juga ia bawa apabila nanti dikemudian hari ingin mengajukan isbath nikah di pengadilan, namun surat ini memang mungkin tidak bisa menjadi bukti yang kuat karena statusnya yang tidak legal.<sup>235</sup>

6) Bagaimana dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

MH menjelaskan:

Sebenarnya dampaknya banyak, dan beberapa diantara nya yang pertama ia tidak mendapat perlindungan hukum dalam pernikahannya, mau dia menangis seperti apa di pengadilan selagi ia tidak mencoba mengisbathkan nikahnya terlebih dahulu di pengadilan. Pernikahanya tetap dianggap tidak sah dan pihak pengadilan tidak bisa membantunya, misalnya yang ditinggal berpuluh tahun atau dianiaya oleh suaminya semuanya kesulitan dari pernikahannya. Kemudian kesulitan lainnya ia tidak bisa membuat akta kelahiran bagi anaknya, maka anaknya yang tidak tahu apa-

---

<sup>234</sup>*Ibid.*

<sup>235</sup>*Ibid.*

apa yang jika seandainya ia bisa memilih mungkin tentu ia tidak mau, karena mungkin dikemudian hari ia akan mendapat kesulitan dalam mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan bermasalah dalam hak waris, seandainya dikemudian hari ada pembagian waris dari ayahnya anak tersebut yang meninggal dunia, kemudian keluarga ayahnya tetap tidak menyetujui harta waris tersebut dibagikan kepada anaknya walaupun tahu itu adalah anaknya, namun karena status pernikahannya di bawah tangan artinya apabila ingin menuntut keadilan ke pengadilan pun tidak bisa, maka hal juga menjadi sangat merugikan terutama bagi isteri dan anak. Dan selanjutnya pula terakhir yang saya tahu akan kesulitan dalam berurusan contohnya seperti mau meminjam uang di bank, mau kredit rumah kan kesulitan karena tentunya nanti dicari orang buku nikah mereka.<sup>236</sup>

- 7) Apa yang menjadi alasan bapak menikahkan dalam pernikahan di bawah tangan ?

MH menjelaskan:

Jika bisa saya bantu dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam insya Allah saya bantu, namun saya juga tidak berani menikahkan hanya menuntunnya saja dan juga orangnya harus datang kesini, saya tidak mau apabila yang harus datang kerumahnya, namun tadi selagi bisa ditolong daripada misalnya jika tidak dinikahkan mereka malah jadi berhubungan haram maka lebih baik saya tolong.<sup>237</sup>

- 8) Apakah selama ini pernah ada pengaduan kesulitan dari pasangan yang bapak nikahkan ?

MH menjelaskan:

Ada banyak sekali diantara yang paling banyaknya karena selingkuh, misalnya seorang isteri yang tidak merasa puas dengan penghasilan suaminya lalu ia ternyata punya teman dekat laki-laki banyak memberinya uang maka ia selingkuh, namun sebenarnya hal ini tidak terlalu masalah karena hak sighat talak juga ada pada suami, jadi apabila memang suaminya tidak ridho pada suaminya ia bisa mentalaq isterinya tersebut dengan cerai di bawah tangan

---

<sup>236</sup>*Ibid.*

<sup>237</sup>*Ibid.*

pula. Kemudian lagi ada yang sering diantaranya karena ditinggalkan oleh suaminya, yang seperti benar-benar merugikan bagi isterinya yang ditinggalkan tentunya, karena ia tidak bisa mengadu kemanapun untuk meminta pengadilan, ia juga tidak mendapatkan nafkah. Namun ada juga yang suaminya tidak meninggalkan, namun tidak memberi nafkah. Selanjutnya dapula yang karena suaminya senang minum minuman keras, akhorna suka memukul dirinya, mengonsumsi obat-obatan juga ada dan hal ini tentunya tidak diketahui olehnya sebelum pernikahan, karena yang terlihat pasti ditunjukkan yang baik-baiknya saja, namun karena sudah terkanjur menikah mau bagaimana, kecuali ia berusaha mengisbatkan pernikahannya ke pengadilan terlebih dahulu baru kemudian menggugat cerai suaminya apabila memang tidak tahan, tapi selagi ia tidak mengajukan isbath tersebut tetap tidak ada perlindungan negara yang bisa didapatkannya, itulah memang kerugiannya menikah di bawah tangan, makanya saya pun sekarang sudah tidak lagi menikahkan, saya hanya fokus mengajar di madrasah saja sekarang.<sup>238</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

MH bahwa Pernikahan di bawah tangan ini adalah pernikahan yang sah secara agama selagi terpenuhi rukun dan syaratnya, kecuali ada kesalahan dalam rukun dan syaratnya maka itu akan menjadikan tidak sah pernikahan tersebut. Terjadinya nikah di bawah tangan ini biasanya karena adanya faktor belum cukup usia sedangkan sudah ingin menikah/ harus di nikahkan, terlanjur kecelakaan (hamil sebelum menikah) mereka juga tidak mau berurusan dan masyarakat tersebut berpendapat bahwa apabila nikah di KUA harus melengkapi beberapa persyaratan yang ia sendiri tidak mampu memenuhinya sehingga ia merasa nikah di bawah tangan adalah solusi dari kesulitannya dalam memenuhi

---

<sup>238</sup> *Ibid.*



persyaratan administrasi menikah di KUA, padahal dampaknya juga akan menimpa mereka sendiri bahkan juga anaknya yang tidak bisa membuat akta kelahiran, pernikahannya tidak bisa mendapat perlindungan negara, serta tidak bisa mendapat hak waris, akan kesulitan dalam berurusan seperti halnya ingin pinjam meminjam uang di bank menjadi tidak bisa karena tidak ada buku nikah dari pernikahannya.

#### **m. Responden Ketiga belas**

Nama : MA  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bamban, 02 Januari 1959  
 Pendidikan Terakhir : S2  
 Pekerjaan : PNS Jabatan Hakim

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2020 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 14.48 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Bagaimana pendapat bapak terhadap nikah di bawah tangan ?**

MA menjelaskan:

Menurut saya sekalipun nikah di bawah tangan ini boleh dan tidak dilarang dalam syariat islam, namun sebenarnya apabila dilakukan tetap tidak baik jika dilihat dari dampaknya yang masih banyak ditemukan bahwa nikah yang tidak sempurna terpenuhi dari rukun dan syaratnya itu dari nikah di bawah tangan, contohnya walinya ayah angkat, maka jelas hal ini tidak menjadikan pernikahannya sah baik secara agama apalagi secara negara. Dan

pernikahan di bawah tangan ini juga tidak dianjurkan karena nantinya akan menyulitkan dia dikemudian hari setelah pernikahannya, misalnya saja perbuatan sewenang-wenang suami terhadap anak dan isterinya.<sup>239</sup>

2) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan di kota

Palangka Raya ?

MA menjelaskan:

Mengenai faktor dari terjadinya nikah di bawah tangan ini kadang-kadang dari banyaknya karena kelalaian penghulu, sering terjadi penghulu kampung yang menikahkan padahal ternyata masih ada terikat dengan pernikahan sebelumnya contohnya isteri yang masih terikat dengan suami sebelumnya dan belum mengurus akta cerainya, kemudian juga menjadi faktor lainnya adalah karena jarak, ini biasanya terjadi dari mereka yang jauh-jauh disana mereka yang perlu melewati jarak tempuh yang bisa dibilang memakan waktu untuk menuju KUA, maka yang seperti itu terpaksa menikah di bawah tangan, dan suatu saat dari pernikahannya ternyata memerlukan buku nikah yang tentu saja tidak bisa ia dapatkan apabila dengan penghulu kampung, maka mau tidak mau juga isbath ke pengadilan dan dari situlah kami bisa mengetahui dari karna adanya faktor jarak tersebut. Kemudian lagi karena faktor kurang informasi, banyak saja masyarakat mengira kalau sudah menikah sudah akad ijab kabul maka sudah selesai, memang pernikahannya sah apabila sudah tercapai rukun syaratnya namun ia tidak mendapat buku nikah dan statusnya masih belum sah sebagai suami isteri menurut negara. Faktor tidak mampu bayar juga ada, karna memang dulu itu ada biaya apabila ingin menikah di KUA, jadi karena tidak punya uang maka mereka terpaksa menikah seadanya saja. Dan juga yang terakhir saya tahu ini karena faktor umur, karena didalam undang-undang telah diatur batasan usia pernikahan, maka KUA tidak bisa menikahkan sebelum ia memohon dispensasi perkawinan ke pengadilan, maka yang seperti juga banyak dari yang memilih untuk menikah di bawah tangan dulu, dengan tujuan agar menyelamatkan.<sup>240</sup>

3) Apa dampak dari pernikahan di bawah tangan ?

---

<sup>239</sup>Wawancara dengan MA (Hakim) di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 Maret 2020.

<sup>240</sup>*Ibid.*

MA menjelaskan:

Dampaknya pertama ia tidak ada buku nikah sedangkan buku nikah itu sangat diperlukan contohnya seperti membuat akta kelahiran anak, berurusan di masyarakat juga sering orang mempertanyakan buku nikah, seperti meminjam uang di bank, kredit sepeda motor dan lain sebagainya, kemudian dampak lainnya yaitu ada kemungkinan terjadi pelanggaran hukum, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sangat berkemungkinan suami dari pasangan tersebut berbuat sewenang-wenang terhadap isteri dan anak-anaknya, baik itu menyakiti, menelantarkan bahkan sampai meninggalkan, tentu saja hal akan sangat merugikan karena pernikahannya tidak ada perlindungan hukum dan ia tidak memiliki bukti yang kuat yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri. Adapun selanjutnya akan terhalang dalam hak waris, seandainya dikemudian hari suami dari sang isteri tersebut meninggal dan dilakukan pembagian waris namun ternyata sang isteri dan anak dari ayah tersebut tidak mendapat bagian, ia tidak bisa menuntut karena ia tidak ada buku nikah dengan suaminya itu, ia tidak bisa membuktikan dengan bukti yang legal bahwa mereka memang benar-benar suami isteri, begitu juga anaknya karena ia tidak bisa memiliki akta kelahiran dari pernikahan kedua orang tuanya.<sup>241</sup>

- 4) Apakah bapak mengetahui praktik dan proses nikah di bawah tangan di kota Palangka Raya ?

MA menjelaskan:

untuk menghadirinya saya belum pernah, karena biasanya pernikahan yang semacam ini juga tertutup sehingga saya juga kurang mengetahui bagaimana itu proses persisnya, tapi yang setahu saya mereka itu datang ketempat penghulu kampung, untuk minta di nikahkan mungkin bisa juga sudah lengkap membawa saksi dan walinya, namun yang sering terjadi kadang walinya yang dihadirkan bukanlah wali yang memiliki wewenang dalam menikahkannya, artinya tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya maka seandainya yang seperti ini di isbatkan ke pengadilan maka akan kami tolak.<sup>242</sup>

---

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> *Ibid.*

- 5) Apakah ada dampak yang di dapatkan oleh penghulu luar kampung yang menikahkan secara tidak resmi ?

MA menjelaskan:

Sebenarnya ada, namun sangat kecil nominalnya dan belum dirubah, padahal sudah lama rencana untuk merubahnya namun sampai sekarang belum ada perubahan, sehingga mereka yang sebagai penghulu kampung berani saja terus menikahkan di bawah tangan bahkan fatalnya tadi meski masih ada ikatan perkawinan dari pernikahan sebelumnya, banyak dari mereka penghulu kampung tetap berani menikahkan.<sup>243</sup>

- 6) Bagaimana caranya pasangan menikah di bawah tangan dalam mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama ?

MA menjelaskan:

Untuk mengajukan isbath nikah mereka akan diminta seperti melampirkan KTP, surat ket. Nikah juga, kadang-kadang mereka biasanya ada memiliki itu dari nikah di bawah tangannya sebagai bukti bahwa mereka benar telah menikah, namun bukti ini tidak kuat sifatnya karena ia tidak legal. Apabila misalnya ada yang mengajukan untuk bercerai dengan suaminya, artinya isterinya yang mengajukan, maka ia mendaftar antara isbath nikah dan cerai, 1 perkara dan 1 akumulasi. Dan ketika sudah dinyatakan sah pernikahannya tersebut yang telah selesai di isbathkan maka ia baru bisa mengugat cerai. Adapun bagi yang tidak mampu bisa secara prodeo (Cuma-Cuma). Sebananya dulu ada prodeo murni dengan sidang insidentil jadi diperiksa lebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar layak di bantu, apabila ternyata orang tersebut punya motor banyak gelang banyak, yang seperti itu kan tidak seharusnya mengajukan secara Cuma-Cuma, kecuali mereka yang sudah terbukti benar-benar tidak mampu.<sup>244</sup>

- 7) Apakah pencatatan secara tidak resmi dari pernikahan di bawah tangan bisa menjadi alat bukti di Pengadilan Agama ?

---

<sup>243</sup> *Ibid.*

<sup>244</sup> *Ibid.*

MA menjelaskan:

Apabila di bawa lebih baik, biasanya mereka memang ada dikasih, dan kebiasaan dari mereka yang di palangka raya ini apabila mengajukan permohonan isbath nikah ke pengadilan biasanya selalu membawa surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menikah tersebut, namun karena nikahnya tidak dihadapan pejabat yang berwenang artinya tidak menikah di KUA, maka adanya bukti ini tidak terlalu berpengaruh dan seandainya ia tidak bisa membawa bukti tersebut pun tidak masalah.<sup>245</sup>

- 8) Apa dasar hukum terkait nikah di bawah tangan ?

MA menjelaskan:

Dasar hukum terkait dari nikah di bawah tangan ini ialah seperti apa yang telah dicnaatumkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa nikah tangan timbul setelah berlakunya perkawinan secara efektif tahun 1975. Sedangkan nikah sah adalah nikah yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing seperti yang ada dalam pasal 2 ayat 1 UU. Perkawinan. Namun karena syarat sahnya pernikahan berkaitan dengan pencatatan, dan nikah di bawah tangan tidak ada itu maka hukumnya menurut negara tetap tidak sah. Hal ini berkaitan dengan aturan bahwa setiap pernikahan harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (KUA).<sup>246</sup>

- 9) Apakah semua permohonan isbath nikah bisa diterima oleh pihak pengadilan?

MA menjelaskan:

Terhadap permohonan isbath nikah yang diajukan ke pengadilan tidak semuanya diterima, akan diterima apabila sesuai terpenuhi rukun dan syaratnya, artinya tidak ada kesalahan pada wali, umurnya mencukupi, semuanya sudah terpenuhi hanya saja ia misalnya tidak tahu dengan mengira apabila nikah dengan penghulu kampung, maka sama saja dengan menikah di KUA, maka yang seperti ini apabila di isbath kan di pengadilan akan kami terima, namun ada juga permohonan isbath nikah yang ditolak, yang apabila ternyata tidak lengkap terpenuhi rukun dan syaratnya, bisa

---

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>246</sup> *Ibid.*



juga karena alamatnya tidak jelas maka yang seperti ini kami tolak. Adapun selain diterima dan ditolak juga ada perkara nikah di bawah tangan yang dicoret/ digugurkan apabila tidak dipanggil setelah 2x panggilan untuk menghadiri sidang dari relas panggilan panggilan yang sudah diperntukkan untuk dirinya, maka yang seperti dianggap tidak serius karena tidak ada kejelasan maka kami gugurkan.<sup>247</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek

MA bahwa Pernikahan di bawah tangan ini meskipun hukumnya boleh dan tidak ada larangan selagi terpenuhinya rukun syurat dalam pernikahan, namun tetap tidak baik dilakukan ,mengingat tidak baiknya dampak yang akan ditemukan dari pernikahan di bawah tangan tersebut contohnya seperti tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak, sulit berurusan, serta tidak mendapat perlindungan negara. Jika menurut hukum negara tentu saja ini tidak di bolehkan karena sesuai dengan aturan UU. Perkawinan Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Apabila pernikahan di bawah tangan tersebut ingin mendapat buku nikah maka bisa saja dengan mengurus isbath nikah terlebih dahulu ke pengadilan. Faktor perkawinan di bawah tangan ini biasanya disebabkan dari beberapa alasan yakni diantaranya karena kelalaian penghulu kampung, pengaruh jarak yang terlalu jauh, kurangnya informasi yang diketahui, serta tidka mampu bayar, karena dulu sebelum

---

<sup>247</sup>*Ibid.*

pernikahan ini di gratiskan pernah dikenakan biaya untuk menikah di KUA.

**n. Responden Keempat belas**

Nama : F

Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Serapat. 03 Maret 1978

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Bukit Batu

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 April 2020 di KUA Bukit Batu Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

1) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan?

F menjelaskan:

Pertama yang menjadi faktor nikah di bawah tangan ini yaitu karna tidak mau repot, ia merasa bahwa ada begitu banyak persyaratan administrasi yang harus diurusnya terlebih jika ia memang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya tentunya harus mengurus ke pengadilan terlebih dahulu, dan karena ia ingin praktis dengan cara cepat maka menikahlah ia dengan penghulu kampung atau menikah di bawah tangan itu. Kemudian faktor lemahnya pendidikan juga mempengaruhi bahwa tidak banyak mengetahui dampak apa yang akan di dapatkannya jika menikah di bawah tangan juga pernikahannya yang tetap tidak dianggap sah oleh negara, dan faktor lainnya lagi juga berpengaruh dari saran orang tua yang dengan pemikiran keliru, beranggapan bahwa menikah di KUA dan penghulu kampung tidak ada bedanya, yang penting sah menurut agama.<sup>248</sup>

---

<sup>248</sup>Wawancara dengan F (Kepala KUA) di KUA Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 April 2020.

- 2) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah di bawah tangan ?

F menjelaskan:

Sebenarnya dasar hukumnya tidak ada terkait nikah di bawah tangan, menurut agama selagi itu memenuhi ketentuan rukun dan syarat maka dianggap sah, asal tidak menyalahi ketentuan tersebut, kadang semua telah terpenuhi tapi ternyata ada kesalahan, contoh saja pada walinya yang sering terjadi dari pernikahan yang di nikahkan oleh penghulu kampung ternyata walinya itu bukan bapak kandungnya padahal bapaknya tersebut masih hidup, tapi mempelai tersebut justru membayar orang lain sebagai walinya. Adapun pernikahan yang seperti ini tidak sah. Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam jelas mengatur bahawa nikah yang tidak di catatkan dihadapan pejabat yang berwenang tidak dianggap sah.<sup>249</sup>

- 3) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di masyarakat?

F menjelaskan:

Dulu saya memang pernah diminta menjadi saksi dari pernikahan di bawah tangan ini, ketika saya menjadi Ketua RT dan belum sebagai penghulu, dan saya ini juga masuk dalam bagian bisa dibilang Tokoh masyarakat, jadi kadang-kadang diminta seperti itu, namun selama saya menjadi penghulu saya tidak pernah mau ikut menghadirinya.<sup>250</sup>

- 4) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah di bawah tangan tersebut ?

F menjelaskan:

Sebenarnya tidak ada bedanya menikah di bawah tangan dan menikah di KUA mengenai prosesnya itu, yang membedakan hanya antara di catat dan tidak di catatnya

---

<sup>249</sup>*Ibid.*

<sup>250</sup>*Ibid.*

saja. Namun kadang nikah di bawah tangan ini memang sering terjadi kesalahan karna dalam prosesnya tidak ada proses pemeriksaan seperti yang ada di KUA yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Perkawinan, sehingga peluang untuk terjadi kesalahan dalam nikah di bawah tangan ini memang besar kemungkinan, karna ada banyak sekali dari nikah di bawah tangan ini ternyata ada kesalahan wali, menjadi wali muhakam yang sebenarnya tidak ada hak nya/ tidak ada wewenang dalam menikahkan kecuali dengan proses pengalihan oleh walinya sendiri, namun jika itu bukan wali nya maka tidak boleh dan dianggap tidak sah.<sup>251</sup>

- 5) Adakah pencatatan secara tidak resmi dari pernikahan di bawah tangan ?

F menjelaskan:

Biasanya memang ada selebaran surat yang menyatakan bahwa mereka telah menikah, dengan format diketahui oleh beberapa pihak seperti wali saksi dan diketahui oleh RT. Adapun mengenai format tersebut memang sepertinya penghulu kampung ini sudah memiliki format tersendiri dan ia sendiri yang membuatnya.<sup>252</sup>

- 6) Bagaimana caranya pasangan yang menikah di bawah tangan membuktikan bahwa mereka telah menikah di KUA ?

F menjelaskan:

Kadang sering memang dari mereka yang sebelumnya menikah di bawah tangan lalu kemudian ingin mendapatkan buku nikah, mereka datang ke KUA, namun kami pihak KUA tidak bisa membantunya sebelum ia menyelesaikan permohonan isbath nikah terlebih dahulu ke pengadilan, apabila pengadilan telah menerima permohonannya tersebut, maka akan kami keluarkan buku nikahnya. Namun untuk buku nikah dari mereka yang menikah di bawah tangan ini memang sedikit berbeda karna pada buku nikah mereka akan kami tambahkan catatan di salah satu bagian halaman yang menerangkan bahwa “benar

---

<sup>251</sup>*Ibid.*

<sup>252</sup>*Ibid.*

telah melakukan perkawinan dan dinyatakan sah melalui isbath nikah”.<sup>253</sup>

- 7) Apakah bagi penghulu luar KUA akan mendapatkan dampak dalam menikahkan ?

F menjelaskan:

Selama ini adem-adem saja tidak pernah ada tindakan apapun terhadap mereka yang menikahkan (penghulu kampung) tersebut, sehingga memang sulit sekali untuk di tiadakan nikah di bawah tangan ini, namun setidaknya harapan saya bisa lebih dikurangi karna mengingat bahaya yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut.<sup>254</sup>

- 8) Bagaimana pendapat Bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

F menjelaskan:

Kalau bisa ya segera ditiadakan, saya sangat berharap, karena sebenarnya adanya hukum ini juga untuk kemaslahatan masyarakat, menikah di bawah tangan hanya merugikan dirinya, juga anaknya, tidak ada keuntungannya selain memang di awal mungkin terkesan lebih memudahkan, namun jika ingin melakukan beberapa akan sangat disulitkan. Akan tetapi jika nikah di bawah tangan ini dikaitkan untul mereka yang ingin memiliki isteri lebih dari satu dan ingin tanpa sepengetahuan isterinya, mungkin ini menguntungkan dirinya, walaupun yang seperti ini terkesan berbohong dan sebenarnya wanita yang dinikahinya yang dirugikan. Jika dari konteks yang seperti ini sebenarnya dampak yang ada hanya akan berakibat buruk.<sup>255</sup>

- 9) Bagaimana dampak dari nikah di bawah tangan?

F menjelaskan:

Anak tidak bisa membuat akta, meskipun bisa membuat akta untuk anaknya tapi bin nya akan di nisbathkan kepada ibunya, selain itu dampak lainnya adalah jika mau berurusan akan disulitkan karna banyak sekali urusan yang mengharuskan lampiran buku nikat tersebut, seperti

---

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid*



membuat BPJS, ingin ingin Haji/ Umroh, anak juga bisa kesulitan dalal masuk sekolahnya, selain itu ia juga tidak bisa menjadi ahli waris karena tidak ada bukti yang kuat terhadap pernikahannya, sekalipun itu berupa surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh wali dan 2 saksi yang adil, namun karena bukti tersebut tidak berkekuatan hukum, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya. Kemudian lagi juga apabila nanti ingin pembagian harta gono-gini akan sulit. Seperti itulah nikah di bawah tangan ada begitu banyak kerugian yang akan didapatkannya.<sup>256</sup>

10) Apakah dari KUA ada mmberikan penyuluhan hukum terkait nikah di bawah tangan?

F menjelaskan:

Kalau saya memang setiap adanya pernikahan selalu memberikan nasehat, arahan terkait pernikahan ini dan termasuk juga pentingnya pencatatan pernikahan, dampak yang akan didapatkan jika menikah di bawah tangan, dan segala yang berkaitan dengan pernikahan, karna dari Pihak KUA memang ada kebiasaan seperti itu dari setiap pernikahan baik yang dilangsungkan di Kantor maupun diluar kantor yang memang disitu mempelai meminta untuk penghulu KUA untuk menuntun pernikahannya.<sup>257</sup>

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek F bahwa Pernikahan di bawah tangan ini kalau bisa segera ditiadakan, jikapun itu sulit setidaknya berusaha untuk mengurangi jumlah banyaknya, karena ditetapkan hukum yang melarang pernikahan di bawah tangan oleh negara ini juga untuk kepentingan masyarakat. Faktor yang menjadikan terjadinya nikah di bawah tangan ini biasanya diantaranya adalah karena tidak ingin repot mengurus administrasi dan ingin praktis, faktor lemahnya

---

<sup>256</sup>*Ibid*

<sup>257</sup>*Ibid.*

pengetahuan serta karena saran dari orang tua yang dengan pemikiran keliru menganggap bahwa asal menikah dan sah secara agama sudah cukup, padahal menikah di bawah tangan akan membawa banyak kerugian bagi anaknya tersebut. Diantaranya yaitu tidak bisa membuat akta, sulit jika ingin berurusan seperti BPJS dan sebagainya, tidak menuntut harta gono-gini, serta tidak bisa menjadi bagian dari ahli waris. Adapun dasar hukum yang melarangnya ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **o. Responden Kelima belas**

Nama : M  
 Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 15 September 1981  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Pekerjaan : Kepala KUA Rakumpit

Peneliti melakukan wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2020 melalui aplikasi whatsapp pada pukul .08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB. Fokus permasalahan terhadap pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Apa yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan?**

M menjelaskan:

Calon pengantin merasa tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi pencatatan di KUA, misalnya seperti usianya belum sesuai dengan batas usia boleh menikah seperti yang ada dalam undang-undang bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan apabila sudah berusia 19 Tahun, maka KUA tidak bisa menikahkan apabila mereka tidak mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dahulu di pengadilan, selain

itu juga karena akta cerainya belum keluar dari pengadilan sedangkan mereka sudah ingin menikah, dan sebab lainnya karena ingin poligami tanpa izin dari isterinya.<sup>258</sup>

- 2) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah di bawah tangan ?

M menjelaskan:

Mengenai dasar hukum yang membolehkan ini tidak ada, adapun yang melarang ini sudah jelas yaitu di dalam UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap pernikahan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>259</sup>

- 3) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah di bawah tangan di masyarakat?

M menjelaskan :

Kalau menghadirinya saya tidak pernah, bahkan melihatnya saja sebenarnya tidak dibenarkan, karna pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak legal. Adapun kami mengetahuinya melalui mereka yang ingin mendapat buku nikah di KUA melalui dokumen berupa berita acara dan sering kami menemukan biasanya ada pasangan yang mau mendaftarkan nikah tersebut, ternyata mereka sudah melakukan praktik nikah di bawah tangan. Adapun tujuan mereka ingin menikah resmi dikarenakan mereka ingin membuat Kartu Keluarga ataupun Akta Kelahiran untuk anaknya, oleh karena selama ini mereka tidak mempunyai buku nikah.<sup>260</sup>

- 4) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah di bawah tangan tersebut ?

M menjelaskan:

---

<sup>258</sup> Wawancara dengan M(Kepala KUA) di KUA Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya, pada tanggal 14 April 2020.

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

Kebiasaan pelaksanaannya adalah pasangan yang ingin menikah tersebut menghadap salah satu tokoh agama atau orang yang mereka anggap bisa menikahkan mereka bisa juga langsung antara intern keluarga mereka sendiri, karena mereka memiliki wali contoh salah satunya untuk perempuan yang ada ayah kandungnya, maka ayah kandungnya langsung yang menikahkan.<sup>261</sup>

5) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah di bawah itu?

M menjelaskan:

Dasar orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu menurut fikih munakahat, apabila telah memenuhi unsur rukun nikah dengan adanya calon mempelai, adanya wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul, maka mereka melaksanakan pernikahan dan itu sah dalam syariat Islam.<sup>262</sup>

6) Bagaimana caranya pasangan yang menikah di bawah tangan membuktikan bahwa mereka telah menikah di KUA ?

M menjelaskan:

Biasanya mereka yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan melampirkan bukti selebar kertas yang menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Setelah mereka memperlihatkan lampiran tersebut, maka kami anjurkan mereka untuk melangsungkan sidang isbath di Pengadilan Agama untuk penetapan secara hukum negara terhadap pernikahan di bawah tersebut telah diterima dan dinyatakan sah.<sup>263</sup>

7) Adakah pencatatan secara tidak resmi dari pernikahan di bawah tangan ?

M menjelaskan :

Kalau pencatatan secara tidak resmi ini kadang ada dan kadang pula tidak ada, hal ini tergantung kepada inisiatif

---

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> *Ibid.*

mempelai tersebut ataupun dari yang menikahkannya. Adapun didalam surat pernyataannya ini berupa selebar kertas yang berisikan data dan kemudian di tanda tangani diatas materai dari kedua belah pihak dan yang menikahkannya.<sup>264</sup>

8) Siapa yang mencatat dalam peristiwa pernikahan di bawah tangan ?

M menjelaskan :

Biasanya yang mencatat adalah orang yang ditunjuk mereka untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan, ataupun orang dari intern mereka sendiri misalnya wali dalam pernikahan tersebut.<sup>265</sup>

9) Apakah bagi penghulu luar KUA akan mendapatkan dampak dalam menikahkan ?

M menjelaskan:

Bagi penghulu luar KUA yang menikahkan di bawah tangan, ia bisa saja mendapatkan sanksi apabila ada pihak yang melaporkan, atau ada pihak yang merasa di rugikan atas pernikahan tersebut.<sup>266</sup>

10) Bagaimana pendapat Bapak terhadap nikah di bawah tangan ?

M menjelaskan:

Pernikahan di bawah tangan adalah merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muslim namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan peraturan hukum undang-undang perkawinan di Indonesia.<sup>267</sup>

11) Bagaimana dampak dari nikah di bawah tangan?

M menjelaskan:

---

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> *Ibid.*



Dampak dari pernikahan di bawah tangan ini sangat merugikan terutama pada isteri dan anak. Apabila nanti suaminya meninggal maka isteri tidak bisa mendapat warisan dari suaminya, kemudian apabila terjadi perceraian maka isteri tidak bisa menuntut harta gono-gini dari suaminya dan anak yang dilahirkannya secara nashab itu mengikut kepada ibunya saja, dan untuk anak nya dalam hak waris pula, ia tidak bisa memperoleh karena perkawinan orang tua nya tidak tercatat secara hukum.<sup>268</sup>

12) Apakah dari KUA ada mmberikan penyuluhan hukum terkait nikah di bawah tangan?

M menjelaskan:

Kalau penyuluhan secara khusus itu tidak ada, namun biasanya kami dalam setiap pernikahan baik itu di KUA maupun diluara KUA, kami mensosialisasi kan kepada masyarakat agar hendaknya melangsung pernikahan itu tercatat sesuai dengan hukum undang-undang perkawinan negara, jangan sampai terjadi pernikahan di bawah tangan oleh karena dampak yang ditimbulkan dari nikah di bawah tangan sangat merugikan baik itu kepada pihak isteri maupun anak dari pernikahan tersebut.<sup>269</sup>

13) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah di bawah tangan ?

M menjelaskan :

Secara pribadi kami tidak merekomendasikan atau menganjurkan pernikahan di bawah tangan, karena sering kami hadapi keluhan yang timbul dari akibat pernikahan di bawah tangan, salah satu contoh apabila mereka mengajukan perceraian ke pengadilan agama khususnya dari pihak isteri, itu tidak akan di terima oleh pihak pengadilan karena pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum undang-undang dalam negara.<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup> *Ibid.*

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> *Ibid.*

Pola pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subyek M bahwa Pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muslim namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun yang menjadi faktor terjadinya nikah di bawah tangan ini di antaranya adalah karena tidak mau mengurus administrasi, usia yang belum mencukupi serta karena ingin poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan isterinya, masyarakat yang merasa tidak ingin repot berurusan dalam memenuhi persyaratan. Sebagian dari masyarakat menganggap sulit dalam pmenuhan persyaratan administrasinya maka mereka memilih menikah di bawah tangan walaupun pernikahan di bawah tangan ini sangat merugikan. Beberapa dampak diantaranya adalah tidak mendapat perlindungan negara, tidak menjadia ahli waras bahkan tidak bisa pula dalam menuntut harta gono-gini dari pernikahannya.

## **B. Hasil Analisis**

Pada poin ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang terdapat pada bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada 2 fokus masalah yaitu pandangan masyarakat terhadap faktor penyebab pernikahan di bawah tangan dan pandangan masyarakat tentang dampak nikah di bawah tangan. Adapun uraian analisis yang dimaksud sebagai berikut:

## **1. Pandangan Masyarakat mengenai Faktor Penyebab Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya**

Sebelum peneliti menganalisis data, terlebih dahulu peneliti mencermati pandangan masyarakat yang terdiri dari dua kata yakni pandangan yang bermakna cara berfikir sedangkan masyarakat bermakna sekumpulan orang-orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang diluar, dan memiliki budaya yang relatif sama. Adapun pada kenyataannya di masyarakat yang meskipun mereka hidup bersama, tidak menjamin bahwa mereka memiliki pandangan yang sama. Perbedaan pandangan dari masyarakat salah satu diantaranya disebabkan karena wawasan dan pendidikan yang berbeda, ada yang menguasai dan sangat memahami ada yang cukup mengetahui dan ada yang sekedar mengetahuinya sedikit, contohnya bidang hukum perkawinan. Dengan demikian masyarakat yang memahami betul terkait hukum Perkawinan adalah seperti mereka yang sering berpraktik baik di Kantor Urusan Agama dalam hal menikahkan orang-orang yang akan kawin yakni penghulu fungsional dan juga para hakim yang berpraktik di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dan persoalan hukum keluarga lainnya, termasuk pula para ustadz yang mengkaji hukum pernikahan secara agama walaupun tidak begitu menguasai dalam hukum negara nya. Masyarakat yang tidak begitu menguasai adalah mereka yang biasanya hanya mengetahui lewat kabar, bukan mereka yang mengkajinya secara mendalam atau bukan pula

mereka yang berkompeten dalam menyelesaikan persoalan terkait hal tersebut.

Di dalam Peraturan Menpan RB Permenpan No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu menyatakan bahwa jabatan fungsional penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.<sup>271</sup>

Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Di dalam pasal pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>272</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti mencermati pada 15 pandangan tentang Faktor penyebab terjadinya nikah di bawah tangan oleh masyarakat dalam kategori para praktisi hukum antara lain penyebab terjadinya nikah di bawah tangan menurut petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti LH dan AN (KUA Jekan Raya) adalah karena masyarakat tidak mau berurusan ke KUA maupun pelengkap administrasi lainnya, adanya oknum-oknum yang memberikan info kepada

---

<sup>271</sup>Peraturan Menpan RB Permenpan No. 9 Tahun 2019.

<sup>272</sup>Yusna Zaidah, Peradilan Agama di Indonesia, Banjarmasin: IAIN Antasari Presss, 2015, hlm 63.

masyarakat dengan info yang berkesan tidak mudah jika berurusan di KUA, kurangnya pengetahuan/ wawasan terkait dampak nikah apabila yang tidak dilakukan di KUA, hamil karena kecelakaan/ hamil sebelum menikah, dan umur yang belum memenuhi batas usia boleh menikah. Menurut WN dan AB (KUA Pahandut) adalah karena ingin poligami, tidak mau berurusan, masih belum mengurus akta cerai, masih dalam masa iddah, umur yang belum memenuhi batas usia menikah, pergaulan bebas, dan pengaruh zaman milenial. Menurut MNST (KUA Sebangau) hamil karena kecelakaan/ hamil sebelum menikah, tidak mau berurusan ke KUA maupun pelengkap administrasi lainnya, waktu yang terbatas, tidak mampu memenuhi persyaratan. Menurut WN (KUA Rakumpit) karena masyarakat tidak mau repot berurusan ke KUA dan juga karena suami tidak mendapat persetujuan istri untuk menikah lagi. Sedangkan menurut AB (KUA Bukit Batu) adalah karena pasangan tidak mendapat restu dari orang tua dan juga perempuan hamil di luar nikah.

Adapun perspektif dari pihak hakim tentang penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan menurut N adalah karena usia, kesulitan dalam akses menuju KUA, malas berurusan. Menurut MA adalah karena kelalaian penghulu, karena jarak yang menuju KUA jauh dari rumahnya, kurang informasi, tidak mampu bayar karena dulu itu nikah bayar tidak seperti sekarang yang sudah gratis, dan faktor umur belum sampai.

Dalam permasalahan yang sama menurut masyarakat yang menikah resmi dalam hal ini SA menjelaskan bahwa penyebab nikah



nikah di bawah tangan adalah karena memiliki ingin memiliki isteri simpanan. Menurut FA karena adanya perselingkuhan, kurang informasi, usia yang belum sampai, dan orang tua yang ingin lepas tanggungan. Selanjutnya dalam permasalahan yang sama menurut masyarakat yang menikah di bawah tangan dalam hal ini SR menjelaskan alasannya menikah di bawah tangan karena kesepakatan keluarga dan kurangnya mengetahui dampak yang akan didapatkannya. Sedangkan M menjelaskan alasan dirinya adalah karena jarak tempuh menuju KUA terlalu jauh dari rumahnya.

Mengacu pandangan masyarakat di atas maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya nikah di bawah tangan antara lain sebagai berikut.

1. Perempuan yang ingin menikah namun tidak memiliki akta cerai, artinya dalam faktor ini bisa dilihat bahwa pada masyarakat tersebut keinginan memenuhi kehendak dirinya lebih besar dari keinginan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka pada faktor ini keberlakuan hukum tidak dijalankan menyeluruh oleh masyarakat, padahal dalam *maqasid syari'ah* atau tujuan diberlakukannya hukum adalah karena adanya hikmah yang terkandung di dalamnya.
2. Pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua/wali. Bahwa dalam kenyataan yang masih terjadi di masyarakat, dari beberapanya ialah karena orang tua mereka tidak menyetujui pilihan yang ingin dinikahi. Sebagian dari mereka memilih untuk menikah di bawah

tangan nikah dikarenakan menikah di bawah tangan tidak ada pemeriksaan wali seperti yang dilakuka di KUA, maka dari itu sering ditemukan dari pernikahan di bawah tangan bahwa status pernikahannya tidak sah, baik secara negara maupun secara agama karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Hal ini berkenaan dengan ketentuan dari pernikahan dalam fikih munakahat bahwa “rukun dan syarat adalah yang menentukannya sah tidaknya suatu pernikahan”

3. Terlanjur hamil di luar nikah. Faktor ini merupakan peristiwa yang sudah begitu banyak terjadi di masyarakat bahkan faktor ini seakan menjadi salah satu faktor yang paling banyak menjadi alasan seseorang menikah di bawah tangan karena ingin menutupi rasa malu keluarga. Akibatnya pernikahan tersebut tidak di anggap sah oleh negara karena memilih menikah secara bawah tangan. Padahal di dalam UU No. Tahun 1974 pasal 53 ayat 1 menerangkan bahwa perkawinan wanita haml di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilanjutkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Artnya disini juga bisa dinilai adanya faktor kesengajaan tidak mentaati hukum yang berlaku di negara, demi menutupi rasa malu.
4. Masyarakat ingin cepat menikah namun tidak mau repot berurusan. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kelengkapan administrasi yang tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat sehingga kekeliruan

dari pemikiran mereka ialah beranggapan bahwa nikah di bawah tangan adalah solusi dari kesulitan tersebut meskipun sebenarnya ketika menikah di bawah tangan akan mendatangkan banyak masalah dan kesulitan yang akan didapatkan walaupun awalnya terkesan memudahkan. Hal ini berkenaan dengan apa yang disebutkan di dalam kaidah fiqhiyyah, bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

5. Adanya calo. Mengenai adanya calo jika dihubungkan dengan nikah di bawah tangan maka kesan kehadirannya menjadi negatif, karena info yang diberikannya adalah bertentangan dengan apa yang telah di atur oleh negara sehingga menjadikan masyarakat terdorong untuk memilih nikah di bawah tangan. Mengenai hal ini harusnya terhadap calo diadakan pula RUU akan sanksi yang diperolehnya seperti yang didapatkan pasangan yang menikah di bawah tangan sebagaimana pada RUU pasal 143 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dan disebutkan pada pasal 5 ayat 1 bahwa akan di pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.
6. Suami ingin poligami tanpa sepengetahuan istri yang ada. Faktor ini mungkin menguntungkan oleh pihak suami karena ia bisa menikah

diam-diam tanpa sepengetahuan isterinya, namun tetap saja ini tidak baik karena memunculkan adanya ketidakjujuran di dalam rumah tangga serta dampak buruk lainnya serta tidak menjalankan ketentuan hukum negara yang berlaku. Hal ini berkenaan UU. Perkawinan Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak pihak bersangkutan”.

7. Akses menuju KUA sulit. Hal ini sangat berkemungkinan di alami oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Masyarakat menjadi kesulitan untuk menuju KUA karena mereka memerlukan waktu yang lebih banyak dan uang yang dikeluarkan pun lebih banyak terhadap transportasi menuju KUA tersebut. Maka sebenarnya P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) diperlukan untuk tiap desa/ kelurahan guna menjembatani urusan di KUA bagi masyarakat pedesaan/ kelurahan tersebut. Hal ini berkenaan dengan peraturan yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2.
8. Kekeliruan pemahaman masyarakat. Faktor ini berkaitan pada pemikiran orang tua yang beranggapan antara nikah di KUA dan nikah dengan penghulu kampung sama saja, sehingga anaknya yang juga tidak begitu memahami menjadi ikut berfikir bahwa yang dikatakan orang tuanya tersebut benar. Padahal status keabsahannya jelas berbeda bagi negara, sebagaimana halnya yang telah diatur

dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa “pernikahan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang”.

9. Calon pengantin belum cukup umur untuk menikah. Dalam faktor ini sebenarnya menikah di bawah tangan bukanlah satu-satunya solusi, karena apabila usia belum cukup bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi dari sebagian masyarakat tidak banyak yang mengurus dispensasi perkawinan tersebut dan memilih nikah di bawah tangan atau menikah dengan penghulu kampung. Hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa prosedur seharusnya yang dilalui bukanlah menikah di bawah tangan melainkan mengurus dispensasi sebagaimana halnya yang disebutkan dalam UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.
10. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Adapun kurangnya informasi yang harusnya diketahui masyarakat juga menjadi hambatan bagi mereka mengetahui akibat sesudahnya dari nikah di bawah tangan, maka sebenarnya sosialisasi sangat diperlukan bagi masyarakat. Sosialisasi ini tidak mesti hanya bisa dilakukan dengan tatap muka tapi juga lewat sosial media agar masyarakat tidak salah langkah dalam melangsungkankan pernikahannya dengan sesuai pada hukum negara dan hukum islam. Hal ini agar bisa mewujudkan sebagaimana apa yang ditujukan oleh hukum yaitu memberi kesejahteraan pada masyarakat dan sesuai dengan *maqasid syari'ah*.



Adapun berdasarkan paparan di atas, maka bisa di ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan dalam pendapat subjek bahwa yang menjadikan faktor secara umumnya ialah pengaruh jarak, kepraktisan, pendidikan serta kesadaran hukum. Sedangkan apabila di lihat dari sisi perilaku dari subjek yang di wawancara ada yang mengetahui dan tidak mengetahui. Bagi yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tahu adalah sebagaimana halnya pada para penghulu KUA dan Hakim Pengadilan Agama yang mengetahui faktor tersebut serta aturan yang berlaku, bagi yang mengetahui namun tidak menyadari bahwa dirinya tahu sebagaimana halnya pada masyarakat yang mengetahui nikah yang benar bagi Negara itu dilangsungkan di KUA namun karena dirinya mendapatkan isu dari oknum calo sehingga bisa menjadikan dirinya lupa bahwa sebenarnya ia mengetahui, bagi yang tidak mengetahui namun sadar bahwa dirinya tidak tahu adalah sebagaimana halnya pada masyarakat yang kekurangan informasi dan perlu lebih banyak sosialisasi, dan yang terakhir bagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu adalah sebagaimana halnya pada masyarakat yang berfikir keliru bahwa nikah di bawah tangan dan nikah di KUA tidak ada bedanya padahal sangat jelas keduanya memiliki perbedaan dari segi kekuatan hukum pernikahannya. Adapun keempat kategori jenis manusia ini seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali yakni manusia tidak menjadi 4 golongan:

1. Seseorang tahu (berilmu) dan tahu bahwa dirinya tahu, maka bagi orang yang tidak mengetahui dan perlu bimbingan bisa mengikuti apa mencari apa yang tidak diketahuinya tersebut terhadap orang ini.
2. Seseorang yang tahu namun tidak tahu bahwa dirinya tahu, orang seperti ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan perlu diingatkan.
3. Seseorang yang tidak tahu namun dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, orang seperti masih dikatakan baik karena ia menyadari kekurangan dirinya sehingga mampu menempatkan dirinya di tempat yang sepatutnya
4. Seseorang yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu, orang yang seperti ini adalah jenis yang paling buruk karena ia selalu merasa dirinya mengerti dan tahu, padahal ia tidak tahu apapun.

Menurut peneliti, dari penjelasan yang telah disebutkan di atas secara umum ialah kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat sehingga dari mereka ada yang bersikap apatis/ kurang peduli terhadap hukum negara yang berlaku. Bahkan, sebagian masyarakat tersebut dari beberapa kasus tak sedikit pula dilakukan oleh para artis padahal sebenarnya mereka adalah publik figur yang tentunya akan menjadi sorotan masyarakat, merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Kesadaran hukum ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Adapun sikap apatis merupakan suatu kondisi psikologis dimana seseorang atau individu tidak

peduli terhadap aspek-aspek peneting dalam kehidupan manusia, seperti aspek emosional, kehidupan sosial, serta fisik.

Apabila suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada. Maka Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat perlu lebih intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Adapun beberapa masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dengan rendah pemahaman dan kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pada kenyataannya masyarakat pedalaman atau pegunungan banyak menikah di bawah tangan karena akses menuju KUA yang jauh juga kurangnya kesadaran serta pemahaman mereka. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum negara..

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis taklim dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum nikah di bawah tangan menurut petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti LH (KUA Jekan Raya) menurutnya didalam al-qur'an yang membahas tentang pernikahan memang tidak ada anjuran harus di catat, namun dalam keterangan surah yang lain di haruskan menati *ulil amri* yang artinya menaati pemerintah. WN dan AB (KUA Pahandut) menjelaskan bahwa Memang sebenarnya boleh saja selagi terpenuhinya rukun dan syarat jika dilihat dalam aturan yang ada pada agama, namun menurut aturan negara nikah di bawah tangan sebenarnya memang sudah tidak dibolehkan sejak tahun 1946 oleh pemerintah. Menurut MNST (KUA Sebangau) menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan itu melanggar aturan negara sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Menurut M (KUA Rakumpit) nikah di bawah tangan secara agama boleh selama syarat dan rukunnya terpenuhi, namun dilarang secara hukum negara. Adapun menurut F (KUA Bukit Batu) selagi memenuhi rukun dan syarat menurut agama memang sah, namun negara punya aturan lain yang menganggapnya masih tidak sah karena tidak sesuai aturan. Sedangkan menurut Hakim N Mengenai dasar hukum nya ini jelas undang-undang tidak membolehkan nikah di bawah tangan, adapun yang membolehkan bukan kapasitas Hakim menjawabnya. Menurut MA dasar hukum terkait dari nikah di bawah tangan ini ialah seperti apa yang telah dicantumkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat sahnya pernikahan berkaitan dengan pencatatan, dan nikah di bawah tangan tidak ada itu maka hukumnya menurut negara tetap tidak sah.

Menurut penghulu kampung BHR menjelaskan bahwa memang nikah ini ada perbedaan hukumnya antara islam dengan negara mengenai status keabsahannya, kalau menurut negara apabila nikahnya tidak tercatat di KUA tidak dianggap sah, sedangkan menurut agama selagi rukun syaratnya lengkap terpenuhi maka dikatakan sah. MH menjelaskan bahwa dasar hukum ini hanya undang-undang negara saja yang mengaturnya, karena didalam agama apabila sesuai rukun dan syaratnya semuanya sudah tercukupi maka tidak ada halangan untuknya menikah. Walaupun belum memenuhi batas usia boleh menikah, karena di dalam agama tidak ditemukan syari'at yang mengatur batas usia menikah. Sedangkan menurut masyarakat yang menikah resmi dan menikah di bawah tangan dari yang telah di wawancara tidak ada yang mengetahui dasar hukum terkait nikah di bawah tangan tersebut.

Hemat peneliti, dasar hukum yang telah disebutkan di atas memang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas bahwa nikah di bawah tangan itu dilarang, namun terdapat makna lain yang tersirat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengandung makna dilarangnya nikah di bawah tangan dan akibat dari nikah di bawah tangan condong kepada menyulitkan. Contohnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan bahwa nikah di bawah tangan dilarang, namun mengutip perkataan salah satu hakim MA “Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa



perkawinan harus dicatat, sehingga makna kontrarionya adalah kebalikan dari itu, artinya tidak boleh tidak mencatatkan perkawinan.” Jadi, menurut peneliti maksud dari Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tidak boleh nikah di bawah tangan.

Kemudian dalam surah an-Nisā ayat 59 dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٢٧٣

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>274</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati

putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum.

Secara berurut dinyatakan-Nya; “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah” dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Alquran dan “taatilah Rasul-Nya”, yakni Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian “di antara kamu”, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah

<sup>273</sup>QS. an-Nisā [3]: 59.

<sup>274</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 114.

Rasul-Nya. “Kemudian jika kamu berlainan pendapat”, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Alquran dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sahih, “maka kembalikanlah ia kepada” nilai-nilai dan jiwa firman “Allah” yang tercantum dalam Alquran, serta nilai-nilai “dan” jiwa tuntunan “Rasul” yang kamu temukan dalam sunnahnya, “jika kamu benar-benar beriman” secara mantap dan bersinambung “kepada Allah dan hari kemudian”. Yang demikian “itu”, yakni sumber hukum ini, adalah “lebih utama” lagi sempurna, sedang selainnya adalah buruk dan memiliki kekurangan “dan”, di samping itu, ia juga “lebih baik akibatnya”, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.<sup>275</sup>

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *ulī al-amr*. Dari segi bahasa, *ulī* adalah bentuk jamak dari *walī* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu tidak banyak, sedang kata *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ulī al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ada yang berpendapat bahwa kata mereka bermakna para penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah

---

<sup>275</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm. 583-584.

yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Di sisi lain, bentuk jamak pada kata *ulī* dipahami oleh sementara ulama dalam arti mereka adalah kelompok tertentu, yakni suatu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu. Misalnya dalam hal pengangkatan kepala negara, pembentukan Undang-Undang dan hukum. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya serta angkatan bersenjata. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh pengarang tafsir *al-Manār*, yakni Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan al-Maraghi.<sup>276</sup>

Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada *ulil amri*. Tetapi, apabila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.<sup>277</sup>

Artinya: Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya dari Ubaidullah berkata: Nafi' menyampaikan kepada kami dari Ibnu

<sup>276</sup> *Ibid.*, hlm. 585-586.

<sup>277</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, Libanon: Darul Fikri, 2006, hlm. 191.

Umar dari Nabi SAW. Muhammad bin Subbah menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Zakaria dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda: Mendengar dan taat adalah hak (kebenaran) selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat. (HR. Bukhari)<sup>278</sup>

Taat dalam bahasa Alquran berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.<sup>279</sup> Surah an-Nisā ayat 59 juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.<sup>280</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan pencatatan perkawinan yang merupakan perintah dari *ulil amri* atau pemerintah, yang mana dalam perintah tersebut tidak mengandung kedurhakaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan tujuan dari pemerintah adalah agar tertib administrasi. Pencatatan perkawinan itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, melainkan juga untuk masyarakat itu sendiri sehingga pencatatan perkawinan wajib dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian tidak boleh melakukan nikah di bawah tangan.

---

<sup>278</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 352.

<sup>279</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah...*, hlm. 587.

<sup>280</sup> *Ibid.*, hlm. 588.

Selanjutnya dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا

هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".<sup>281</sup>

Perintah Rasul SAW untuk mengadakan walimah dalam hadis ini

tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sebagian ulama yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama adalah ulama Zahiriyah yang mewajibkan walimah atas setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis tersebut sebagai perintah wajib. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang hukum walimah, pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa pengumuman adalah suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan.<sup>282</sup>

Adapun dasar hukum yang membolehkan nikah di bawah tangan menurut penghulu KUA se Kota Palangka Raya secara umum adalah nikah sah secara hukum agama jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini 2 hakim yakni N dan MA tidak menjawab dengan dalih bukan kapasitas hakim

<sup>281</sup> Abi 'Isa bin Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami'u as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Šāliš*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1934, hlm. 402.

<sup>282</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 156-157.



untuk menjawabnya. Adapun dari kalangan Penghulu Kampung yang memiliki jawaban boleh dan sah selagi bisa memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam agama. Dari kalangan masyarakat yang menikah resmi maupun di bawah tangan sama-sama tidak memahami terkait dasar hukum tersebut. Adapun yang berpendapat dengan mengatakan nikah di bawah tangan ini sah jika sesuai dengan ketentuan dan syaratnya dalam islam, berlandaskan dengan dalil Alquran surah an-Nisā ayat 3 sebagai berikut:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ... <sup>283</sup>

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.<sup>284</sup>

Menurut BHR pada ayat tersebut tidak ada perintah untuk mencatatkan pernikahan, tidak ada kalimat *Faktubū: Catatlah!* Dalam ayat tersebut tegas: *Fankihū: nikahilah*, bahasanya bukan *catatlah pernikahannya*. Berdasarkan dalil tersebut BHR membolehkan nikah siri namun tidak membolehkan zina siri atau zina zahir. Selain itu BHR juga menggunakan dalil berupa hadis sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.<sup>285</sup>

<sup>283</sup> QS. an-Nisā [3]: 3.

<sup>284</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 99.

<sup>285</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (1)*, Penerjemah Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa'i Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 796.

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, 'Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, 'Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahnya?' Nabi menjawab: 'Jangan.' Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi SAW menjawab: 'Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. (HR. Abu Daud)<sup>286</sup>

Hemat peneliti, memang secara eksplisit perintah untuk mencatatkan pernikahan tidak diatur baik dalam Alquran maupun hadis, namun pernikahan yang tidak dicatatkan pada konteks zaman sekarang dapat menimbulkan mudarat bagi pasangan suami-istri dan juga anak. Menurut peneliti, seandainya Rasulullah SAW hidup pada zaman sekarang yang mana kultur catat-mencatatnya sangat kuat dan hal tersebut menimbulkan kemudahan/kemaslahatan bagi masyarakat maka pencatatan perkawinan bisa saja diwajibkan oleh Rasulullah SAW.

Kemudian hemat peneliti, mengenai pentingnya pencatatan nikah dapat dikiasikan pada Alquran yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan utang-piutang (muamalah) yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ<sup>287</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

<sup>286</sup> *Ibid.*

<sup>287</sup> QS. al-Baqarah [2]: 282.

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>288</sup>

Pada ayat di atas terdapat kata *tadāyantum* yang diterjemahkan dengan bermuamalah, yang berasal dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, ketaatan dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal-balik, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang-piutang.<sup>289</sup> Kata selanjutnya yang tertulis *ilā ajalin musammān faktubūh* adalah apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai jangka waktu tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatatkan transaksi tersebut.<sup>290</sup>

Potongan ayat *faktubūh* adalah berbentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*) yang berasal dari kata *kataba-yaktubu*, yakni mencatat dengan isim masdar-nya *katban-kitāban-kitābatan* yakni pencatatan. Kata ini terdapat penambahan huruf *fa'* sebagai jawaban dari *izā*. Kata kerja ini bermakna perintah atau tuntutan dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan muamalah.<sup>291</sup>

Perintah untuk menuliskan segala transaksi muamalah ini jika dikaitkan dengan kaidah kebahasaan dalam *uṣūl al-fiqh* termasuk kategori

<sup>288</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 59-60.

<sup>289</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 563-564.

<sup>290</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hlm. 732.

<sup>291</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 76.

*amar* dengan kaidah, yakni menurut aslinya perintah itu adalah untuk mewajibkan. Adakalanya perintah (*amar*) bersifat wajib, anjuran, petunjuk, ancaman, boleh, permohonan, melemahkan dan lain-lain, jika ada keterangan (*qarinah*) yang menunjukkan tidak wajib.<sup>292</sup> Oleh sebab itu, perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah (utang-piutang) merupakan anjuran sunnah untuk dilakukan.<sup>293</sup> Hal ini dikarenakan perintah pencatatan tersebut merupakan jawaban dari syarat bermuamalah secara tidak tunai.

Berdasarkan ketentuan hukum pencatatan utang-piutang yang disunnahkan (anjuran), apabila dikaitkan dengan pencatatan nikah yang begitu luhur dan sakral mestinya lebih utama lagi untuk dicatatkan. Karena pencatatan nikah merupakan hukum yang tidak diatur secara langsung dalam nas maka untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam nas diperlukan suatu metode. Metode tersebut adalah *qiyas*, metode *qiyas* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Aṣl* adalah kejadian (pokok) yang hukumnya disebutkan dalam nas. Anjuran untuk melakukan pencatatan dalam transaksi muamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 282.
- 2) *Al-Far'u* merupakan (cabang) kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nas. Adapun cabang yang ingin dicari hukumnya adalah pencatatan nikah.

---

<sup>292</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam istinbāḥ Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 17-18.

<sup>293</sup>Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imām asy-Syāfi'i*, penerjemah Ali Sultan dan Fedrian Hasmand dengan judul "Tafsir Imam Syafi'i Jilid: 1 Surah al-Fatihah – Surah Ali 'Imran, Jakarta: Al-Mahira, 2008, hlm. 502.

- 3) *Al-Hukm al-Aṣl* merupakan hukum syara' yang dibawa oleh nas dalam masalah asal dan menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Adapun hukum pencatatan transaksi utang-piutang pada surah al-Baqarah ayat 282 adalah sunah.
- 4) *Al-'Illah* merupakan alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Adapun pencatatan nikah dengan pencatatan dalam transaksi muamalah memiliki kesamaan *'illah*, yakni transaksi (akad). Jika muamalah tidak secara tunai merupakan transaksi antara pemberi utang dan yang berutang. Begitu pula dengan akad nikah yang mesti dicatat karena adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya.<sup>294</sup>

Berdasarkan ketentuan *qiyas* di atas maka pencatatan nikah memiliki kesamaan *'illah* dengan pencatatan utang-piutang yakni transaksi. Dengan demikian, pencatatan nikah hukumnya sunah berdasarkan pada hukum *aṣl* surah al-Baqarah ayat 282. Walaupun memiliki kesamaan *'illah* sebagai transaksi sosial, tetapi akad nikah merupakan perjanjian yang kuat dan memiliki akibat hukum yang luas yang menyangkut hak nafkah, hak waris, hak harta gono-gini dan status nasab.

Pencatatan dalam transaksi utang-piutang berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahkan menjadi alat bukti primer karena penyebutannya dalam surah al-Baqarah ayat 282 didahulukan daripada persaksian. Pencatatan diterangkan sebagai alat bukti tertulis yang adil di sisi Allah dan dapat menguatkan

---

<sup>294</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul "Ilmu Uṣūl Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 9, 1977, hlm. 77.



persaksian serta menghilangkan keragu-raguan. Utang-piutang yang tidak dicatatkan, tidak sekalipun berpengaruh dalam keabsahan muamalah. Begitu juga dalam perkawinan, pencatatan nikah memiliki fungsi sebagai alat bukti keabsahan suatu peristiwa perkawinan. Sekalipun pernikahan itu tidak dicatat dan selama masih memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut sah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi permasalahan (misalnya perceraian) maka istri tidak bisa menggugat ke Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya karena Pengadilan hanya mengakui perkawinan yang memiliki akta nikah (alat bukti) sebagai dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama bagi pernikahan orang muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi pernikahan non-muslim.

Di kalangan ahli hukum, dalam memahami surat al-Baqarah ayat 282 yaitu dengan menggunakan metode qiyas. Sehingga dapat di temukan landasan hukum, tentang pencatatan perkawinan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa, "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukumnya dan umat islam wajib melaksanakannya". Dalam hal pencatatan perkawinan, rumusan hukumnya adalah demi mewujudkan kemaslahatan suami isteri serta anak yang dilahirkan, juga sebagai jaminan hukum adanya suatu pernikahan. Keberadaan hal tersebut, tidak di salahkan atau dibenarkan oleh syara' yang artinya keberadaan pencatatan perkawinan, tidak bertentangan dengan aturan hukum syara'. Di balik itu semua justru mengandung kemaslahatan, yang sesuai dengan tujuan *maqasid syari'ah*. Dalam hal kaitan ini, adalah sebagai

jaminan keselamatan keluarga dan keturunan yakni “*Al- Muhfzah ‘ala al-Nas*”.

## **2. Pandangan Masyarakat tentang Dampak dari Nikah di Bawah Tangan**

Ada begitu banyak dampak nikah di bawah tangan dari berbagai pandangan masyarakat, namun tidak semua memiliki pemikiran yang sama, artinya ada perbedaan-beda yang diketahui dari pengalaman masyarakat, baik itu diketahui karena benar-benaar mempelajarinya, mendengar info ke info, maupun yang langsung mengalaminya. Namun, secara garis besarnya mengatakan bahwa menikah di bawah tangan hanya akan membawa dampak buruk di kemudian hari setelah pernikahannya, meskipun di awal terkesan lebih memudahkan.

Mengenai dampak nikah di bawah tangan ini, dari Penghulu KUA se-Kota Palangka Raya seperti LH dan AN (KUA Jekan Raya) menjelaskan bahwa Diantara dampaknya adalah tidak bisa mendapat akta, mendapatkan kesulitan saat berurusan, harta gono gini akan bermasalah di kemudian hari apabila tidak ada buku nikah, pembagian hak waris pun bermasalah, karena tiada bukti autentik maka tiada pula perlindungan negara bagi dirinya. WN dan AB (KUA Pahandut) menjelaskan bahwa dampaknya itu nanti apabila ia hamil kemudian punya anak, anaknya tidak bisa membuat akta kelahiran walaupun bisa juga keterangannya di nisbatkan kepada ibunya saja tidak kepada ayahnya. Kemudian jika dikemudian hari ada pembagian harta waris juga tidak bisa mendapat haknya, apabila anaknya dikemudian hari mau menikah resmi maka akan tidak bisa selama orang tuanya belum

mengisbathkan pernikahan di bawah tangannya. MNST (KUA Sebangau) menjelaskan bahwa dampaknya yang jelas dia tidak mendapat perlindungan dari Negara terhadap pernikahannya tersebut, dan tidak mendapat buku nikah maka untuk berurusan dalam berbagai urusan akan disulitkan. M (KUA Rakumpit) menjelaskan bahwa dampaknya adalah Tidak bisa mendapat warisan dari suaminya, tidak bisa menuntut harta gono-gini, anak yang dilahirkannya secara nashab itu mengikut kepada ibunya, untuk anak nya dalam hak waris ia tidak bisa memperoleh, dan F (KUA Bukit Batu) menjelaskan bahwa dampaknya adalah tidak bisa membuat akta, akan menyulitkannya dalam berurusan seperti membuat BPJS, umroh dan lain sebagainya, tidak mendapat perlindungan negara, tidak mendapat hak waris dan bermasalah jika dikemudian hari ingin menuntut mengenai harta gono gini .

Adapun pandangan Hakim seperti N (PA) menjelaskan bahwa Dampaknya pernikahan mereka tidak diakui oleh Negara yang dengan artian pula ia tidak mendapat perlindungan dari negara, kemudiann dalam segi kewarisan jika terjadi sengketa dan ada gugatan oleh pengadilan tidak dianggap sebagai ahli waris, karena tidak ada bukti autentik yang dimilikinya sehingga ia dalam hukum positif tetap bukan ahli waris. MA (PA) menjelaskan bahwa dampaknya tidak ada buku nikah sedangkan buku nikah itu sangat diperlukan contohnya seperti membuat akta kelahiran anak, kesulitan untuk berurusan di masyarakat seperti urusan pinjam meminjam, tiada perlindungan dari negara, dan terhalang dalam hak waris.

Dalam pandangan Penghulu kampung terkait nikah di bawah tangan ini seperti BHR menjelaskan bahwa Dampaknya yang jelas ia tidak bisa mendapat buku nikah, dan tidak mendapat perlindungan dari negara. MH menjelaskan bahwa dampaknya sebenarnya ada banyak, dan beberapa diantaranya ia tidak mendapat perlindungan hukum dalam pernikahannya, tidak bisa membuat akta kelahiran bagi anaknya, dikemudian hari akan bermasalah dalam hak waris, dan kesulitan dalam berurusan.

Adapun pandangan masyarakat yang menikah resmi seperti SA menjelaskan bahwa tidak bisa membuat Kartu Keluarga, karena yang iatahu sekarang apabila ingin membuat kartu keluarga harus melampirkan buku nikah serta tidak bisa mendapat perlindungan negara dalam pernikahannya, maka apabila dalam hubungan suami isteri tersebut dan sang suami berbuat seenaknya terhadap sang isteri, isterinya tidak ada kekuatan untuk mengadukan ke pengadilan. FA menjelaskan bahwa dampaknya tidak bisa mendapat buku nikah, karena menikahnya bukan di KUA, ia tidak bisa buat akta untuk anak, dan tidak mendapat perlindungan negara.

Sedangkan dari masyarakat yang menikah di bawah tangan seperti SR menjelaskan bahwa Dampaknya tidak bisa memiliki buku nikah, tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak, dan kebetulan anak saya sudah dua dan keduanya menjadi tidak bisa memiliki akta. M menjelaskan bahwa tidak akan mendapat perlindungan negara, walau suami berbuat seperti apapu termasuk meninggalkan dengan menghilangkan jejak.

Mengenai redaksi pencatatan nikah di bawah tangan menurut peneliti sebenarnya tidak ada juga tidak masalah, hal ini berkaitan dengan pandangan Hakim MA yang mengatakan bahwa karena surat pernyataan tersebut tidak legal maka jika seandainya tidak bisa membawanya ke pengadilan sebagai alat bukti juga tidak masalah karena tidak berkekutan hukum dari bukti tersebut dan tidak diakui di mata hukum. Hal ini sesuai dengan peraturan yang memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan kepada badan yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<sup>295</sup> dan juga dalam KHI Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dalam ayat (2) ditegaskan “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.<sup>296</sup>

Secara umum orang yang melakukan nikah di bawah tangan itu berlandaskan bahwa nikah secara agama (nikah yang tidak dicatatkan) itu adalah sah asalkan syarat dan rukun nikah secara fikih terpenuhi. Namun menurut peneliti, pencatatan perkawinan pada konteks zaman sekarang khususnya di Indonesia sangat penting dilakukan, karena akta nikah pada zaman sekarang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Contohnya

---

<sup>295</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

<sup>296</sup>Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 5 ayat (1) dan (2).



jika ingin pergi haji maka akta nikah diperlukan, kemudian jika ingin membuat akta kelahiran anak juga diperlukan akta nikah. Jadi masyarakat tidak bisa terlepas dari akta nikah. Jika masyarakat tidak mempunyai akta nikah maka akan mempersulit dan menimbulkan mudarat bagi diri mereka sendiri.

Hemat peneliti, pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih sebagai berikut:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ.

Artinya: Menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.<sup>297</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan karena akan membawa kepada banyak kemanfaatan, dan jika pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan maka akan membawa kepada kemudaratannya.

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak mudarat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.<sup>298</sup>

Pada kaidah tersebut jelas disebutkan bahwa menolak mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah terjadinya pengingkaran dari pihak

<sup>297</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 27.

<sup>298</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

suami maupun istri terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam perspektif *maṣlaḥah* dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara akan tetapi keberadaannya tidak pula dilarang oleh syara.<sup>299</sup> Jadi dalam hal ini pencatatan perkawinan mengandung banyak kemaslahatan.

Menurut hemat peneliti dari sekian banyaknya pandangan masyarakat tersebut bahwa pernikahan di bawah tangan ini sangat tidak di anjurkan karena sangat merugikan bagi pasangan yang menikah, selain mereka telah tidak mentaati peraturan negara kemudian menjadikan pernikahannya tidak terdaftar tidak dianggap sah oleh negara juga tidak mendapat buku nikah yang tentunya ini sangat diperlukan. Selain daripada itu pasangan yang menikah di bawah tangan akan mendapat kesulitan berurusan di masyarakat dengan berbagai macam urusan, yang menjadikan mereka terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang harusnya menjadi mudah namun tersulitkan karena mereka tidak memiliki bukti dari akta autentik terhadap pernikahannya seperti halnya jika mereka ingin pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya, juga tidak bisa melakukan ibadah haji/umroh, sangat di sayangkan padahal menikah adalah penyempurna setengah dari agama, namun karena peraturan negara tidak dijalankan dengan benar walaupun mereka dari pasangan yang sah menurut agama, walaupun menikahnya bertujuan untuk menyempurnakan sebagian dari agama, namun karena tidak ada buku nikahnya mereka terhalang untuk melakukan ibadah umroh

---

<sup>299</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2008, hlm. 150.

bersama, padahal ini termasuk bagian dari rukun Islam. Selain dari itu pula akan bermasalah dalam hal waris, yang tentunya hal ini sangat merugikan bagi pihak perempuan yang menikah juga anak dari pernikahan tersebut, kecuali mereka mengisbatthkan pernikahan mereka sesudah menikah di bawah tangan. Sebenarnya pernikahan di bawah tangan ini memang dampaknya juga ada memudahkan bagi mereka yang ingin cepat berurusan (apabila ada banyak urusan yang harus diurus sebelum mendaftarkan pernikahannya), juga menyelamatkan bagi mereka diantara laki-laki dan perempuan sudah begitu dekat hingga kedekatan keduanya sangat membahayakan padahal usia mereka belum sampai batas usia boleh menikah, namun mengingat dampaknya juga begitu besar dan sangat meluas pernikahan di bawah tangan ini sangat tidak diperkenankan, karena semua dari kesulitan pasti ada jalan yang mampu memudahkan, seperti halnya bagi mereka yang belum sampai usia bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan dan pihak pengadilan akan mengarahkan apa saja yang perlu dilengkapi, apabila tidak paham dalam administrasi menikah di KUA pun, pihak KUA akan membantu mereka, maka sebenarnya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk memilih jalan dengan menikah di bawah tangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai pandangan masyarakat dalam memahami faktor nikah di bawah tangan tentunya beragam, hal ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalamannya. Adapun faktor yang melatar belakangi nikah di bawah tangan oleh masyarakat yang ingin menikah yaitu adanya masyarakat yang hamil di luar nikah, masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA, adanya calo yang menyebarkan isu tidak benar terkait nikah di KUA, persyaratan administrasi tidak lengkap, calon pengantin belum cukup usia menikah, kurangnya pengetahuan terkait pentingnya pernikahan yang di catatkan, jauhnya akses menuju KUA, kurang informasi, serta pergaulan bebas. Sedangkan faktor nikah di bawah tangan dari masyarakat telah menikah adalah karena suami ingin poligami diam-diam, tidak memiliki akta cerai resmi dan ingin menikah lagi.
2. Adapun dampak terhadap nikah di bawah tangan dari masyarakat yang langsung mengalaminya adalah tidak bisa mendapat buku nikah, tidak bisa membuat kartu keluarga, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, tidak mendapat perlindungan Negara. Sedangkan dampak dari pandangan

masyarakat yang memahami lewat apa yang diketahuinya adalah tidak mendapat hak waris baik ibu maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sulit berurusan di masyarakat seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tidak bisa melakukan ibadah haji/umroh, tidak bisa menuntut harta gono-gini, tidak bisa membuat kartu BPJS.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA sebaiknya bekerjasama dengan pemerintah kota untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, tidak hanya masyarakat yang berada di perkotaan namun juga yang berada di pedesaan, baik itu melalui penyuluhan yang terprogram maupun melalui ceramah/khutbah dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan nikah di bawah tangan.
2. Kepada Pemerintah kota sebaiknya perlu mengangkat tenaga honorer di daerah pedalaman yang sulit untuk akses menuju KUA dengan perwakilan penghulu resmi yang di angkat di kampung.
3. Bagi masyarakat khususnya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mendaftarkan ke KUA, karena mengingat begitu banyak dampak yang tidak baik yang akan muncul dari pernikahan di bawah tangan. Maka dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi lebih terjamin serta pernikahannya pun diakui Negara. Selain itu peluang terjadinya hal-hal



yang tidak diinginkan dari perkawinan lebih kecil kemungkinannya, namun apabila terjadi pun akan mendapat perlindungan dari Negara.

4. Bagi pihak eksekutif dan legislatif hendaknya segera mengesahkan sanksi bagi pelaku nikah sirri yang telah dirancang dalam Undang-Undang Hukum Materiel Peradilan Agama agar segera diberlakukan guna mencegah terjadinya nikah di bawah tangan di kalangan masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdillah, Abu, dan Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-jami'ul li ahkam al-Qur'an Juz XIV*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1997.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Khadimi, Nuruddin, *al Ijtihad al Maqasidy*, Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II, 1998.
- Abullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermasa, 1991.
- Ahmad, Abu, dan Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. VIII, 2007.
- A. Partanto, Pitus, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, 2001.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Shahih Sunan Abu Daud (1)*, Penerjemah Tajuddin Arief, Abdul Utsman, Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa'i, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Asfihani, Al-, *Asas Perkawinan*, Jakarta: Gunung Mulia, 1999.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asyhadie, Zaenal, dan Arieef Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Atho. Mudzhar, M., *Pendekatan Studi Islam dalam Toeri dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Farran, Syaikh Ahmad Mustafa al-. *Tafsir al-Imām asy-Syāfi'i*, penerjemah Ali Sultan dan Fedrian Hasmand dengan judul “Tafsir Imam Syafi’i Jilid: 1 Surah al-Fatihah – Surah Ali ‘Imran, Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002.

- J. Moeleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Majid Najjar, Abdul, *Maqashid syariah bi ab'adin jadidah*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami : 2008.
- Manan, Abdul , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet ke-2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Muchsin, H, *Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Peradilan Seluruh Indonesia*, Jakarta pada 4 s.d. 7 Agustus Agustus 2008.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abi 'Isa bin, bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami'u aṣ-Ṣaḥih wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Šālīs*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1934.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 122-124.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- P Robbins, Stephen, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1, Alih Bahasa oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan, Penyunting Tanty Tarigan, Edisi Kedelapan Jakarta :PT. Prehallindo, 2001.

- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarata: Paaragonatama Jaya, 2011.
- Rasyidin, Utang, dan Deddy Supriyadi, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2014.
- Sabuni, Al-, *Pandangan Al-qur'an terhadap pernikahan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Shadily, Hassan, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Shihab, M. Quraish , *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Siagian Sondang, Sarlito, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- SJ, Fadil, dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press Anggota IKAPI, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982, hlm. 10.
- S. Praja, Juhaya, *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung; CV Pustaka Setia, 1998.



- Sosroatmojo, Asro dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 3 Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Tim Penyusun, *Asas Pernikahan Vol.3, No.1*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, Jakarta: Interaksara, 2004.
- Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbāt Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Siri tidak dicatatkan terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Wirawan Sarwono, Sarlito, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet.13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zainuddin Ali, H., *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zuhayli, Wahbah, *Al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fiqr, 1997.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Ansar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Hoerunnisa, Annisa, *Tinjauan Konsep Mashlahah Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeng Kab. Majalengka Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.

Munawir, *Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Sanksi Nikah Sirri*, Palangka Raya: Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017.

Nurhidayah, *Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*, Makassar: Universitas Negeri, 2016.

Nurseha, Achmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Rizqi, Ayu Maulina, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)*, Banda Aceh-Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

Roy Purwanto, Muhammad, *Term .“Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence”*, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Widiastuti, *Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan*, Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1), 2008.

### C. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003, lihat, DEPAG RI, *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: DEPAGRI.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### D. Internet

Tanpa Nama, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palangka\\_Raya/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya/) (diakses 21 Maret 2020).

Tanpa Nama, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 21 Maret 2020).

Tanpa Nama, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 21 Maret 2020).

Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (diakses 21 Maret 2020).

### E. Wawancara

Hasil Observasi awal di KUA Kec. Jekan Raya pada hari Jum'at, 17 Januari 2020.

Wawancara dengan LH (Kepala KUA) di KUA Jekan Raya Kec. Kota Palangka Raya, pada tanggal 05 Maret 2020.

Wawancara dengan LH (Kepala KUA) di KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 10 Maret 2020.

Wawancara dengan MNST (Kepala KUA) di KUA Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, pada tanggal 11 Maret 2020.

Wawancara dengan WN (Kepala KUA) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 11 Maret 2020.

Wawancara dengan AB (Penghulu Fungsional) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 11 Maret 2020.

Wawancara dengan AN (Penghulu Fungsional) di KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 12 Maret 2020.

Wawancara dengan N (Hakim) di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 Maret 2020.

Wawancara dengan BHR (Penghulu Kampung) di Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 Maret 2020.

Wawancara dengan SA (masyarakat yang menikah resmi) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

Wawancara dengan SR (masyarakat yang menikah di bawah tangan) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

Wawancara dengan FA (masyarakat yang menikah resmi) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.



Wawancara dengan M (masyarakat yang menikah di bawah tangan) di Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

Wawancara dengan AB (Penghulu Fungsional) di KUA Kec. Phdt Kota Palangka Raya, pada tanggal 17 Maret 2020.

Wawancara dengan MH (Penghulu kampung) di Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada tanggal 15 Maret 2020.

Wawancara dengan MA (Hakim) di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 Maret 2020.

Wawancara dengan WN (Kepala KUA) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 April 2020.

Wawancara dengan F (Kepala KUA) di KUA Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, pada tanggal 13 April 2020.

Wawancara dengan M (Kepala KUA) di KUA Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya, pada tanggal 14 April 2020.

